

Laporan

Agustus 2024



REALITAS, TANTANGAN, DAN PELUANG

Traktat Perdagangan Senjata di Kawasan Asia-Pasifik

Andrea Edoardo Varisco, Manon Blancafort,
Yulia Yarina, and David Atwood



REALITAS, TANTANGAN, DAN PELUANG

Traktat Perdagangan Senjata di Kawasan Asia-Pasifik

Andrea Edoardo Varisco, Manon Blancafort,
Yulia Yarina, and David Atwood



Publikasi Small Arms Survey,
didukung oleh Pemerintah Kanada



Akuan

Diterbitkan di Swiss oleh Small Arms Survey

© Small Arms Survey (Graduate Institute of International and Development Studies), Geneva, 2024

Diterbitkan pertama kali pada Agustus 2024. Publikasi dalam Bahasa Indonesia: Februari 2025.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem temu kembali, atau dikirimkan dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Small Arms Survey, atau sebagaimana diizinkan secara tegas oleh undang-undang, atau berdasarkan ketentuan yang disetujui dengan organisasi hak reprografi yang sesuai. Pertanyaan mengenai reproduksi di luar cakupan di atas harus dikirimkan ke alamat di bawah ini.

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E, 1202 Geneva, Switzerland

Koordinator proyek: Marco Baccini

Penyunting: Matthew Johnson

Koordinasi produksi dan komunikasi: Olivia Denonville, Katie Lazaro, and Lionel Kosimik

Pemeriksa fakta: François Fabry

Penyunting salinan: Alessandra Allen

Desain dan tata letak: Rick Jones

Kartografi: Jillian Luff, MAPgrafix

Pemeriksa aksara: Stephanie Huitson

ISBN 978-2-940747-19-1

Small Arms Survey tidak mengambil posisi apa pun terkait status atau nama negara atau kawasan yang disebutkan dalam publikasi ini.

Foto sampul: Setelah latihan menuju peringatan Hari Kemerdekaan, seorang anggota angkatan bersenjata Sri Lanka berdiri di samping sebuah meriam lapangan yang ditarik, Colombo, Sri Lanka, 31 Januari 2019
Sumber: Reuters/Dinuka Liyanawatte

Tentang penulis dan ucapan terima kasih

Andrea Edoardo Varisco adalah seorang ahli pengendalian ekspor senjata di Small Arms Survey. Sebelum bergabung dengan Small Arms Survey, ia merupakan seorang direktur di Transfers Programme, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dan direktur pelaksana program penggunaan ganda dan pengendalian perdagangan senjata SIPRI. Andrea juga bekerja sebagai kepala analitik untuk Riset Persenjataan Konflik dan memiliki pengalaman riset lapangan di negara-negara terdampak konflik di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika sub-Sahara. Ia terlibat dalam penulisan sejumlah laporan mengenai pengendalian senjata. Andrea memperoleh gelar doktoral di bidang Studi Pemulihan Pascaperang dari Post-war Reconstruction and Development Unit, University of York, Inggris, gelar master di bidang Hubungan Internasional dengan spesialisasi Perdamaian dan Konflik dari Australian National University, bekerja sama dengan Peace Research Institute Oslo, serta gelar master lainnya di bidang Politik dan Perbandingan Institusi dari University of Milan.

Manon Blancafort adalah seorang Asisten Proyek di Small Arms Survey, tempat ia membantu analisis dan riset di bidang proliferasi ilegal senjata kecil dan senjata ringan di Afghanistan, alat ledak hasil improvisasi di Afrika Barat, dan Traktat Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty/ATT*) di kawasan Indo-Pasifik. Manon pernah bekerja di United Nations Institute for Disarmament Research dan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mengabdikan sebagai tentara cadangan di Angkatan Udara dan Antariksa Perancis. Ia memperoleh gelar master di bidang Perdamaian, Keamanan dan Konflik dari Université Libre de Bruxelles (Belgia) dan gelar pascasarjana dari Université Côte d'Azur (Perancis) dan San Remo International Institute of Humanitarian Law (Italia).

Yulia Yarina adalah seorang Asisten Proyek di Small Arms Survey. Ia merupakan praktisi pembangunan dengan latar belakang di bidang hak asasi manusia, pembangunan, konflik bersenjata, dan perdagangan. Ia memiliki pengalaman dalam mengaplikasikan metodologi kuantitatif seperti survei dan wawancara, serta analisis hukum. Yulia pernah bekerja di Amnesty International – kantor PBB Jenewa, Divisi Eropa Timur dan Asia Tengah di DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, Organisasi Perdagangan Dunia, serta University of Geneva. Ia memperoleh gelar master di bidang Hubungan Internasional dari

Graduate Institute of Geneva dan diploma di bidang hukum dari Humboldt University dengan fokus hukum internasional dan perdagangan.

David Atwood bekerja dalam berbagai peran di Small Arms Survey sejak 2012. Selama lebih dari 20 tahun, ia fokus pada isu-isu senjata kecil, utamanya pada isu pengembangan kebijakan internasional. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Quaker United Nations Office di Jenewa, di mana ia juga bertindak sebagai Perwakilan untuk Pelucutan Senjata dan Perdamaian dari tahun 1995 sampai 2011. Ia memperoleh gelar doktoral di bidang Ilmu Politik dari University of North Carolina dan gelar MA dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.



Para penulis berterima kasih kepada Pemerintah Kanada untuk dukungan finansial yang luar biasa terhadap publikasi ini. Para penulis juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kolega dan kontributor atas segala bantuan dan dukungan, serta kepada seluruh narasumber wawancara yang telah berpartisipasi dan menyumbang isi dalam Laporan ini.

Secara khusus, para penulis berhutang budi kepada Alistair Gee dan Philip Alpers dari Centre for Armed Violence Reduction (CAVR), serta Mitzi Austero dan Fred Lubang dari Nonviolence International Southeast Asia (NISEA) untuk dua makalah latar belakangnya yang telah membantu aneka observasi dalam Laporan ini. Para penulis juga berterima kasih kepada Ida Scarpino, Aaron Junhoung Yoo, Boyi Zhang, dan Shristi Tamrakar dari UN Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) yang telah memfasilitasi sejumlah pekerjaan di kawasan tersebut dan menyediakan analisis latar belakang. Para penulis juga turut berterima kasih kepada Rachel Stohl dari Stimson Center untuk partisipasinya dalam sesi informal bersama sejumlah negara dari kawasan Indo-Pasifik saat rapat Kelompok Kerja Traktat Perdagangan Senjata di Februari 2024. Para penulis secara khusus juga berterima kasih kepada Marco Baccini, Deepayan Basu Ray, Luigi De Martino, Nicolas Florquin, Sarah Parker, Matt Schroeder, and Callum Watson, yang telah menyediakan berbagai komentar di draf-draf awal Laporan ini dan membantu peningkatan kualitas naskah secara keseluruhan. Para penulis juga berhutang budi kepada Gianluca Boo atas bantuannya mengkonseptualisasikan visualisasi data untuk Laporan ini. Terakhir, para penulis mengucapkan terima kasih kepada tim publikasi dan komunikasi Small Arms Survey untuk bantuan krusial mereka dalam produksi dan promosi publikasi ini.

Daftar isi

Daftar kotak, peta dan tabel	7
Daftar singkatan dan akronim	9
Ringkasan eksekutif	11
Temuan utama	12
Pengamatan kebijakan	13
Universalisasi	13
Kepatuhan	15
Pendahuluan	17
Metodologi	23
Perdagangan senjata di kawasan Indo-Pasifik	27
Perdagangan legal	28
Perdagangan ilegal	42
Sikap terhadap ATT di kawasan Indo-Pasifik	51
Oseania	52
Asia Tenggara	63
Asia Timur	75
Asia Selatan	81

Universalisasi dan kepatuhan kepada ATT: tantangan dan langkah ke depan	89
Tantangan utama bagi universalisasi dan kepatuhan kepada ATT	90
Titik masuk dan peluang	96
Kesimpulan	107
Catatan akhir	110
Referensi	117

Daftar kotak, peta dan tabel

Kotak

1	Studi kasus mengenai keberagaman pola perdagangan senjata api dan pengguna akhir di kawasan ini: Bangladesh	45
2	Studi kasus mengenai keberagaman pola perdagangan senjata api dan pengguna akhir di kawasan: Papua Nugini	46

Peta

1	Keanggotaan ATT di kawasan Indo-Pasifik	20
2	Ekspor senjata utama di kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana tercatat dalam Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI	35
3	Ekspor senjata kecil dan senjata ringan di kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan ke UN Comtrade oleh eksportir	36
4	Ekspor senjata kecil dan senjata ringan di kawasan Indo-Spesifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan ke UN Comtrade oleh importir	37
5	Impor senjata utama ke kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana tercatat pada Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI	40
6	Impor senjata kecil dan senjata ringan ke kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan oleh para importir kepada UN Comtrade	41
7	Impor senjata kecil dan senjata ringan ke kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan oleh para eksportir ke UN Comtrade	42

Tabel

1	Penyerahan laporan tahunan oleh negara pihak ATT di kawasan Indo-Pasifik (mulai 31 Juli 2024)	29
2	Eksportir utama senjata konvensional di kawasan, diurutkan berdasarkan sumber	33

3	Importir utama senjata konvensional di kawasan, diurutkan berdasarkan sumber	38
4	Keanggotaan ATT di Oseania sejak Juni 2004	52
5	Keanggotaan ATT di Asia Tenggara sejak Juni 2024	64
6	Keanggotaan ATT di Asia Timur sejak Juni 2024	75
7	Keanggotaan ATT di Asia Selatan sejak Juni 2024	81

Daftar singkatan dan akronim

ASEAN	Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (<i>Association of Southeast Asian Nations</i>)
ATT	Traktat Perdagangan Senjata (<i>Arms Trade Treaty</i>)
BAFA	Kantor Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Pengendalian Ekspor
CAVR	Centre for Armed Violence Reduction
CCM	Konvensi Munisi Curah (<i>Convention on Cluster Munitions</i>)
CHT	Chittagong Hill Tracts
CSP	Konferensi Negara Pihak (<i>Conference of State Parties</i>)
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
HS	Sistem Terharmonisasi (Harmonized System)
PIF	Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum)
ITI	Instrumen Internasional untuk Memungkinkan Negara Mengidentifikasi dan Melacak Senjata Kecil dan Senjata Ringan Terlarang Secara Tepat Waktu dan Andal (<i>International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons</i>)
KII	Wawancara informan kunci (<i>key informant interview</i>)
KKITE	Kelompok Kerja bidang Implementasi Traktat yang Efektif
KKTP	Kelompok Kerja bidang Transparansi dan Pelaporan
KKUT	Kelompok Kerja bidang Universalisasi Traktat
LTTE	Liberation Tigers of Tamil Eelam
MANPADS	Sistem pertahanan udara portabel (<i>Man-portable air defence systems</i>)
NFM	Negara Federasi Micronesia
NISEA	Nonviolence International Southeast Asia
OMM	Ocean Maritime Management Company, Limited

OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PNGDF	Angkatan Pertahanan Papua Nugini (<i>Papua New Guinea Defence Force</i>)
RAN	Rencana Aksi Nasional
SAARC	Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja sama Regional (<i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>)
SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute
STMA	Strategic Trade Management Act
TIV	Nilai berbasis indikator tren (<i>trend-indicator value</i>)
TPNW	Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (<i>Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons</i>)
UE	Uni Eropa
UN Comtrade	Pangkalan Data Statistik Perdagangan Komoditas Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations Commodity Trade Statistics Database</i>)
UNGA	Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations General Assembly</i>)
UN PoA	Program Aksi untuk Mencegah, Memerangi, dan Memberantas Perdagangan Ilegal Senjata Kecil dan Senjata Ringan Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons</i>)
UNRCPD	Pusat Regional untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata di Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific</i>)
UNROCA	Daftar Senjata Konvensional Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations Register of Conventional Arms</i>)
UNSCAR	Fasilitas Perwalian yang Mendukung Kerjasama dalam Regulasi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation</i>)
VTF	Dana Perwalian Sukarela (<i>Voluntary Trust Fund</i>)

Ringkasan eksekutif

Kawasan Indo-Pasifik, dengan wilayahnya yang luas dan keberagamannya, terpapar oleh berbagai tantangan keamanan internasional. Kawasan ini juga memiliki keterlibatan yang terbatas dalam Traktat Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty/ATT*). Laporan ini akan menyajikan berbagai karakteristik khas dari permasalahan yang pelik ini.

Laporan ini menelaah berbagai realitas dalam perdagangan senjata konvensional –baik secara legal maupun ilegal –di kawasan Indo-Pasifik melalui berbagai cakupan metodologi penelitian, di antaranya wawancara informan kunci (*key informant interview/KII*) dengan para pembuat kebijakan dan praktisi di berbagai negara dan organisasi di kawasan tersebut. Melalui telaah tersebut, laporan ini menemukan sikap terhadap ATT yang beragam dan mengidentifikasi berbagai tantangan utama yang menghambat universalisasi maupun kepatuhan terhadap Traktat tersebut di kawasan Indo-Pasifik. Laporan ini diakhiri dengan serangkaian titik masuk dan peluang utama untuk mengubah dinamika keterlibatan dalam ATT di kawasan tersebut, yang dikemas sebagai bahan pertimbangan bagi para aktor dan pemangku kebijakan yang bekerja dalam urusan universalisasi dan implementasi ATT.

Laporan ini juga mengidentifikasi berbagai kemungkinan titik masuk dan peluang peningkatan universalisasi sebagai pertimbangan melakukan tindakan, yaitu: menargetkan negara-negara penanda tangan dan negara-negara yang menunjukkan keinginan untuk bergabung; memperdalam pemahaman terhadap berbagai tantangan keamanan negara; fokus pada dimensi-dimensi perdagangan senjata yang spesifik di kawasan tersebut, seperti aspek maritim dan perantara; membangun kesepakatan nasional atas ATT melalui proses antarlembaga; mendukung pertukaran pengalaman antara negara pihak dan negara yang skeptis; dan menguatkan proses subkawasan guna mengatasi keraguan maupun ketakutan negara.

Berbagai kemungkinan titik masuk dan peluang guna meningkatkan kepatuhan mencakup: upaya seksama untuk mengatasi tantangan implementasi dan kepatuhan yang dihadapi oleh negara; mendukung pembangunan proses antarlembaga yang berkelanjutan guna mendukung implementasi; menargetkan Dana Perwalian Sukarela (*Voluntary Trust Fund/VTF*) dan pendanaan lainnya guna memperkuat kapasitas sektor-sektor utama nasional dalam pembuatan kebijakan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait transfer senjata; membangun kerja sama dengan aneka pemangku kebijakan, termasuk institusi penelitian dan industri; dan mendanai serta mendorong keterlibatan dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk yang bekerja di isu pengarusutamaan gender.

Temuan utama

- Hanya 11 negara Indo-Pasifik yang merupakan negara pihak ATT, termasuk negara yang mendukung adopsi Traktat tersebut dan meratifikasinya setelah ia resmi berlaku, dan beberapa yang baru saja menjadi negara pihak, seperti Tiongkok. Selebihnya, terdapat sembilan negara di kawasan tersebut yang telah menandatangani traktat, tetapi belum meratifikasinya.
- Realitas perdagangan senjata di kawasan Indo-Pasifik sangat bervariasi. Sebagian negara, termasuk negara pihak ATT, merupakan produsen dan eksportir dunia utama senjata konvensional, dan lainnya merupakan importir atau terlibat perdagangan senjata dalam jumlah yang sangat kecil.
- Perdagangan senjata api ilegal, meskipun terbatas, dapat mengganggu stabilitas keamanan, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan.
- Dengan sedikit pengecualian, Oseania menunjukkan tingkat kekerasan bersenjata yang rendah dan keterlibatan perdagangan senjata yang sangat terbatas. Namun, keterbatasan kapasitas serta persepsi terhadap ancaman yang lebih rendah telah memengaruhi tingkat keterlibatan dalam ATT.
- Hanya ada satu negara yang tergabung dalam ATT (Filipina) di Asia Tenggara, kawasan yang memiliki nilai geopolitik dan strategis yang penting. Meskipun Asia Tenggara mewadahi berbagai inisiatif pengendalian senjata, kepemimpinan regional yang masih terbatas, serta kurangnya pemahaman mengenai keuntungan keanggotaan ATT menjadi tantangan dalam universalisasi Traktat tersebut.
- Di Asia Timur, tiga negara anggota (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan) merupakan produsen dan eksportir senjata utama yang turut aktif di dalam kerangka kerja ATT; Korea Utara tetap menjadi pemain utama dalam perdagangan ilegal senjata, terlepas sanksi dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
- Dengan hanya ada satu negara anggota di subkawasan Asia Selatan (Maladewa) dan berbagai jumlah masalah keamanan, ada sedikit momentum menuju keterlibatan yang lebih besar bersama ATT. Kapasitas yang terbatas menjadi salah satu faktor.
- Tantangan-tantangan utama menuju keterlibatan yang lebih besar bersama ATT berikut kepatuhan terhadap ketentuannya mencakup: keraguan dan keengganan domestik; terbatasnya pengetahuan mengenai keuntungan ATT; sedikitnya momentum yang dapat mendorong ratifikasi dan akses; hambatan birokratis, keuangan dan kapasitas; persaingan prioritas nasional; dan masalah keamanan kawasan serta pengaruh politik.

Pengamatan kebijakan

Bagian ini menguraikan berbagai potensi titik masuk dan peluang untuk mengatasi tantangan dalam universalisasi dan kepatuhan terhadap ATT di kawasan Indo-Pasifik.¹

Universalisasi

1. Sejalan dengan strategi Kelompok Kerja bidang Universalisasi Traktat (KKUT), aktor yang terlibat dalam upaya universalisasi ATT (seperti KKUT, Sekretariat ATT, lembaga nasional, organisasi kawasan yang aktif, dan OMS) harus memusatkan usaha kepada negara-negara yang telah menunjukkan keinginan untuk bergabung ke dalam Traktat. Usaha-usaha ini meliputi:
 - penilaian terhadap hambatan-hambatan menuju ratifikasi atau akses;
 - dukungan atas penyelenggaraan penilaian mandiri nasional terhadap instrumen hukum nasional dan tingkat kepatuhan negara kepada ATT;
 - analisis kesenjangan di tingkatan nasional;
 - peta jalan nasional atau strategi menuju ratifikasi atau akses ATT;
 - pemutakhiran panduan dan bahan-bahan mengenai ATT;
 - kegiatan untuk menciptakan dan menguatkan momentum; dan
 - pembangunan (khususnya untuk negara pihak eksportir di kawasan tersebut) strategi yang paralel dan tepat sasaran agar dapat melibatkan non-negara pihak.
2. Para donor dan negara pihak, khususnya negara pengeksport, harus mendukung upaya untuk membangun basis bukti yang lebih kuat terkait tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara, dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya.
 - Para donor harus menyediakan pendanaan khusus bagi OMS, lembaga riset, dan penegak hukum nasional guna mengawasi alur senjata ilegal.
 - Negara pihak, utamanya negara pengeksport, harus lebih terlibat di dalam rapat Kelompok Kerja dan forum lainnya guna menunjukkan berbagai manfaat dari keanggotaan ATT kepada negara pengimpor yang masih ragu.
 - Para donor dapat mendukung dan mendanai:
 - upaya menganalisis dan memahami realitas nasional dan subkawasan; dan
 - paket yang disesuaikan dalam aneka bahasa yang relevan dan ditargetkan untuk kementerian pertahanan dan aktor lainnya, yang dapat mencakup berbagai pengalaman dari para kolega militer dan pertahanan dari negara lain.
3. Memperdalam pemahaman tentang dimensi-dimensi yang menjadi ciri perdagangan ilegal di kawasan tersebut, terutama aspek maritim dan perantara.

- Sesi Kelompok Kerja bidang Implementasi Traktat Efektif (KKITE) tentang perantara harus mencari partisipasi dari negara-negara yang masih berada di luar Traktat, serta mencakup kontribusi dari para ahli yang dapat menyumbang gagasan dan mengusulkan solusi efektif yang telah dan dapat diterapkan ke dalam kerangka kerja ATT.
 - Para donor dapat mendukung rancangan dan implementasi kursus-kursus khusus yang dipandu oleh para ahli dari negara yang telah mengembangkan praktik perantara yang baik guna menghasikan peraturan-peraturan terkait perantaraan senjata yang efektif, serta melibatkan para pejabat dan otoritas penegak hukum di tingkat nasional dan subkawasan.
4. Para aktor yang terlibat dalam upaya universalisasi ATT (seperti KKUT, Sekretariat ATT, lembaga nasional, organisasi kawasan yang aktif, dan OMS) harus mempromosikan kerja sama antarlembaga sejak awal pertimbangan nasional ATT melalui proses implementasi Traktat.
- Kegiatan-kegiatan universalisasi harus terus mencakup berbagai rapat dan aktivitas yang menysasar aktor dari negara berbeda.
 - OMS nasional dapat membuat memo yang menekankan berbagai manfaat dari Traktat yang ditujukan kepada tiap-tiap kementerian yang berbeda.
 - Para donor dapat mendukung berbagai kegiatan yang memungkinkan negara membangun sebuah peta jalan bersama menuju Traktat, yang dipimpin oleh sebuah lembaga koordinasi dengan keterlibatan seluruh lembaga nasional dan pemangku kebijakan yang relevan, termasuk OMS.
5. KKITE dan aktor yang menerapkan kegiatan penjangkauan harus terus membagikan pengalaman negara-negara yang menjadi bagian ATT secara penuh guna meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mengatasi tantangan-tantangan terkait universalisasi dan kepatuhan.
- Kegiatan penjangkauan harus mencakup pelajaran atas pengalaman dari berbagai negara dan melibatkan berbagai aktor yang berbeda seperti otoritas pelabuhan dan bea cukai.
 - Pelaksana dapat terus membagikan pengalaman berbagai negara yang telah menerima bantuan selama acara samplingan.
 - Sub-Kelompok Kerja KKITE bidang Pertukaran Praktik Implementasi Nasional harus terus mendorong pertukaran sejenis dan mencari partisipasi dari negara penanda tangan dan non-negara pihak.
 - Sekretariat ATT harus membagikan presentasi berbagai negara di Sub-Kelompok Kerja KKITE bidang Pertukaran Praktik Implementasi Nasional sebelum rapat, dan membuat repositori pengalaman negara di situs web ATT.
6. Pada donor dan aktor yang terlibat dalam upaya universalisasi ATT (seperti KKUT, Sekretariat ATT, lembaga nasional, dan organisasi kawasan yang aktif) harus mendorong proses subkawasan yang ditujukan untuk mengatasi keraguan dan ketakutan negara.

- Para donor harus mendukung dan mempromosikan proses subkawasan, apabila ada, guna meningkatkan momentum menuju ratifikasi dan akses Traktat serta kepatuhan.
- Negara pihak harus memasukkan ATT ke dalam diskusi-diskusi nasional, subkawasan, kawasan, dan internasional mengenai instrument pengendalian senjata lainnya.

Kepatuhan

1. Negara pihak dan para pemangku kebijakan ATT harus memusatkan upaya kepada negara-negara yang menghadapi tantangan dalam mematuhi kewajiban implementasi Traktat.
 - OMS harus terus mengembangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik, seperti lokakarya dan klinik, di samping forum-forum ATT, agar dapat fokus pada cara-cara mengatasi tantangan nasional yang spesifik dalam implementasi, seperti pelaporan dan penegakan sistem pengendalian nasional.
 - Negara harus mengembangkan sebuah peta jalan implementasi guna memudahkan pengukuran seberapa jauh mereka telah mematuhi kewajiban Traktat, serta menyampaikan jenis bantuan yang mungkin dibutuhkan.
 - KKITE harus mempertimbangkan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan ‘unggulan kawasan’ guna mendukung tantangan implementasi di masing-masing pemerintahan.
2. Negara pihak dan para pemangku kebijakan ATT lainnya harus secara khusus fokus pada mekanisme antarlembaga.
 - Negara harus mempromosikan pertukaran informasi yang aktif dan konstan antara lembaga-lembaga yang berbeda di tingkat nasional.
 - Negara pihak dan OMS dapat memusatkan perhatian pada sinergi antara ATT dan instrumen pengendalian senjata lainnya.
 - Organisasi kawasan dapat mendukung implementasi ATT sebagai bagian dari pendekatan kawasan.
 - Donor, OMS, dan aktor pendukung implementasi ATT dapat menghubungkan ATT dengan prioritas negara yang lebih mendesak.
 - Saat Konferensi Negara Pihak (*Conference of State Parties/CSP*), rapat antar-Kelompok Kerja, dan kegiatan penjangkauan, negara dapat membagikan pengalaman guna meningkatkan kerja sama antarlembaga.
 - Negara dapat mengembangkan dan merampingkan berbagai proses pengumpulan dan pertukaran informasi serta melibatkan pemangku kebijakan industri lebih jauh.
 - Negara dapat mengembangkan mekanisme antarlembaga yang permanen di tingkat nasional guna memantau implementasi nasional dan melakukan tindakan untuk berinteraksi dengan titik kontak nasional.

3. Donor harus terus mendukung pengembangan kapasitas di sektor-sektor penting nasional yang bertanggung jawab dalam keputusan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait perdagangan senjata.
 - Donor harus fokus secara khusus pada pengembangan mekanisme berkelanjutan guna mendukung sektor-sektor ini.
 - Donor harus terus menargetkan VTF dan pendanaan lainnya untuk area kepatuhan yang spesifik, seperti dukungan teknis, pembentukan institusi, dan analisis kesenjangan dalam kerangka kerja hukum.
4. Negara, donor, dan pemangku kepentingan ATT lainnya harus mengakui, mendukung, dan mendorong kontribusi dari OMS dan anggota parlemen dalam menghadapi tantangan-tantangan di berbagai aspek keterlibatan negara bersama ATT, termasuk kepatuhan.
 - Donor harus mendanai OMS di kawasan Indo-Pasifik secara teratur agar mereka dapat merancang proyek yang menysar konteks yang spesifik.
 - Pelaksanaan kegiatan penjangkauan harus menyertakan dan melibatkan OMS nasional dan regional guna memastikan keberlanjutan berbagai upaya dan dialog nasional.
 - Donor harus mendukung pendanaan OMS beserta kegiatan advokasi dan pengawasan mereka.
 - OMS dan anggota parlemen harus berkolaborasi guna memastikan dukungan kepada anggota parlemen dalam peran pengawasan dan pemberdayaan mereka.
 - KKITE dan ekportir harus lebih jauh terlibat dalam memastikan bahwa ATT secara efektif mencegah kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak agar mendapatkan dukungan dan penerimaan dari OMS yang bergerak di bidang kesetaraan gender di area universalisasi dan kepatuhan.
5. Negara harus mendorong dan mempertahankan kelompok pemangku kepentingan sipil dan narahubung, termasuk industri.
 - Negara harus memelihara dialog aktif bersama industri dan sektor swasta agar dapat merancang langkah-langkah efektif dan praktik unggulan yang mendukung kepatuhan ATT dan transfer senjata internasional yang bertanggung jawab.
 - Negara dapat terlibat dengan lembaga, *think tank*, dan organisasi penelitian yang bergerak di bidang keamanan, pertahanan, dan pengendalian senjata guna memfasilitasi dialog bersama pemangku kepentingan nasional yang ragu, menerima masukan terkait Traktat, serta memanfaatkan keahlian mereka pada topik-topik terkait implementasi nasional.



Hanya ada 11 negara Indo-Pasifik yang saat ini merupakan negara anggota ATT. Lebih lanjut, terdapat Sembilan negara dari kawasan tersebut yang telah menandatangani Traktat, tapi belum meratifikasinya.”

Pendahuluan

Kawasan Indo-Pasifik yang luas dan beragam menyajikan berbagai tantangan keamanan yang saling terhubung.² Di antaranya termasuk konflik berbasis identitas, potensi ketidakstabilan internal di berbagai negara dalam satu kawasan, aktivitas kejahatan terorganisasi transnasional, dan kebutuhan untuk menegakkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. Aneka tantangan keamanan ini berkombinasi dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, perbedaan kepentingan, dan kompetisi antara pemain global dan regional, termasuk ketegangan antara India dan Pakistan, tumbuhnya ketidakpercayaan di antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan mitra-mitra regional mereka, klaim yang bertentangan atas Laut Tiongkok Selatan, konflik di Myanmar, dan potensi eskalasi permusuhan di Semenanjung Korea. Ketidakamanan kawasan dan gerakan ekstremis lokal dan regional juga dapat menjadi ancaman bagi situasi keamanan yang rapuh.

Kawasan Indo-Pasifik oleh karenanya menjadi kawasan geostrategis yang krusial di dunia bagi dinamika kekuatan besar. Dengan realitas kawasan yang seperti ini, serta banyaknya penyebab potensi ketidakstabilan, produksi dan transfer senjata menjadi semakin penting bagi negara dan perekonomian di kawasan tersebut (Dellerba et al., 2024). Kawasan ini menampung produsen dan eksportir utama senjata konvensional seperti Tiongkok, yang secara konsisten berada di antara lima eksportir senjata global teratas menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dan, di dalam kawasan tersebut, mengekspor sebagian besar ke Pakistan, Bangladesh, dan Thailand (Wezeman, P.D. et al., 2024). Lebih jauh, data SIPRI menunjukkan bahwa 'Asia dan Oseania' telah menjadi wilayah pengimpor senjata utama dunia selama beberapa dekade.³ Sebanyak 37 persen dari volume impor senjata global masuk ke dalam kawasan tersebut pada rentang tahun 2019 dan 2023, dan enam dari sepuluh importir senjata terbesar di dunia berlokasi di kawasan Indo-Pasifik: India, Pakistan, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Tiongkok (Wezeman, P.D. et al., 2024). Indo-Pasifik juga penting bagi aspek lain terkait perdagangan senjata internasional, mengingat kawasan ini merupakan pusat transit dan pemindahan muatan antarkapal, serta perantara.

Berangkat dari latar belakang tersebut, hanya 11 negara Indo-Pasifik yang saat ini menjadi negara pihak ATT.⁴ Selain itu, sembilan negara di kawasan tersebut telah menandatangani Traktat, tetapi belum meratifikasinya (lihat Peta 1).⁵ ATT diadopsi pada tahun 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. Traktat ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum dan bertujuan untuk 'menetapkan standar internasional bersama setinggi mungkin guna mengatur atau meningkatkan regulasi perdagangan internasional senjata konvensional dan mencegah serta memberantas perdagangan ilegal senjata konvensional dan mencegah pengalihannya' (UNGA, 2013, pasal 1). Traktat ini berupaya mengatur berbagai kegiatan terkait perdagangan senjata internasional, termasuk ekspor, impor, transit, pemindahan muatan antarkapal, dan perantara—disebut sebagai 'transfer' (pasal 2(2)), yang juga relevan dengan kawasan Indo-Pasifik.

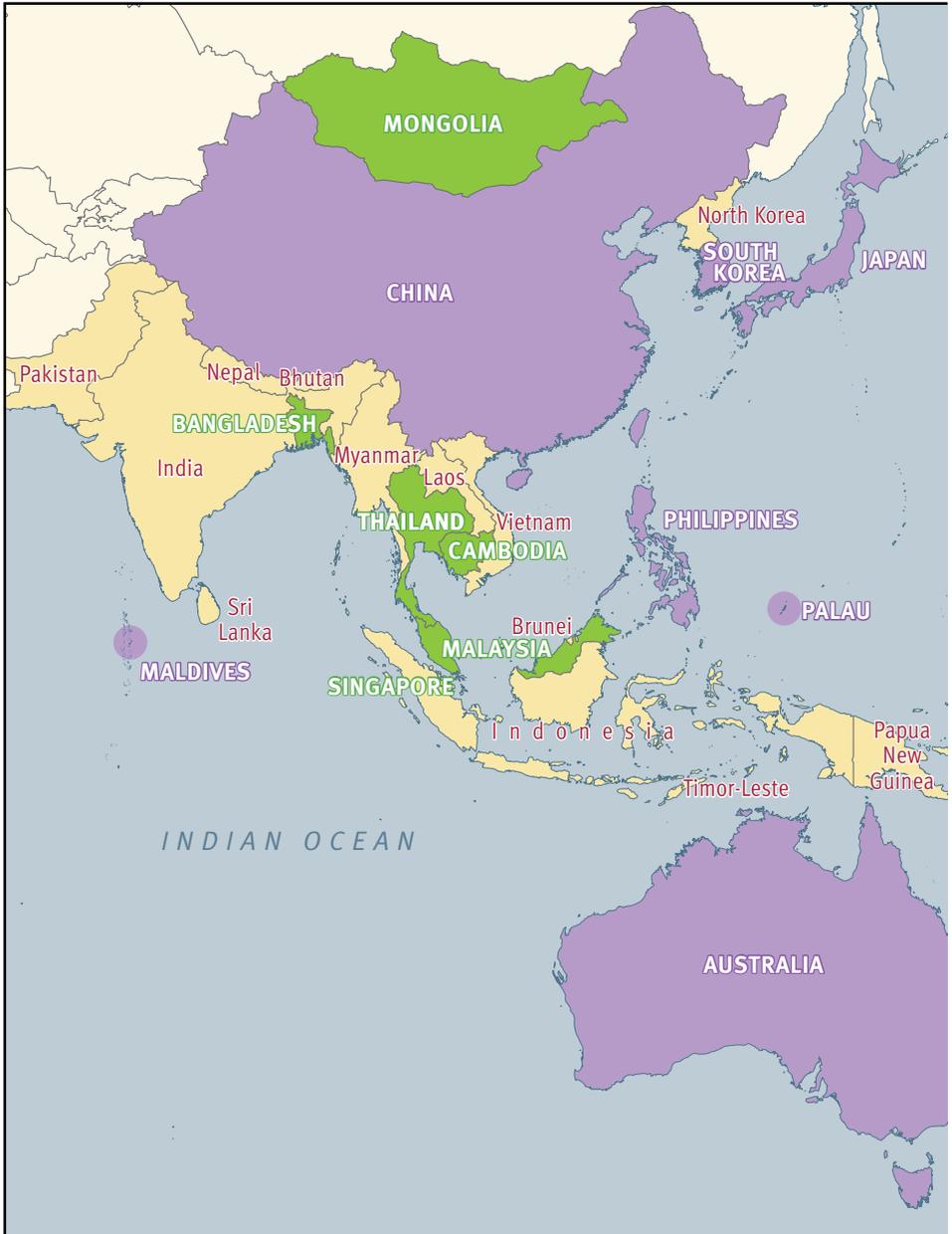
Terdapat perbedaan sikap terhadap ATT di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Australia dan Jepang adalah dua dari tujuh negara yang mensponsori resolusi Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly/UNGA*) pertama tentang traktat perdagangan senjata pada tahun

2006 (UNGA, 2006; Woolcott, 2014). Kawasan ini juga mencakup negara-negara seperti Selandia Baru dan Samoa, yang menjadi negara pihak segera setelah ATT mulai berlaku pada bulan Desember 2014, serta beberapa negara pihak terbaru Traktat tersebut seperti Filipina (2022), Niue (2020), Tiongkok (2020), Maladewa (2019), dan Palau (2019). Beberapa negara di kawasan tersebut seperti Bangladesh, Kamboja, Kiribati, Malaysia, Mongolia, Nauru, Singapura, Thailand, dan Vanuatu telah menunjukkan komitmen mereka terhadap ATT dengan menandatangani, tetapi belum meratifikasinya (ATT Secretariat, 2024c). Negara-negara lain tetap berada di luar ATT dan beberapa belum menunjukkan minat untuk bergabung; akibatnya, Indo-Pasifik tetap menjadi salah satu kawasan dengan tingkat penerimaan dan keanggotaan Traktat yang terendah di dunia.

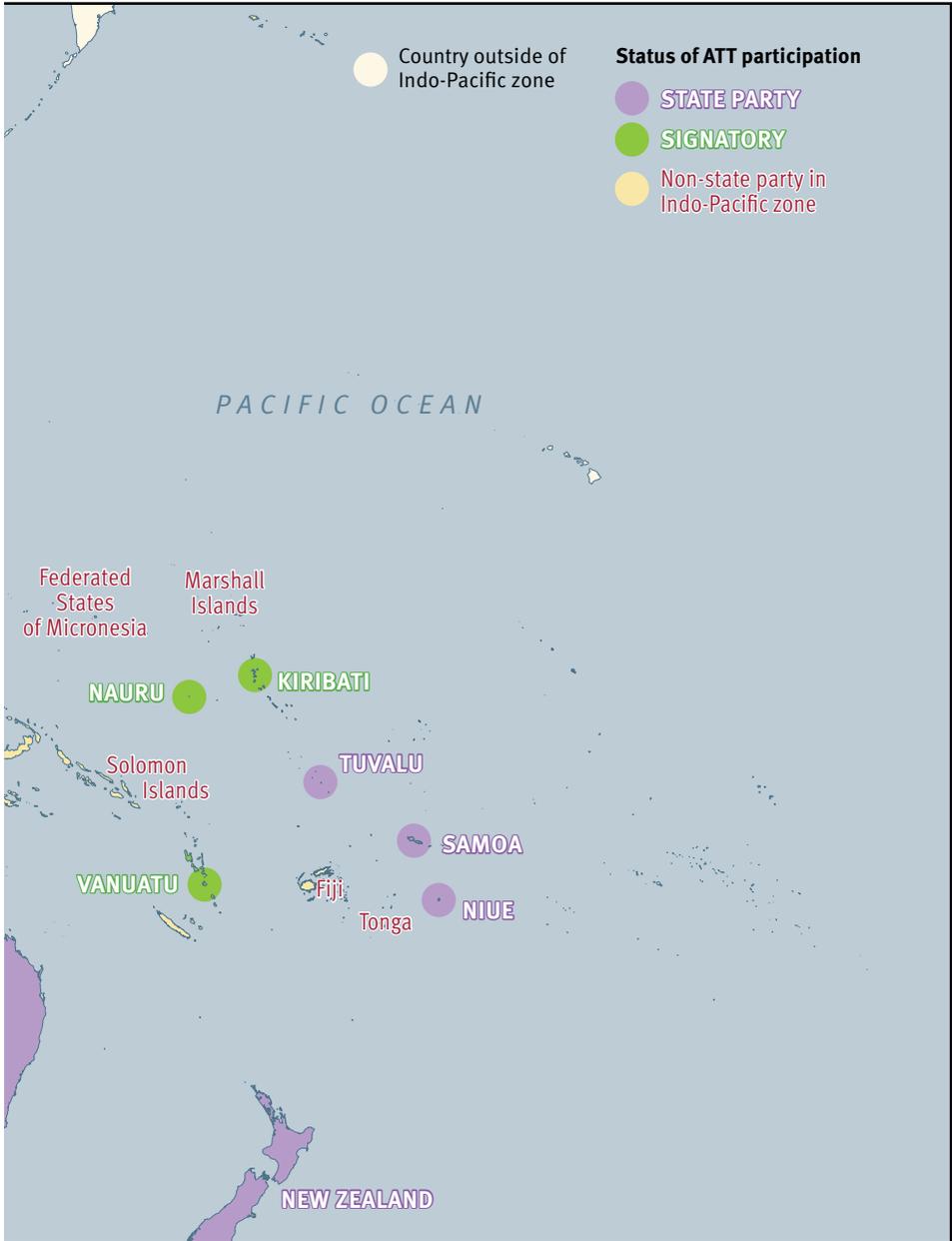
Berbagai aktor, termasuk Sekretariat ATT, para ketua KKUT, organisasi kawasan seperti Pusat Regional untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata di Asia dan Pasifik PBB (UNRCPD), Kantor Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Pengendalian Ekspor (BAFA), dan Expertise France, dan OMS, telah melakukan serangkaian bantuan dan kegiatan penjangkauan serta upaya mempromosikan dan meningkatkan universalisasi, implementasi, dan kepatuhan⁶ terhadap Traktat di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun sulit untuk secara tegas menetapkan hubungan sebab akibat antara kegiatan-kegiatan ini dan ratifikasi atau akses setelahnya, dan meskipun beberapa negara Indo-Pasifik baru-baru ini bergabung bersama Traktat, keanggotaan ATT di kawasan tersebut hanya mengalami sedikit perubahan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hambatan utama terhadap universalisasi dan kepatuhan Traktat di kawasan Indo-Pasifik dapat memberikan landasan yang lebih baik guna mengidentifikasi dan merancang strategi keterlibatan di masa depan dengan negara-negara di kawasan tersebut. Pemahaman ini bahkan lebih tepat waktu karena, pada saat penulisan ini, KKUT tengah mendiskusikan rencana kerja baru guna meningkatkan upaya universalisasi ATT (ATT Secretariat, 2024g).

Laporan ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor di balik rendahnya penerimaan ATT di kawasan Indo-Pasifik; dengan tujuan mengabarkan berbagai upaya negara dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan Indo-Pasifik agar dapat bergerak menuju keanggotaan Traktat serta memperkuat proses implementasi nasional. Laporan ini diawali dengan deskripsi metodologi sebelum memaparkan tinjauan umum tentang perdagangan senjata konvensional yang legal dan ilegal di kawasan Indo-Pasifik. Lalu, laporan ini mengeksplorasi sikap utama terhadap ATT di kawasan tersebut dengan membaginya menjadi empat subkawasan: Oseania, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Selanjutnya, laporan ini merangkum tantangan dan isu utama terkait universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan Indo-Pasifik. Laporan ini mengidentifikasi kemungkinan titik masuk dan peluang bagi berbagai pemangku kepentingan ATT guna mendorong universalisasi dan implementasi ATT, serta meningkatkan keselarasan mengenai kegunaan ATT sebagai wahana pengendalian senjata di kawasan tersebut. Di antara titik masuk tersebut, laporan ini juga menyelidiki peran yang dapat dimainkan oleh OMS, termasuk yang bergerak di bidang kesetaraan gender,⁷ dalam memajukan universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan tersebut. Kemudian, bagian terakhir ditutup dengan kesimpulan utama Laporan. ●

Peta 1 Keanggotaan ATT di kawasan Indo-Pasifik



Sumber: Sekretariat ATT (2024c)





Para penulis
berhubungan dengan perwakilan
pemerintah dan masyarakat sipil
di kawasan tersebut.”

Metodologi

Laporan ini merupakan luaran tertulis utama proyek Small Arms Survey yang berjudul ‘Memahami Tantangan Universalisasi dan Kepatuhan ATT di Kawasan Indo-Pasifik’, yang didanai oleh Pemerintah Kanada. Tulisan ini dilandasi oleh tiga vektor riset utama:

Studi literatur dan aktivitas proyek: Sebagai bagian dari proyek, para penulis dan anggota tim proyek meninjau serangkaian studi dan dokumen terkait universalisasi ATT dan kepatuhan, baik di dalam kawasan Indo-Pasifik maupu sekitarnya. Lebih lanjut, para penulis menjalin hubungan dengan perwakilan pemerintahan dan OMS di kawasan tersebut selama rapat Kelompok Kerja ATT dan pada kesempatan lain. Sebagai contoh, pada Januari 2024, para penulis menghadiri ‘Rapat Persiapan Kawasan untuk Konferensi Tinjauan Keempat tentang Program Aksi Senjata Kecil dan Senjata Ringan – Asia-Pasifik’ di Nepal, di mana mereka berpartisipasi dalam sesi informal bersama perwakilan negara dari kawasan tersebut. Kegiatan ini dan lainnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan bagi universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan Indo-Pasifik.

Informasi sumber terbuka: Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber terbuka, termasuk Daftar Senjata Konvensional PBB (UNROCA), Pangkalan Data Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade), pangkalan data SIPRI, laporan Panel Ahli PBB, dan laporan perdagangan senjata ilegal melengkapi tinjauan pustaka, serta menjadi dasar tinjauan umum Laporan tentang perdagangan legal dan ilegal di kawasan. Para penulis juga memetakan beberapa indikator kunci di kawasan, termasuk:

- keanggotaan pada instrumen pengendalian dan pelucutan senjata, termasuk ATT, di antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik;
- suara di UNGA (2019-23) yang mendukung ATT;
- bantuan dan kegiatan penjangkauan yang dilakukan di dalam kawasan;⁸
- proyek terkait universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan tersebut;⁹
- upaya OMS dalam mendukung universalisasi dan implementasi ATT; dan
- dukungan yang disediakan untuk negara di dalam kawasan melalui Program Pendanaan ATT.

Wawancara: Selain itu, Small Arms Survey menyelenggarakan serangkaian KII bersama 38 orang yang terlibat dalam universalisasi, kepatuhan, dan implementasi ATT.¹⁰ Wawancara bersifat semi-terstruktur, mengingat format ini memungkinkan lebih banyak partisipasi dan fleksibilitas, dan peluang untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul dari percakapan yang lebih mendalam.

Lebih lanjut, Laporan ini diperkaya oleh kontribusi dua mitra penelitian yang berbasis di kawasan Indo-Pasifik: Centre for Armed Violence Reduction (CAVR) dan Nonviolence International Southeast Asia (NISEA). Kedua mitra melakukan KII dan penelitian tambahan yang menghasilkan dua makalah latar belakang yang digunakan dalam penyusunan Laporan ini (CAVR, 2024; NISEA, 2024). Kedua organisasi tersebut memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menangani topik-topik terkait universalisasi dan kepatuhan ATT; pengetahuan

yang luas mengenai undang-undang nasional dan inisiatif pengendalian senjata konvensional nasional dan regional; dan jaringan narahubung pemerintah, pejabat, dan non-pemerintah yang luas di subkawasan masing-masing. Partisipasi mereka dalam studi ini menyoroti pentingnya pengetahuan lokal dan kontekstual yang mendalam dan membantu mengatasi kemungkinan pejabat di kawasan tersebut menjadi ragu-ragu atau enggan membicarakan topik-topik yang berpotensi sensitif dengan para ahli internasional atau eksternal. UNRCPD di Kathmandu, didasari mandatnya bagi seluruh kawasan, dengan luwes memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di kawasan tersebut, sehingga dapat membantu pengumpulan informasi untuk Laporan ini.

Salah satu aspek menantang dari penelitian yang mendasari Laporan ini adalah informasi dan keterlibatan pada aspek-aspek terkait gender dalam ATT. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Small Arms Survey di kawasan tersebut, termasuk sebagai bagian dari proyek 'Perempuan, Perdamaian, and Keamanan' dan survei opini terkait senjata api, menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam survei dan kuesioner. Untuk mengatasi keterlibatan terbatas dengan teknik survei yang lebih umum, penulis mengandalkan wawancara semi-terstruktur, seperti yang disebutkan di atas. Keterlibatan para ahli dan organisasi yang mumpuni, termasuk OMS yang bergerak di bidang kesetaraan gender, dalam wawancara membantu memastikan fokus dan keterlibatan. Penelitian ini selanjutnya didukung oleh pekerjaan yang dilakukan oleh CAVR dan NISEA.¹¹ ●

“Kemampuan produksi, ekspor, dan impor negara di kawasan sangatlah beragam. Di saat yang sama, lanskap perdagangan ilegal sangat dipengaruhi oleh keberagaman kawasan.”

Perdagangan senjata di kawasan Indo-Pasifik

Tujuan ATT adalah untuk 'menetapkan standar internasional umum setinggi mungkin guna mengatur atau meningkatkan regulasi perdagangan internasional tentang senjata konvensional' dan 'mencegah serta memberantas perdagangan ilegal senjata konvensional dan mencegah pengalihannya' (UNGA, 2013, pasal 1). Dengan menggunakan berbagai sumber data, bagian ini bertujuan menggambarkan produksi senjata konvensional di kawasan tersebut dan memberikan tinjauan umum tentang impor dan ekspor negara-negara di kawasan Indo-Pasifik ke negara-negara yang berada di dalam maupun di luar kawasan tersebut. Bagian ini diawali dengan mengkaji perdagangan legal dengan fokus pada produksi, ekspor, dan impor. Setelahnya akan beralih ke perdagangan ilegal dengan fokus pada aliran gelap dan aktor bersenjata di kawasan tersebut, embargo senjata, dan manufaktur kerajinan. Pertimbangan strategis, realitas ekonomi perdagangan senjata, dan kemampuan produksi, serta senjata ilegal dan penggunaannya, bisa saja memengaruhi sikap negara terhadap ATT, yang akan disajikan secara terperinci di bagian berikutnya.

Dimensi perdagangan senjata di kawasan Indo-Pasifik memiliki banyak sisi. Kawasan ini menjadi pangkalan bagi produsen dan eksportir senjata—termasuk dua eksportir terbesar dan negara-negara pihak ATT, Tiongkok dan Korea Selatan—beberapa negara pengimpor terbesar seperti India, serta pusat transit dan pemindahan muatan antarkapal, seperti Singapura (PSA Singapura, t.t.) dan Hong Kong (HKMH, t.t.). Kawasan ini juga menjadi pangkalan bagi 14 dari 20 pelabuhan peti kemas terbesar di dunia—dengan tujuh dari 10 pelabuhan utama berlokasi di Tiongkok (CERL, 2023)—serta sejumlah negara Kepulauan Pasifik. Dengan demikian, aspek-aspek utama transfer senjata yang diatur oleh ATT, seperti ekspor, impor, transit, pemindahan muatan antarkapal, dan perantaraan, relevan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik (UNGA, 2013, pasal 2(2), 5-10). Dalam ranah militer dan keamanan, terdapat tantangan dan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, termasuk konflik, ketegangan perbatasan, pemberontakan internal, gerakan separatis, dan kehadiran aktor bersenjata non-negara serta kelompok teroris. Ketegangan tersebut tidak hanya dipicu oleh senjata ilegal, tetapi mungkin juga sudah memengaruhi kenaikan pengeluaran militer secara konsisten sejak akhir 1980-an (Tian et al., 2024) posi dan si kawasan tersebut sebagai importir terbesar di dunia.¹²

Perdagangan legal

Perdagangan legal di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan realitas yang beragam. Kemampuan ekspor dan impor negara-negara di kawasan ini sangat bervariasi, mengingat Indo-Pasifik menjadi pangkalan bagi tidak hanya produsen dan eksportir senjata terbesar di dunia, tetapi juga negara dengan produksi, ekspor, atau impor senjata yang sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Di kawasan ini, eksportir senjata konvensional terbesar adalah Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia, diikuti oleh India dan Thailand. Importir senjata konvensional terbesar adalah India dan Pakistan, diikuti oleh Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia. Produksi senjata kecil dan amunisi lebih beragam dengan lebih banyak negara di kawasan ini yang terlibat dalam perdagangan (impor dan ekspor).¹³

Subbagian ini menyajikan data tentang produksi, ekspor, dan impor senjata konvensional di kawasan Indo-Pasifik. Namun, melakukan tinjauan menyeluruh terhadap perdagangan legal di kawasan manapun akan menghadapi sejumlah kesulitan dan keterbatasan metodologis. Data sering kali sulit diakses atau tidak lengkap. Hal ini khususnya berlaku untuk kawasan Indo-Pasifik, yang dicirikan oleh rendahnya jumlah negara pihak ATT dan laporan tahunan publik ATT, serta terbatasnya partisipasi dalam instrumen transparansi seperti UNROCA.

Produksi ditaksir melalui Pangkalan Data Industri Persenjataan SIPRI dan tinjauan pustaka seputar topik tersebut. Impor dan ekspor senjata di kawasan tersebut dikumpulkan melalui empat sumber data yang berbeda, yaitu laporan tahunan ATT, luaran UNROCA, Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI, dan UN Comtrade.¹⁴ Metode ini dilakukan agar memperoleh data mengenai perdagangan di semua kategori senjata konvensional yang dicakup oleh ATT secara lengkap. Namun, penggunaan sumber data yang berbeda menimbulkan tantangan terkait cakupan dan jangkauan yang berbeda.

Laporan tahunan ATT hanya memberikan gambaran terbatas mengenai transfer karena dua alasan: pertama, hanya 11 negara di kawasan tersebut yang menjadi negara pihak ATT; dan kedua, negara pihak ATT dapat memilih untuk tidak membuat laporan tahunan mereka

Tabel 1 Penyerahan laporan tahunan oleh negara pihak ATT di kawasan Indo-Pasifik (mulai 31 Juli 2024)

Negara pihak	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Australia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filipina							✓	✓	✓
Jepang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Korea Selatan					✓	✓	✓	✓	★
Maladewa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niue							★	★	★
Palau						✓	✓	✓	★
Samoa									★
Selandia Baru	✓	✓	✓	✓	★	★	★	★	★
Tiongkok				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tuvalu		★	✓	✓	★	★	★	★	★

Catatan: Entri yang ditandai merah merujuk kepada laporan tahunan yang tidak tersedia secara publik. Entri yang ditandai hijau merujuk kepada laporan tahunan yang diserahkan, tetapi tidak disyaratkan.

Sumber: Sekretariat ATT (n.d.)

tersedia bagi publik (lihat Tabel 1). Sembilan dari 11 negara pihak ATT dari kawasan tersebut (Australia, Tiongkok, Jepang, Maladewa, Selandia Baru, Palau, Samoa, Korea Selatan, dan Tuvalu) menyerahkan laporan tahunan dalam periode 2017–23. Semua laporan tahunan dari Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan, serta beberapa laporan dari Palau, Samoa, dan Tuvalu, tersedia untuk publik. Laporan tahunan Tiongkok dan sebagian besar laporan tahunan Maladewa diserahkan dengan akses terbatas.

UNROCA mencakup semua kategori senjata konvensional ATT.¹⁵ Selama tahun 2017–23, hanya 11 negara dari kawasan tersebut yang telah menyerahkan laporan terkait senjata konvensional (tidak termasuk senjata kecil dan senjata ringan) kepada UNROCA.¹⁶ Hal ini sesuai dengan penurunan umum dalam penyerahan kepada UNROCA (Holtom, Mensah, dan Nicolin, 2022). Penting untuk dicatat bahwa UNROCA mencakup laporan yang diserahkan oleh eksportir dan importir, sehingga data tambahan, dalam beberapa kasus, dapat diperoleh dengan melihat laporan mitra dagang. Namun, karena negara-negara melaporkan impor dan ekspor mereka ke UNROCA secara mandiri, maka data tersebut secara tidak proporsional mewakili negara-negara dengan praktik pelaporan yang lebih transparan dan teratur (baik milik mereka sendiri maupun milik mitra dagang mereka).

Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI berasal dari sumber terbuka dan mencakup ekspor dan impor 'senjata utama', termasuk berbagai kategori senjata konvensional. Namun, pangkalan data ini tidak mencakup senjata kecil dan senjata ringan, kecuali sistem pertahanan udara portabel (MANPADS) dan rudal antitank terpandu.¹⁷

UN Comtrade mengandalkan mekanisme pelaporan mandiri oleh bea cukai berdasarkan klasifikasi dalam kode Sistem Terharmonisasi (*Harmonized System/HS*).¹⁸ Namun, kategori HS untuk senjata konvensional UN Comtrade tidak sesuai dengan kategori senjata konvensional yang diatur oleh ATT, kecuali untuk senjata kecil (Jenzen-Jones dan Schroeder, 2018). Oleh karena itu, dalam Laporan ini, UN Comtrade hanya digunakan untuk mengukur perdagangan senjata kecil. Selain itu, meskipun hanya mengandalkan kode HS senjata kecil, senjata ringan, dan amunisi, tetap ada potensi kesalahan yang signifikan akibat kesalahan klasifikasi produk oleh otoritas bea cukai, ketidaksesuaian antara pelaporan dari eksportir dan importir, dan kenyataan bahwa beberapa kategori HS merupakan kode '*catch all*' yang mencakup beragam produk (Jenzen-Jones dan Schroeder, 2018).

Akibatnya, angka dalam kumpulan data yang berbeda sering kali tidak cocok; sehingga, tidak memungkinkan dilakukan perbandingan silang data ekspor dan impor di antara pangkalan data yang berbeda. Meskipun demikian, data yang disajikan dapat membantu memahami dan menilai tren ekspor dan impor secara umum di kawasan Indo-Pasifik, serta dapat digunakan untuk menetapkan gambaran umum perdagangan senjata legal di kawasan tersebut.

Produksi

Kawasan Indo-Pasifik menjadi pangkalan bagi sejumlah produsen senjata konvensional terbesar. Meskipun sebagian besar negara di Indo-Pasifik masih bergantung pada impor

senjata (lihat subbagian tentang impor), ada keinginan kuat di antara sejumlah negara untuk meningkatkan produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian, mengingat ketidakstabilan lingkungan keamanan di kawasan tersebut (Béraud-Sudreau et al., 2022).

Produksi senjata konvensional

Pada tahun 2022, 22 dari 100 perusahaan produksi senjata dan militer teratas berpusat di Asia dan Oseania (Liang et al., 2023)—dengan delapan di Tiongkok daratan, empat di Jepang, empat di Korea Selatan, dan tiga di India, dan masing-masing satu di Australia, Singapura, dan Taiwan, Tiongkok.¹⁹ Secara khusus, dari delapan perusahaan di Tiongkok daratan, tiga (Norinco, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), dan China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)) termasuk dalam sepuluh perusahaan produksi senjata dan layanan militer teratas, di mana pendapatan gabungan mereka mewakili 18 persen dari total pendapatan 100 perusahaan teratas secara global. Total pendapatan dari 22 perusahaan dari Asia dan Oseania diperkirakan berjumlah USD 134 miliar, meningkat 3,1 persen dari tahun 2021. Sebagai perbandingan, 26 perusahaan produksi senjata teratas di Eropa mengalami peningkatan hanya 0,9 persen dengan total pendapatan sebesar USD 121 miliar. Tahun 2022 menandai tahun kedua berturut-turut ketika pendapatan perusahaan-perusahaan penghasil senjata di Asia dan Oseania melampaui pendapatan Eropa (Liang et al., 2023).

Dalam tinjauannya mengenai kemampuan produksi di 12 negara dan perekonomian di kawasan Indo-Pasifik, SIPRI menyimpulkan bahwa negara-negara dan perekonomian dalam kawasan tersebut berada pada berbagai tahap kemandirian (Béraud-Sudreau et al., 2022).²⁰ Negara-negara Asia Timur, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan lebih mandiri daripada negara-negara di Asia Tenggara, dengan Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang mampu 'memproduksi sistem persenjataan yang kompleks di semua sektor' (h. 43). Negara-negara lain, seperti Australia dan Singapura, telah mengembangkan produksi tingkat lanjut di sektor-sektor 'khas (*niche*)' yang berbeda. Studi tersebut juga mencatat bahwa India dan Pakistan memiliki 'industri persenjataan yang besar dan berbasis luas', sementara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam memusatkan perhatian pada solusi 'berteknologi rendah', termasuk pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan sistem asing (hh. 43, 46). Studi tersebut menawarkan bukti lebih lanjut tentang berbagai kemampuan produksi di seluruh kawasan.

Produksi senjata kecil

Kawasan Indo-Pasifik juga menjadi tempat bagi banyak perusahaan yang memproduksi senjata kecil. Meskipun data pasti mengenai produksi senjata kecil sering kali sulit diperoleh, literatur dan wawancara ahli yang dilakukan dalam kerangka Laporan ini menunjukkan bahwa senjata kecil diproduksi di seluruh kawasan.²¹

Produksi senjata kecil terjadi di beberapa negara dan perekonomian di kawasan Indo-Pasifik—termasuk Australia; Tiongkok; India; Indonesia; Jepang; Malaysia; Myanmar; Pakistan; Selandia Baru; Korea Utara; Filipina; Singapura; Korea Selatan; Taiwan,

Tiongkok; Thailand; dan Vietnam.²² Beberapa negara, seperti Tiongkok, merupakan produsen utama senjata kecil dan amunisi, serta mengekspornya di tingkat global (Chopra, 2020; Mariani, 2021). Negara lain, seperti Filipina, utamanya memproduksi senjata kecil untuk pasar domestik dan sebagian besar mengekspornya ke kawasan Indo-Pasifik. Studi yang dilakukan oleh Small Arms Survey pada tahun 2019 menunjukkan bahwa di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, produksi berpusat pada varian senjata hasil indigenisasi dan produksi berbasis lisensi negara lain (Picard, Holtom, dan Mangan, 2019). Contohnya, pabrik Z111, lokasi produksi utama di Vietnam, memproduksi sebagian besar senjata kecil Uni Soviet/Rusia dan Israel dengan lisensi, termasuk senapan serbu dan runduk, senapan mesin ringan, senapan mesin berat, peluncur granat otomatis, dan pistol genggam (Picard, Holtom, dan Mangan, 2019). Thailand juga memproduksi senapan serbu Tavor-Tar 21 dan senapan mesin ringan Negev dengan lisensi dari Israel (Holtom dan Parker, 2016).

Dilihat dari sejarahnya, senjata kecil diproduksi di Indo-Pasifik dengan lisensi dari negara-negara seperti Belgia, Israel, Norwegia, Rusia, bekas Uni Soviet, atau Amerika Serikat (Picard, Holtom, dan Mangan, 2019; Holtom dan Parker, 2016). Beberapa negara di kawasan tersebut juga memberikan lisensi produksi senjata kecil mereka sendiri ke negara ketiga di kawasan Indo-Pasifik: misalnya, Singapura memberikan lisensi produksi senapan mesin berat CIS 50MG 50 mm (SMB-QCB di Indonesia) ke Indonesia (Stanley-Lockman, 2019); Korea Selatan memberikan lisensi sebagian produksinya ke Filipina (Holtom dan Parker, 2016); dan Tiongkok memberikan lisensi produksi senjata kecil ke berbagai negara di kawasan tersebut (Chopra, 2020; Holtom dan Parker, 2016).

Studi tahun 2019 juga menyoroti tren produksi senjata kecil di 11 negara di Asia Tenggara: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam (Picard, Holtom dan Mangan, 2019). Studi ini membedakan antara fasilitas produksi milik atau yang dikendalikan oleh negara dan produsen swasta. Pada saat itu, sebagian besar produksi di Asia Tenggara dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Pengecualian penting adalah Filipina, yang memiliki industri sipil yang cukup besar—dengan 15 produsen swasta berlisensi di negara tersebut, meskipun sebagian besar adalah subkontraktor untuk perusahaan lokal yang lebih besar. Produk yang paling sering diproduksi adalah pistol dan amunisi. Beberapa dari produsen ini juga mengekspor produksinya, dan mungkin menjelaskan posisi Filipina saat ini sebagai salah satu eksportir senjata kecil teratas di kawasan tersebut. Dalam skala yang lebih kecil, beberapa produsen swasta juga telah didirikan di Indonesia dan Malaysia.

Selain perusahaan-perusahaan besar, Indo-Pasifik juga menjadi pangkalan bagi banyak produsen senjata kecil berskala rendah. Pemetaan terperinci produsen senjata kecil di kawasan ini akan menjadi tugas yang sangat besar dan sulit: negara seperti Pakistan, misalnya, memiliki kapasitas produksi senjata kecil milik negara yang besar (Pakistan Ordnance Factories) (Pakistan, t.t.), serta serangkaian lokakarya kecil, seperti yang akan ditunjukkan pada subbagian mengenai produksi kerajinan di bawah ini (Islam dan Shah, 2019).

Ekspor

Subbagian ini menyajikan data tentang ekspor senjata konvensional di kawasan Indo-Pasifik pada periode 2017-23²³ berdasarkan unit. Tabel 2 menyediakan gambaran umum mengenai sepuluh eksportir utama senjata konvensional serta senjata kecil dan senjata ringan, yang diurutkan berdasarkan sumber.

Tabel 2 Eksportir utama senjata konvensional di kawasan, diurutkan berdasarkan sumber

Ekspor senjata konvensional (di luar senjata kecil dan ringan)	UNROCA	SIPRI	Ekspor senjata kecil dan ringan	UNROCA	UN Comtrade (dilaporkan oleh eksportir)	UN Comtrade (dilaporkan oleh importir)
1	Korea Selatan	Tiongkok	1	Korea Selatan	Filipina	Tiongkok
2	Tiongkok	Korea Selatan	2	Australia	Tiongkok	India
3	Australia	Australia	3	Tiongkok	Jepang	Korea Selatan
4	Malaysia	Pakistan	4	Jepang	India	Jepang
5	India	India	5	Singapura	Australia	Filipina
6	Singapura	Thailand	6	Selandia Baru	Selandia Baru	Australia
7	Thailand	Selandia Baru	7	Pakistan	Korea Selatan	Pakistan
8	Selandia Baru	Singapura	8	Filipina	Thailand	Singapura
9	Data tidak ada	Indonesia	9	Malaysia	Malaysia	Selandia Baru
10	Data tidak ada	Taiwan, Tiongkok	10	Thailand	Pakistan	Laos

Catatan: negara pihak ATT dicetak miring; negara penanda tangan ATT digarisbawahi. Sejalan dengan tujuan SIPRI, data untuk Taiwan, Tiongkok ditulis secara terpisah dari data untuk Tiongkok,

Sumber: SIPRI (n.d.c) ; UN Comtrade (n.d.) ; UNROCA (n.d.b)

Laporan tahunan ATT (senjata konvensional)

Data yang tersedia melalui laporan tahunan ATT masih sangat terbatas karena jumlah negara pihak di kawasan tersebut yang rendah. Australia melaporkan telah mengekspor 848 unit senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan, dan 26.262 unit senjata kecil dari tahun 2017 hingga 2023. Jepang mengekspor 17 senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan, dan 760.650 unit senjata kecil, sementara Korea Selatan mengekspor 584 unit senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan, dan 25.206 unit senjata kecil dalam periode waktu yang sama. Selandia Baru melaporkan telah mengekspor 13 unit senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan dan 3.259 unit senjata kecil. Negara pihak lainnya di kawasan tersebut tidak melaporkan ekspor atau tidak membuat laporan mereka untuk publik.

UNROCA (senjata konvensional)²⁴

Data dari UNROCA, yang didasarkan pada laporan beberapa negara Indo-Pasifik yang secara rutin melapor kepada UNROCA serta laporan mitra dagang mereka, hanya tersedia untuk 12 negara.²⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa lima eksportir utama senjata konvensional (tidak termasuk senjata kecil dan senjata ringan) di kawasan tersebut adalah, dalam urutan menurun, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Malaysia, dan India.

Selain itu, negara-negara melaporkan kepada UNROCA untuk transfer senjata kecil.²⁶ Data tentang ekspor senjata kecil tersedia untuk 15 negara di kawasan tersebut.²⁷ Berdasarkan pelaporan UNROCA, lima eksportir utama senjata kecil di kawasan Indo-Pasifik adalah, dalam urutan menurun, Korea Selatan, Australia, Cina, Jepang, dan Singapura.

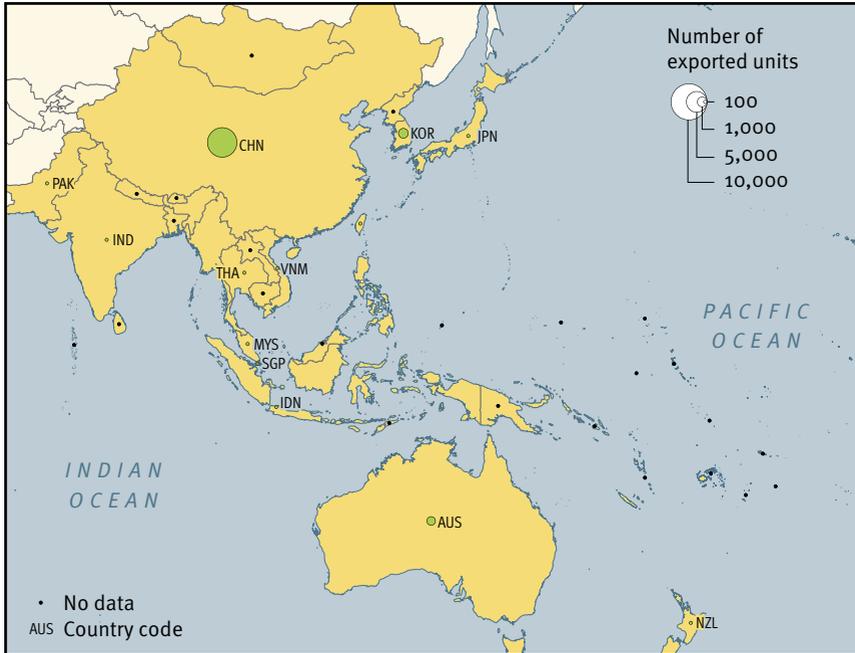
Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI (senjata utama)

Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI menyediakan informasi tentang transfer senjata konvensional utama sejak tahun 1950 dan seterusnya.²⁸ Pangkalan data ini tidak mencakup senjata kecil dan senjata ringan, kecuali MANPADS dan rudal antitank.²⁹ Guna memungkinkan perbandingan antara data tentang pengiriman berbagai senjata dan mengidentifikasi tren umum, SIPRI telah mengembangkan sistem unik untuk mengukur volume transfer internasional senjata konvensional utama menggunakan satuan umum—nilai indikator tren (*trend-indicator value/TIV*) (Holtom, Bromley, dan Simmel, 2012). Data baru dan analisis tren dalam transfer senjata internasional diterbitkan setiap tahun.³⁰

Untuk keperluan Laporan ini, penulis menggunakan Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI guna memperoleh data tentang ekspor senjata utama berdasarkan unit, alih-alih menggunakan TIV. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya perbandingan dengan pangkalan data lain yang digunakan dalam Laporan. Peta 2 menunjukkan eksportir terbesar senjata utama di kawasan tersebut sebagaimana tercermin dalam Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI.

Data tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia—tiga negara pihak ATT—merupakan eksportir senjata utama terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Hasil ini sejalan

Peta 2 Ekspor senjata utama di kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana tercatat dalam Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI



Catatan: negara pihak ATT dicetak miring; negara penanda tangan ATT digarisbawahi. Sejalan dengan tujuan SIPRI, data untuk Taiwan, Tiongkok ditulis secara terpisah dari data untuk Tiongkok.

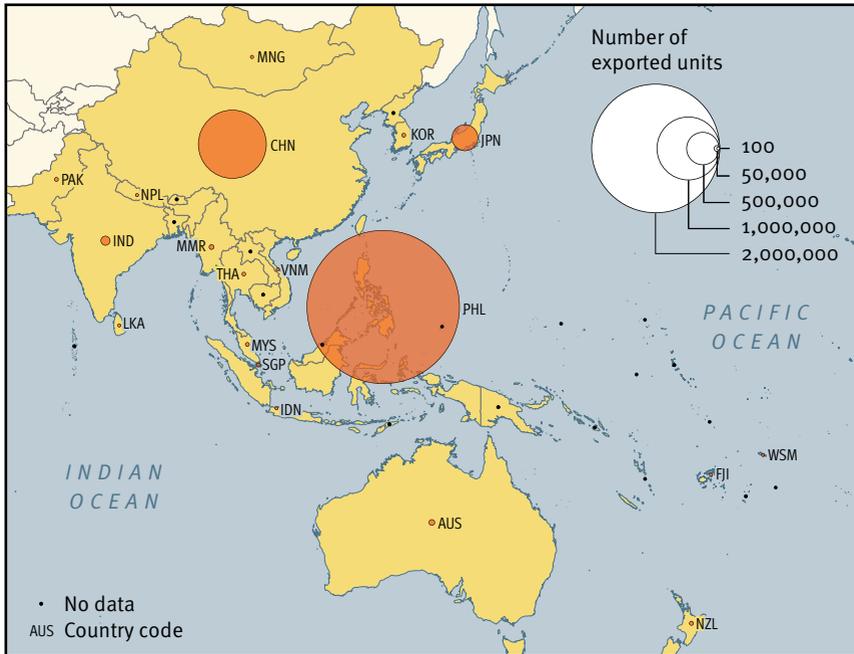
Sumber: SIPRI (n.d.c.)

dengan tren yang ditunjukkan oleh indikator TIV SIPRI. Menurut data TIV, Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia masing-masing berada di peringkat ke-4, ke-10, dan ke-16 di antara eksportir senjata utama terbesar di dunia. Tiongkok menyumbang total 5,8 persen dari seluruh ekspor global dari tahun 2019 hingga 2023—penurunan sebesar 5,3 persen dari periode sebelumnya (2014–18). Perlu dicatat bahwa 85 persen ekspor Tiongkok ditujukan ke negara-negara di Asia dan Oseania. Tiongkok dan Korea Selatan utamanya mengekspor ke negara-negara lain di kawasan tersebut, termasuk Pakistan (61 persen dari total ekspor Tiongkok), Bangladesh, Thailand, Filipina (negara pihak ATT), dan India (Wezeman, P.D. et al., 2024). Data SIPRI konsisten dengan data UNROCA terkait senjata konvensional. Namun, data UNROCA memuat lebih banyak catatan transfer dari Korea Selatan dibandingkan dari Cina.

Pangkalan data UN Comtrade (senjata kecil dan amunisi)

Pangkalan data UN Comtrade telah dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut tentang ekspor senjata kecil.³¹ Untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi, data

Peta 3 Ekspor senjata kecil dan senjata ringan di kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan ke UN Comtrade oleh eksportir



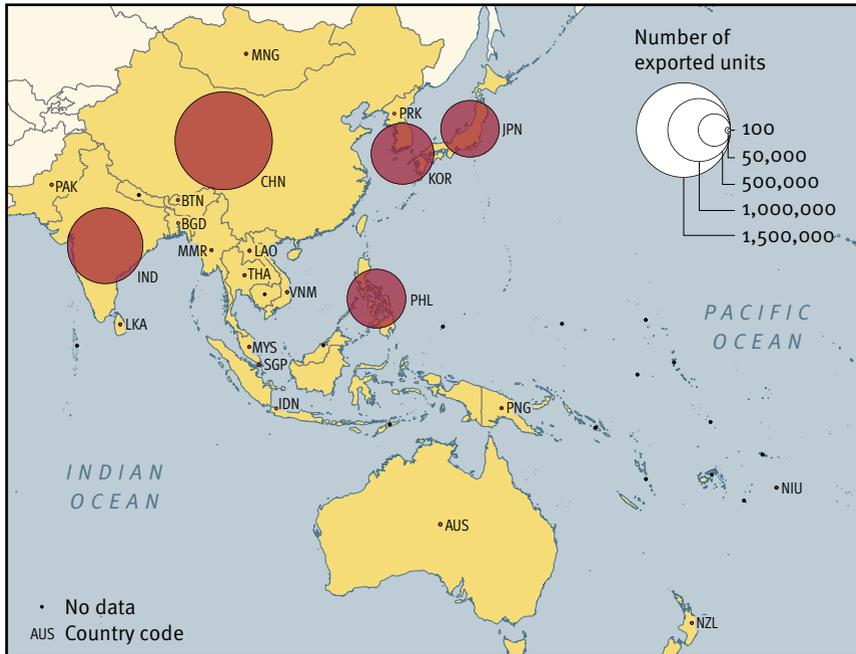
Sumber: UN Comtrade (n.d.)

yang diberikan oleh eksportir diperiksa terhadap data yang disediakan oleh importir. Lalu, data dari eksportir dan importir disajikan secara terpisah dalam Peta 3-4.

Data yang diberikan oleh negara-negara pengekspor menunjukkan bahwa eksportir utama di kawasan tersebut, dalam urutan menurun, adalah Filipina, Tiongkok, Jepang, India, dan Australia—semuanya merupakan negara pihak ATT, kecuali India. Selandia Baru, Korea Selatan, Thailand, dan, pada tingkat yang lebih rendah, Malaysia, Pakistan, Singapura, dan Myanmar juga telah melaporkan jumlah ekspor senjata kecil yang cukup besar. Data dari negara-negara pengimpor tidak terlalu berbeda, yakni Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina—dan, pada tingkat yang lebih rendah, Australia, Pakistan, Singapura, Selandia Baru, dan Laos—sebagai eksportir utama senjata kecil antara tahun 2017 dan 2023.

Data yang dilaporkan oleh eksportir dan importir menunjukkan tumpang tindih yang signifikan, yang mengindikasikan kebenaran tren hasil identifikasi secara keseluruhan. Empat negara muncul sebagai eksportir utama senjata kecil di kedua set data: Tiongkok, India, Jepang, dan Filipina. Aktor lain di kawasan tersebut, yang diidentifikasi dari data eksportir dan importir, adalah Australia, Selandia Baru, Pakistan, dan Korea Selatan. Namun, ada juga perbedaan penting antara data yang diberikan oleh importir maupun yang

Peta 4 Eksport senjata kecil dan senjata ringan di kawasan Indo-Spesifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan ke UN Comtrade oleh importir



Sumber: UN Comtrade (n.d.)

diberikan oleh eksportir, misalnya pada transfer dari negara-negara seperti India, Pakistan, dan Korea Selatan.

Mengukur transfer amunisi internasional merupakan tugas yang cukup sulit. Data amunisi untuk senjata konvensional tidak tersedia, baik di UNROCA maupun SIPRI. Pangkalan data UN Comtrade mencakup data perdagangan amunisi, tetapi kode HS yang jelas hanya tersedia untuk jenis amunisi senjata kecil tertentu—930621 (peluru senapan dan bagian-bagiannya), dan 930630 (jenis peluru lain dan bagian-bagiannya)—yang digunakan dalam kasus ini.³² Data dari negara pengekspor menunjukkan bahwa eksportir amunisi senjata kecil terbesar pada tahun 2017–23 adalah, dalam urutan menurun, Korea Selatan, Filipina, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan India.³³ Data yang dilaporkan oleh importir menunjukkan bahwa Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, Australia, Selandia Baru, dan India merupakan eksportir terbesar. Dengan demikian, negara-negara pihak ATT mewakili sebagian besar eksportir utama amunisi senjata kecil. Data ekspor amunisi senjata kecil—terutama yang dilaporkan oleh eksportir—tampaknya menunjukkan lebih banyak partisipasi dalam ekspor amunisi oleh negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mengingat UN Comtrade merupakan satu-satunya pangkalan data yang mengukur aliran amunisi secara luas di berbagai negara, maka tidak mungkin untuk membuktikan kebenaran data ini.

Impor

Subbagian ini menyajikan data impor senjata konvensional di kawasan Indo-Pasifik untuk periode 2017–23³⁴ berdasarkan unit, menggunakan sumber yang sama seperti bagian sebelumnya tentang ekspor. Tabel 3 memberikan gambaran umum tentang sepuluh importir utama senjata konvensional dan senjata kecil, yang diurutkan menurut sumbernya.

Tabel 3 Importir utama senjata konvensional di kawasan, diurutkan berdasarkan sumber

Impor senjata konvensional (selain senjata kecil dan senjata ringan)	UNROCA	SIPRI	Small arms and light weapons imports	UNROCA	Comtrade (reported by importers)	Comtrade (reported by exporters)
1	India	India	1	Thailand	Filipina	Thailand
2	Pakistan	Pakistan	2	Australia	Thailand	Australia
3	Bangladesh	Korea Selatan	3	Filipina	Korea Selatan	Filipina
4	Australia	Australia	4	Selandia Baru	Australia	Selandia Baru
5	Tiongkok	Singapura	5	Pakistan	Indonesia	Pakistan
6	Korea Selatan	Thailand	6	India	Pakistan	Bangladesh
7	Thailand	Indonesia	7	Malaysia	Selandia Baru	Indonesia
8	Indonesia	Tiongkok	8	Indonesia	Malaysia	Korea Selatan
9	Vietnam	Jepang	9	Nepal	Jepang	India
10	Kamboja	Bangladesh	10	Singapura	India	Singapura

Catatan: negara pihak ATT dicetak miring; negara penanda tangan ATT digarisbawahi

Sumber: SIPRI (n.d.c); UN Comtrade (n.d.); UNROCA (n.d.b)

Laporan tahunan ATT (senjata konvensional)

Terdapat keterbatasan data mengenai impor yang diperoleh melalui laporan tahunan ATT. Jepang melaporkan telah mengimpor 82 senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan, dan 27.564 senjata kecil antara tahun 2017 dan 2023. Dalam periode yang sama, Korea Selatan mengimpor 226 senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan, dan 3.535 senjata kecil, sementara Selandia Baru mengimpor 22 senjata utama dan 95.030 senjata kecil. Australia melaporkan telah mengimpor 838 senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan, dan 527.700 senjata kecil. Samoa dan Tuvalu masing-masing mengajukan laporan nihil, yang mengindikasikan ketiadaan impor maupun ekspor senjata konvensional apa pun. Negara-negara pihak lain dari kawasan tersebut tidak membuat laporan mereka untuk publik.

UNROCA (senjata konvensional)

Data tentang impor senjata konvensional selain senjata kecil dan senjata ringan untuk Negara Federasi Mikronesia, Mongolia, Niue, Timor Leste, Tuvalu, dan Vanuatu, serta tentang impor senjata kecil untuk Nauru, Niue, Korea Utara, dan Tuvalu tidak tersedia. Menurut data dari UNROCA, importir utama senjata konvensional (tidak termasuk senjata kecil dan senjata ringan) adalah, dalam urutan menurun, India, Pakistan, Bangladesh, dan tiga negara pihak ATT: Australia, Tiongkok, dan Korea Selatan.

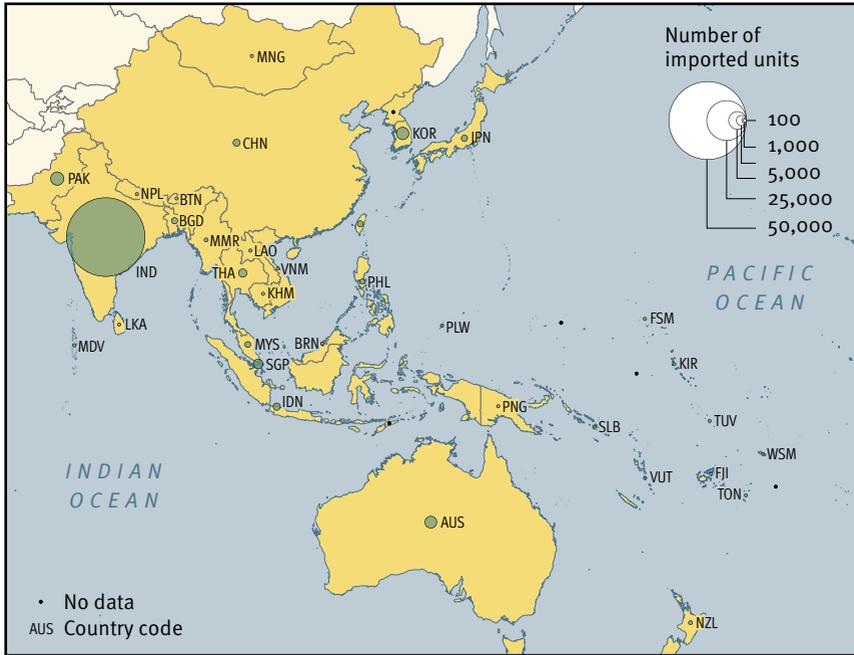
Berdasarkan data UNROCA, gambaran keseluruhan impor senjata kecil tampak berbeda dari impor senjata konvensional. Jumlah importir lebih banyak dan beragam, serta data menunjukkan, dalam urutan menurun, Thailand, Australia, Filipina, Selandia Baru, Pakistan, India, dan Malaysia merupakan importir utama di kawasan tersebut.

Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI (senjata utama)

Menurut Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI, negara pengimpor senjata utama terbesar berdasarkan unit adalah, dalam urutan menurun, India, Pakistan, dan dua negara anggota ATT: Korea Selatan dan Australia. Singapura, Thailand, Indonesia, Cina, dan Jepang menyusul negara-negara tersebut (lihat Peta 5).

Peringkat ini sejalan dengan hasil yang diperoleh dari data impor senjata konvensional (tidak termasuk senjata kecil dan senjata ringan) UNROCA yang kurang komprehensif dan dari TIV SIPRI. Data tentang volume impor senjata yang dipaparkan dalam TIV menunjukkan bahwa kawasan tersebut menampung beberapa importir senjata utama terbesar, dengan enam negara berada di antara sepuluh importir global teratas menurut Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI. India adalah importir senjata utama terbesar di dunia; Pakistan dan Jepang (negara pihak ATT) masing-masing berada di urutan kelima dan keenam; dan tiga negara pihak ATT lainnya—Australia, Korea Selatan, dan Cina—masing-masing berada di urutan kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh berdasarkan peringkat SIPRI. Importir lain seperti Singapura (ke-20, 1,5 persen dari impor global), Filipina (ke-22, 1 persen), dan Indonesia (ke-23, 1 persen) memiliki porsi impor global yang sedikit lebih rendah (Wezeman, P.D. et al., 2024).

Peta 5 Impor senjata utama ke kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana tercatat pada Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI



Catatan : Sejalan dengan tujuan SIPRI, data untuk Taiwan, Tiongkok ditulis secara terpisah dari data untuk Tiongkok.

Sumber: SIPRI (n.d.c)

Asia dan Oseania merupakan kawasan dengan volume impor senjata tertinggi. Antara tahun 2019 dan 2023, kawasan ini menyumbang 37 persen dari impor senjata utama global.³⁵ Namun, kawasan ini masih mengalami penurunan impor sebesar 12 persen dari periode sebelumnya (2014–18). Hal ini disebabkan oleh penurunan impor senjata oleh Asia Tenggara sebesar 43 persen (dengan pengecualian peningkatan impor oleh Filipina dan Singapura—keduanya negara pihak ATT—dan penurunan impor Tiongkok). Penurunan ini sebagian diimbangi dengan peningkatan impor oleh India, Pakistan, Jepang, dan Korea Selatan dibandingkan dengan tahun 2014–18. Sebagian besar impor di Oseania dimotori oleh Australia dan Selandia Baru, yang masing-masing merupakan importir global kedelapan dan ke-39 berdasarkan volume. Pemasok utama kawasan ini adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok (Wezeman, P.D. et al., 2024).

Pangkalan data UN Comtrade (senjata kecil dan amunisi terkait)

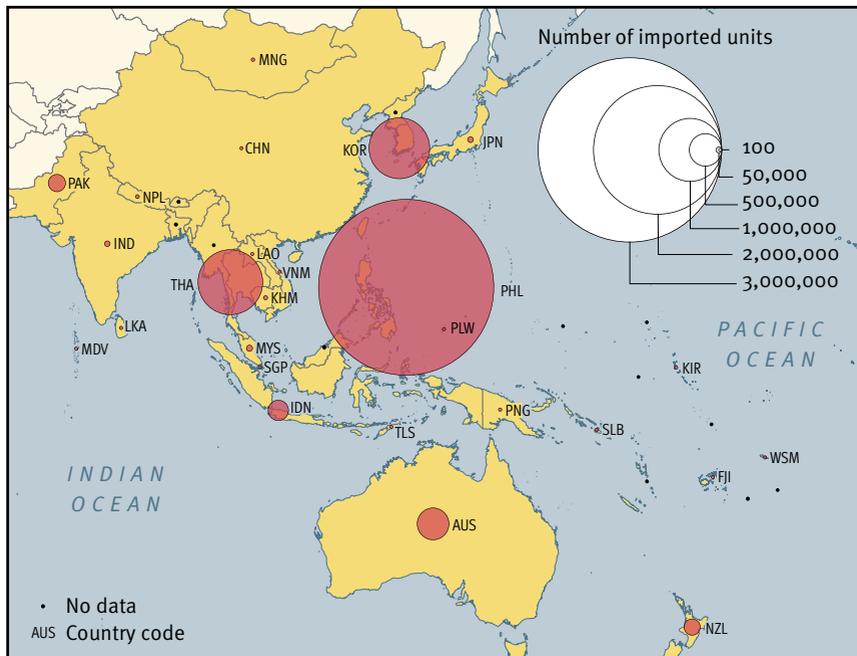
Peta 6-7 menyajikan data mengenai impor senjata kecil yang dilaporkan kepada UN Comtrade oleh para importir.

Laporan importir untuk UN Comtrade memberikan gambaran yang tidak terlalu berbeda dengan data UNROCA tentang senjata kecil. Importir senjata kecil teratas di kawasan tersebut, dalam urutan menurun, adalah Filipina, Thailand, Korea Selatan, Australia, Indonesia, Pakistan, Selandia Baru, dan Malaysia.³⁶ Data yang dilaporkan oleh eksportir menunjukkan pola yang sama dengan yang dilaporkan oleh importir. Para eksportir melaporkan bahwa mitra impor utama mereka adalah Thailand, Australia, Filipina, Selandia Baru, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Korea Selatan, dan India.

Data terkait impor senjata kecil oleh UNROCA dan UN Comtrade menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Filipina, merupakan bagian dari negara pengimpor senjata kecil teratas di kawasan Indo-Pasifik; dan negara-negara lain di subkawasan tersebut, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, juga mengimpor senjata kecil dalam jumlah yang signifikan. Negara-negara besar di Oseania, seperti Australia dan Selandia Baru, juga termasuk di antara negara pengimpor utama. Di Asia Selatan, Pakistan mengimpor senjata kecil dalam jumlah terbesar.

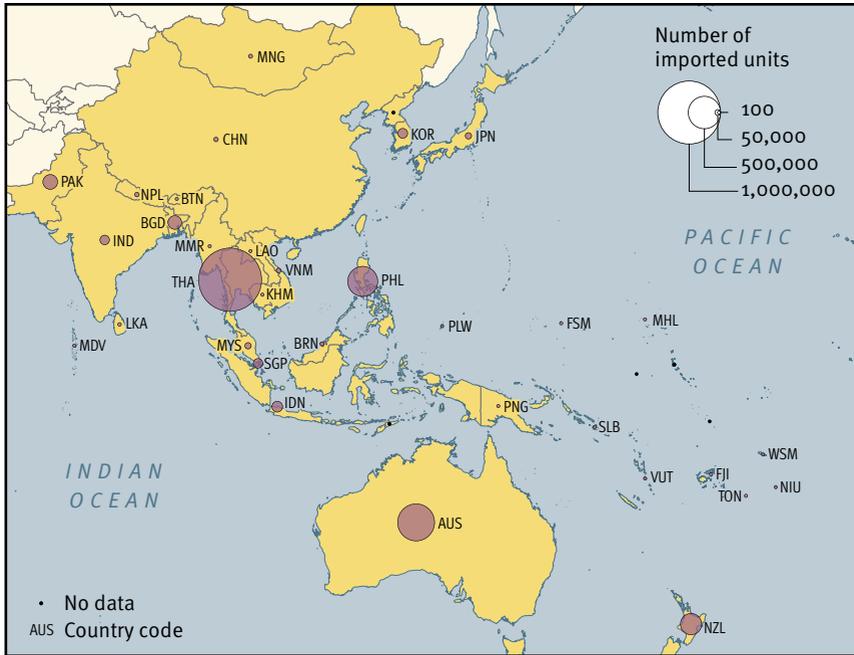
Menurut laporan UN Comtrade oleh negara-negara pengimpor, importir utama amunisi senjata kecil adalah, dalam urutan menurun, Australia, Jepang, Thailand, Selandia Baru,

Peta 6 Impor senjata kecil dan senjata ringan ke kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan oleh para importir kepada UN Comtrade



Sumber: UN Comtrade (n.d.)

Peta 7 Impor senjata kecil dan senjata ringan ke kawasan Indo-Pasifik, 2017-23, sebagaimana dilaporkan oleh para eksportir ke UN Comtrade



Sumber: UN Comtrade (n.d.)

Pakistan, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Laporan eksportir mengungkapkan hasil serupa dengan mitra pengimpor utama adalah Australia, Jepang, Indonesia, Selandia Baru, Filipina, Thailand, Korea Selatan, dan India.

Penting untuk dicatat bahwa faktor penentu posisi suatu negara terhadap ATT mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh volume ekspor dan impor yang besar. Indo-Pasifik juga menjadi pangkalan utama bagi pusat transit dan pemindahan muatan antarkapal, serta perantara.³⁷ Lebih lanjut, dalam beberapa konteks Indo-Pasifik tertentu, sejumlah kecil senjata yang dialihkan, diselewengkan, dan disalahgunakan dapat menimbulkan efek destabilisasi yang signifikan dan dampak serius pada manusia.

Perdagangan ilegal

Salah satu tujuan ATT adalah ‘mencegah dan memberantas perdagangan ilegal senjata konvensional dan mencegah pengalihannya’ (UNGA, 2013, pasal 1). Meskipun cakupan ATT meliputi semua senjata konvensional, sebagian besar senjata yang dialihkan dan menjadi senjata ilegal adalah senjata kecil karena ketersediaannya yang luas, harganya yang

terjangkau, mudah diangkut, dan dapat disembunyikan. Senjata kecil ilegal didefinisikan sebagai ‘senjata yang diproduksi, dipindahkan, disimpan, atau digunakan dengan melanggar hukum nasional atau internasional’ (Schroeder, 2012, hlm. 314)—definisi yang diadopsi dalam Laporan ini.

Pada dasarnya, data terkait senjata ilegal sering kali tidak lengkap dan hanya mencakup sebagian dari total senjata ilegal yang beredar di suatu negara atau kawasan tertentu. Menyediakan laporan lengkap tentang perdagangan senjata ilegal di kawasan Indo-Pasifik berada di luar jangkauan Laporan ini. Di sisi lain, subbagian ini membahas literatur tentang senjata ilegal di kawasan tersebut beserta laporan Panel Ahli PBB³⁸ guna menyajikan informasi umum mengenai fitur utama yang menjadi ciri perdagangan senjata ilegal di kawasan Indo-Pasifik. Laporan ini menawarkan gambaran umum mengenai aliran dan pengguna akhir senjata ilegal di kawasan tersebut, berikut dimensi tertentu, seperti embargo senjata dan produksi kerajinan.

Aliran senjata ilegal dan pengguna akhir

Seperti halnya perdagangan legal, lanskap perdagangan senjata ilegal, khususnya senjata api,³⁹ sangat dipengaruhi oleh keberagaman kawasan tersebut dalam aspek geografi, ekonomi, sejarah, dan perkembangan politik. Bagian kawasan yang paling terdampak oleh penyebaran senjata api ilegal adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan, mengingat sejarah perang dan konflik intra-negara yang telah berlangsung lama (Hiswi, 2018).

Selain narkoba, senjata api merupakan salah satu komoditas perdagangan ilegal paling banyak di kawasan ini (Dahari, Idris, dan Othman, 2019). Menurut Indeks Kejahatan Terorganisir Global (*Global Organized Crime Index*), negara-negara yang paling terdampak oleh perdagangan senjata api⁴⁰ di kawasan ini pada tahun 2023 adalah, dalam urutan menurun, Myanmar, Filipina, Thailand, India, Sri Lanka, Laos, dan Bangladesh (*Global Organized Crime Index*, n.d.b). Namun, Asia Timur dan Oseania juga tidak luput dari dampak tersebut. Asia Timur memiliki relatif sedikit masalah terkait perdagangan senjata api: beberapa perdagangan skala kecil dilaporkan terjadi di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (*Global Organized Crime Index*, n.d.b). Korea Utara merupakan kasus khusus dan akan didiskusikan secara terperinci di bawah ini. Oseania mengalami beberapa perdagangan senjata api, dan paling lengkap didokumentasikan di Papua Nugini (Watson et al., 2023; *Global Organized Crime Index*, n.d.b; lihat Kotak 2). Sejumlah kecil kasus perdagangan manusia juga dilaporkan di Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Samoa, dan Kepulauan Solomon (*Global Organized Crime Index*, n.d.b; Koorey, 2016).

Sumber senjata ilegal

Senjata ilegal di kawasan Indo-Pasifik berasal dari berbagai sumber—salah satunya adalah konflik antarnegara, perang, dan ketegangan politik yang menyebabkan adanya surplus senjata api yang tidak tercatat di banyak negara. Misalnya, diperkirakan 150.000 ton amunisi dan 2 juta senjata api merupakan warisan perang Vietnam (Buscemi, 2019). Konflik di era Perang Dingin, di mana mitra ideologis menerima senjata dan amunisi dari sponsor

mereka, memicu surplus senjata yang besar dan mendorong pembentukan pola perdagangan yang ada saat ini (Buscemi, 2019; Dahari, Idris, dan Othman, 2019). Terakhir, konflik internal di negara-negara seperti Myanmar (Buscemi, 2019), Sri Lanka (Clarke, 2020), Nepal (Subedi dan Bhattarai, 2017), Kepulauan Solomon (Hameiri, 2007), dan Timor-Leste (Smith, 2020) juga memicu pola pengalihan dan perolehan senjata ilegal.

Pengalihan senjata legal ke pasar gelap sering terjadi di negara-negara seperti Papua Nugini (Koorey, 2016), Filipina (Santos dan Santos, 2010), Malaysia, dan Thailand (Dahari, Idris dan Othman, 2019). Hal ini tidak mengejutkan, mengingat besarnya jumlah senjata yang diproduksi atau diperdagangkan di wilayah tersebut.

Berbagai faktor memfasilitasi pengalihan dan aliran senjata api ilegal di kawasan tersebut, termasuk:

- persediaan senjata api milik negara yang tidak dikendalikan dengan baik: misalnya, di Papua Nugini (lihat Kotak 2);⁴¹
- perbatasan yang berpori: misalnya, di wilayah yang terhubung dengan daratan di Asia Tenggara (NISEA, 2024), antara Pakistan dan Afghanistan (Fleischner, 2023) dan antara Nepal dan India (Paudel, 2014);⁴²
- kesulitan dalam mengawasi kondisi geografis: misalnya, di hutan (Bangladesh) atau di sepanjang garis pantai (Indonesia, Malaysia, dan Filipina);
- korupsi: misalnya, petugas menyewakan senjata api mereka kepada pemberontak atau kelompok kriminal pada situasi tertentu (Bangladesh) (Rana dan Nesa, 2018), atau menjual senjata mereka kepada pihak ketiga (Papua Nugini) (Koorey, 2016);
- faktor ekonomi: misalnya, perbedaan harga senjata api antara negara-negara tetangga, tingkat pengangguran, dan kebutuhan akan pendapatan tambahan (di Malaysia, misalnya, senjata api sulit dan mahal diperoleh, sehingga menciptakan insentif untuk penyelundupan dari negara-negara tetangga seperti Thailand (Dahari, Idris, dan Othman, 2019));
- surplus senjata di negara-negara tetangga yang menciptakan insentif dan peluang bagi penyelundup: misalnya, surplus senjata api di India dan Myanmar ditransfer ke negara tetangga, Bangladesh (Rana dan Nesa, 2018), dan surplus di Australia ditransfer ke Papua Nugini (Koorey, 2016); dan
- hubungan dengan kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan narkoba: misalnya, di negara-negara seperti India (Gou, 2013), Malaysia (Dahari, Idris dan Othman, 2019), dan Selandia Baru (Global Organized Crime Index, n.d.a). Di timur laut India, misalnya, kelompok pemberontak yang terlibat dalam perdagangan senjata api dilaporkan mengenakan pajak kepada pengedar narkoba untuk perlindungan bersenjata di rute perdagangan mereka, atau memproduksi narkoba sendiri (Gou, 2013; Hazarika, 2024).

Senjata paling sering diperdagangkan melalui jalur darat atau laut. Beberapa kasus langka perdagangan udara juga dilaporkan (Rana dan Nesa, 2018).⁴³ Indeks Kejahatan Terorganisir Global secara khusus melaporkan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, platform daring dan media sosial diduga telah digunakan untuk transaksi ilegal di Indonesia, Laos, Thailand, dan Vietnam (Global Organized Crime Index, n.d.b).

Perantara senjata—bertindak sebagai penghubung yang memfasilitasi penjualan atau transfer senjata—merupakan kegiatan yang sah, dan negara pihak ATT mengambil langkah-langkah mengatur perantara yang terjadi di bawah yurisdiksi mereka (UNGA, 2013, pasal 10).⁴⁴ Akan tetapi, telah terjadi beberapa transfer yang mencurigakan di kawasan tersebut. Misalnya, sebuah laporan oleh OMS Justice for Myanmar mengidentifikasi 116 perusahaan dari Myanmar dan Singapura yang menjadi perantara pasokan senjata senilai jutaan USD kepada militer di Myanmar, termasuk setelah kudeta 2021 (Justice for Myanmar, 2022). Laporan tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa Singapura memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan bagi junta militer Myanmar. Kasus-kasus perantara juga diidentifikasi di negara-negara lain di wilayah tersebut. Khususnya, pada tahun 2008, pedagang senjata terkenal Rusia, Viktor Bout, ditangkap di Thailand (Reuters, 2008). Perantara dilaporkan juga terjadi di Selandia Baru (Homayun, 2010), Kamboja (Dahari, Idris, dan Othman, 2019), Australia (Bright et al., 2022), Bangladesh (Clarke, 2020), dan Malaysia (Salisbury, 2019), di antara lainnya.

Kotak 1 Studi kasus mengenai keberagaman pola perdagangan senjata api dan pengguna akhir di kawasan ini: Bangladesh

Pola perdagangan senjata api di Bangladesh dicirikan oleh posisi geografis dan keberagaman pelakunya. Posisi unik Bangladesh—dikelilingi oleh negara-negara tetangga dengan pasar perdagangan senjata api yang signifikan, serta topografi yang memungkinkan pengangkutan ilegal (baik melalui darat, melalui hutan hujan, atau melalui Teluk Benggala yang strategis)—merupakan faktor yang memudahkan terjadinya penyelundupan. Pengendalian perbatasan yang tidak efisien dan korupsi semakin memperburuk risiko perdagangan lintas batas (Rana dan Nesa, 2018).

Pengguna akhir serta pemasok senjata api ilegal menambah kompleksitas situasi perdagangan manusia di Bangladesh. Pengguna akhir utama senjata api ilegal di negara ini terdiri dari berbagai jenis kelompok bersenjata non-negara dan gerakan separatis, seperti pemberontak Chittagong Hill Tracts (CHT) (Rana dan Nesa, 2018; IWGIA, 2012). Dilaporkan bahwa dalam beberapa kasus, senjata api ilegal juga digunakan oleh beberapa pemimpin politik (Dhaka Tribune, 2016). Berbagai kelompok bersenjata yang ada di wilayah Bangladesh juga memperburuk situasi perdagangan ilegal lintas batas negara. Sebagian besar kelompok diberikan senjata api oleh kelompok yang terafiliasi secara ideologis di wilayah tersebut. Misalnya, beberapa ekstremis Islam diyakini menerima senjata api dari Taliban Afghanistan dan Pakistan. Begitu pula dengan Organisasi Solidaritas Rohingya yang diyakini menerima pasokan dari gerakan jihad internasional lainnya (BD News 24, 2005; Rana dan Nesa, 2018). Sementara itu, beberapa pemberontak CHT diduga menerima senjata api dari India di masa lalu (Chowdhury, 2006, hlm. 43; Haider, 2021, hlm. 210; IWGIA, 2012, hlm. 14). Situasi ini tidak hanya menimbulkan ancaman bagi keamanan di dalam negeri, tetapi juga memperburuk hubungan lintas perbatasan dengan negara tetangganya (Rana dan Nesa, 2018).

Kotak 2 Studi kasus mengenai keberagaman pola perdagangan senjata api dan pengguna akhir di kawasan: Papua Nugini

Perdagangan senjata di Papua Nugini berpusat pada warga negara (termasuk kelompok berbasis suku) dan pemerintah mereka sendiri, bukan perdagangan senjata lintas batas negara atau keberadaan kelompok bersenjata non-negara. Pasokan senjata api sebagian besar masuk ke negara tersebut secara legal sebelum dialihkan dari pemilik dan pedagang senjata berlisensi, atau dari persediaan militer dan polisi (Koorey, 2016; Watson et al., 2023). Permintaan senjata api sebagian besar didorong oleh tingkat kriminalitas yang tinggi, dan kebutuhan akan perlindungan pribadi dan aset, misalnya oleh perusahaan keamanan swasta atau keamanan di lokasi pertambangan (Koorey, 2016; Watson et al., 2023).

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengalihan senjata api ke pasar gelap utamanya adalah tingginya tingkat korupsi, kurangnya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dan lembaga keamanan (yang semakin diperparah oleh kurangnya staf dan dana kepolisian,⁴⁵ dan ekspektasi budaya untuk membawa senjata api), kegagalan sistematis dalam menangani kepemilikan dan pendaftaran senjata api legal, dan mahalnya biaya lisensi senjata api (Koorey, 2016). Maraknya senjata api rakitan, terutama di dataran tinggi Papua Nugini juga menjadi perhatian penting. Selain itu, pertikaian antarsuku turut memainkan peran penting dalam penggunaan senjata api ilegal di pulau tersebut (ACLEd, 2024; Koorey, 2016).

Politisasi perdagangan senjata api juga tampaknya menjadi masalah yang signifikan. Dalam beberapa kasus, senjata api diduga dibawa masuk ke dalam negara secara legal oleh politisi dan kemudian didistribusikan di antara para pengikutnya guna mengintimidasi lawan politik –sementara pembunuhan dilaporkan terjadi di negara tersebut pada pemilihan umum 2012 di Southern Highlands (Goro dan Sanida, 2023; Koorey, 2016; Ligaiula, 2021). Dilaporkan juga bahwa senjata yang diimpor secara legal untuk polisi telah dialihkan dan dimanfaatkan guna melawan saingan berbagai aktor politik; dan senjata sitaan polisi ditemukan berada di tangan anggota parlemen dan keluarga mereka (Koorey, 2016).

Pengguna akhir dan pedagang senjata ilegal

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kawasan Indo-Pasifik rentan oleh ketegangan antarnegara dan kekacauan internal negara, baik di masa lalu maupun saat ini. Kelompok bersenjata non-negara sering kali memperoleh senjata ilegal, atau terlibat dalam perdagangan senjata (Rana dan Nesa, 2018). Kelompok-kelompok ini berkisar antara ekstremis atau separatis hingga kelompok-kelompok pertempuran antarsuku (lihat Kotak 1).⁴⁶

Lebih jauh, Indeks Kejahatan Terorganisasi Global menyoroti proses jual-beli senjata api oleh kelompok kriminal dan struktur kejahatan terorganisasi, termasuk di Australia, Indonesia, Jepang, dan Nepal (Global Organized Crime Index, n.d.b). Dalam beberapa

kasus, struktur kriminal ini melibatkan warga negara biasa, utamanya pengangguran atau pekerja dengan upah yang tidak layak, seperti nelayan di Kiribati atau petani di Vietnam (Global Organized Crime Index, n.d.b). Senjata juga digunakan untuk tujuan politik. Misalnya, ada beberapa kasus pelaku politik mempersenjatai pendukung mereka untuk perlindungan dan guna mengintimidasi lawan politik di negara-negara seperti Nepal, Papua Nugini, dan Sri Lanka (Global Organized Crime Index, n.d.b; Koorey, 2016; lihat Kotak 2).

Embargo senjata

Pemberlakuan embargo senjata berdasarkan mandat DK PBB memiliki arti bahwa transfer barang-barang yang tercakup di bawah embargo tersebut adalah ilegal menurut hukum internasional. Pasal 6(1) ATT melarang transfer yang melanggar 'kewajiban negara pihak berdasarkan langkah-langkah yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak menurut Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya embargo senjata' (UNGA, 2013, pasal 6).⁴⁷

Pengalaman negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terkait embargo senjata yang diberlakukan DK PBB memberikan pandangan lain mengenai sifat perdagangan ilegal di kawasan tersebut. Ihwal yang sangat penting adalah kasus Korea Utara, satu-satunya negara di kawasan Indo-Pasifik yang saat ini dikenai sanksi Bab VII PBB. Melalui adopsi sepuluh resolusi sejak tahun 2006, DK PBB telah memberlakukan sanksi baru dan memperluas embargo senjata terhadap Korea Utara. Embargo senjata total terhadap Korea Utara melarang, antara lain, impor atau ekspor senjata konvensional, termasuk senjata kecil (sejak DK PBB 2270 pada tahun 2016), berikut berbagai barang, perlengkapan, peralatan, dan teknologi terkait senjata konvensional (Small Arms Survey, 2023).

Laporan rutin Panel Ahli Komite PBB 1718 menyajikan wawasan tentang aktivitas impor dan ekspor Korea Utara sejak diberlakukannya rezim sanksi.⁴⁸ Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa, meskipun sanksi bersifat luas, Korea Utara terus terlibat dalam impor dan ekspor barang-barang yang dikenai sanksi di seluruh dunia (Griffiths dan Schroeder, 2020).

Kegiatan menghindari sanksi yang dilakukan oleh Korea Utara memiliki jangkauan global, namun tampaknya terkonsentrasi di Asia Timur dan Asia Tenggara (Arnold, 2023, h. 3)⁴⁹ Laporan Panel Ahli Korea Utara memuat banyak contoh dugaan transfer senjata konvensional ke dan dari Korea Utara, beberapa di antaranya berimplikasi pada kawasan Indo-Pasifik. Dua contohnya adalah:

- Pada tahun 2017, panel melaporkan penggunaan perusahaan kedok yang berpusat di Malaysia, Global Communications Co. Ltd (Glocom) oleh Korea Utara untuk transfer peralatan elektronik militer (DK PBB, 2017, para. 72–87). Panel mencatat bahwa Korea Utara 'mampu mendirikan perusahaan di negara ketiga, membangun pengakuan internasional yang signifikan, termasuk melalui partisipasi dalam pameran senjata regional terkemuka serta penjualan senjata kelas atas dan materi terkait di banyak negara' (paragraf 87).



Senjata yang disita oleh militer Israel dari wilayah yang diserang oleh militan Hamas Palestina selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang dilaporkan berisi granat berpeluncur roket F-7 buatan Korea Utara. Sumber: AP Photo/Alon Bernstein

- Pada tahun 2015, panel menyediakan sebuah *commentary* (DK PBB, 2015, paragraf 125–67) tentang penunjukan Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) Korea Utara oleh DK PBB sebagai penerima sanksi karena operasi yang dilakukan melalui jaringan global perusahaan tersebut dengan memanfaatkan individu dan entitas yang berkantor di sedikitnya sepuluh negara anggota PBB, termasuk Jepang, Malaysia, Singapura, dan Thailand (paragraf 128). Di antara banyak kegiatannya, OMM memainkan peran penting dalam mengatur pengiriman senjata tersembunyi dan material terkait di atas kapal *Chong Chon Gang* (paragraf 125, 135).⁵⁰

Temuan awal yang diuraikan dalam laporan terbaru oleh 38North menunjukkan bahwa jumlah total ekspor senjata kecil ke Korea Utara telah menurun secara signifikan sejak 2016 dan bahwa pengadaan senjata kecil dari Korea Utara, setelah penurunan antara tahun 2009 dan 2011, telah 'bangkit kembali' sejak 2015. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa nilai dolar total dari ekspor dan impor agak rendah dan tampaknya tidak melibatkan negara Indo-Pasifik manapun secara signifikan maupun jangka panjang. Menurut laporan tersebut,

'embargo senjata PBB atas Korea Utara mungkin telah membantu mencapai tujuannya dengan membuat perdagangan senjata kecil Korea Utara menjadi mahal dan harus bergantung pada saluran pengadaan ilegal' (Kim, 2022).

Untuk mendapatkan gambaran tentang embargo senjata yang komprehensif, diperlukan analisis *seluruh* negara di kawasan Indo-Pasifik terkait pelanggaran pada *semua* embargo senjata PBB di masa lalu dan saat ini, baik yang benar-benar terjadi maupun sekadar dugaan — tugas yang jauh melampaui cakupan Laporan ini. Lebih jauh, sulit untuk menunjukkan bagaimana dan sejauh apa keberadaan embargo senjata yang diberlakukan DK PBB memengaruhi keputusan terkait ekspor dan impor negara-negara Indo-Pasifik. Sanksi tersebut hanyalah sebuah alat yang memiliki keterbatasan dalam upaya mengurangi transfer senjata konvensional ilegal. Efektivitasnya sangat bergantung pada 'kapasitas dan kemauan negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara anggota permanen (P5) DK PBB, negara-negara pemasok senjata, negara-negara transit dan pemindahan muatan antarkapal, serta negara-negara tetangga yang menjadi target embargo' (Fruchart et al., 2007, h. 51).⁵¹

Meskipun demikian, beberapa observasi dapat diuraikan:

- Meskipun tampaknya dapat disimpulkan bahwa banyak negara telah menolak permintaan transfer senjata konvensional berdasarkan pertimbangan bahwa pengajuan transfer akan melanggar embargo senjata PBB, informasi mengenai permintaan transfer yang ditolak tidak disyaratkan dalam pelaporan kepada komite sanksi PBB, dalam templat pelaporan ATT, maupun dalam data perdagangan (Atwood, Giezendanner, and Timmermans, 2023).
- Meskipun tidak bersifat wajib seperti embargo senjata yang dikenakan PBB di bawah Bab VII, embargo multilateral dan unilateral lainnya ada atau telah berlaku di kawasan Indo-Pasifik. Uni Eropa (UE), contohnya, telah memberlakukan embargo senjata terhadap Tiongkok sejak Juni 1989, Myanmar sejak Juli 1991, dan Korea Utara sejak November 2006. UE juga sebelumnya memberlakukan embargo senjata terhadap Indonesia (September 1999-Januari 2000) (SIPRI, n.d.a). Di antara embargo senjata yang diberlakukan terhadap negara, Amerika Serikat masih meneruskan embargo senjata terhadap Kamboja sejak Desember 2021 dan memberlakukannya pula terhadap Indonesia dari 1999 sampai 2005 karena pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Ia juga memberlakukan embargo terhadap Sri Lanka akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Sri Lanka. Inggris telah menerapkan embargo senjata terhadap Cina sejak 1989, dan sejumlah negara di kawasan tersebut (contoh, Australia, Jepang, dan Korea Selatan) juga memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara selain sanksi UN (Global Sanctions, 2024). Penelitian lebih lanjut diperlukan guna memberikan gambaran penuh mengenai bagaimana aplikasi embargo senjata ini memengaruhi perilaku negara terkait transfer senjata di kawasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengalaman menjadi subyek embargo senjata, khususnya pada ranah pelanggaran hak asasi manusia, bisa jadi meningkatkan kekhawatiran negara-negara pengimpor di kawasan terkait 'keamanan pasokan', dan

pada akhirnya memengaruhi sikap negara-negara ini terhadap ratifikasi dan akses ATT (Holtom and Parker, 2016, hh. 10, 69).

Senjata kecil dan senjata ringan buatan pribadi dan nonindustri lainnya

Senjata kecil dan senjata ringan buatan pribadi dan nonindustri lainnya mencakup senjata yang diproduksi di luar pabrik industri berlisensi melalui berbagai teknik nonindustri (Small Arms Survey, 2024; Small Arms Survey, Instituto Sou da Paz, dan UNIDIR, 2024).⁵² Senjata ini bervariasi dalam kualitas dan kompleksitas, dari yang sederhana hingga yang diproduksi dengan teknologi tinggi (Vecchioni dan Topal, 2024). Dalam beberapa konteks, senjata ini merupakan segmen produksi senjata kecil dan senjata ilegal yang cukup besar dan terus bertambah.⁵³

Kawasan Indo-Pasifik memiliki sejarah penting terkait produksi senjata tanpa izin. Kawasan Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan (berbatasan dengan Afghanistan) paling dikenal dengan jenis produksi senjata ini. Sejumlah besar senjata buatan lokal diproduksi di berbagai lokakarya di kawasan tersebut dan tersedia secara luas di pasar senjata (Malik, A., 2016).⁵⁴ Senjata yang diproduksi di kawasan tersebut mencakup replika senjata Tiongkok, Rusia, Turki, dan AS yang dibuat secara terampil, serta senjata buatan yang dirakit dengan buruk (Malik, A., 2016). Yang terakhir ini tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan karena kualitasnya yang kurang optimal, tetapi juga risiko keamanan di tingkat nasional, dan apabila terjadi proliferasi regional. Contohnya, karena biayanya yang rendah dan ketersediaannya yang luas, senjata buatan Pakistan telah memicu ketidakamanan dan ketidakstabilan di Afghanistan selama beberapa dekade.⁵⁵

Produksi senjata kecil dan senjata ringan buatan pribadi dan nonindustri lainnya juga terdapat di negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Di Asia Selatan, senjata rakitan dan senjata palsu diproduksi di India dan juga diperdagangkan melalui perbatasan terbuka antara India dan Nepal (ImproGuns, 2014; Paudel, 2014). Bangladesh dan Sri Lanka juga memiliki tingkat produksi senjata rakitan yang lumayan. Di Asia Tenggara, produksi senjata rakitan telah didokumentasikan di Filipina (terutama di wilayah kota Danao) (Batchelor, 2003; GMA News Online, 2018; Gutierrez, 2019); Indonesia (ICG, 2010, h. 5–7); dan Kamboja.⁵⁶ Di Myanmar, senjata api cetak 3D telah didokumentasikan di gudang senjata pemberontak negara tersebut (Eydoux, 2022; Pike, 2022).⁵⁷ Senjata api rakitan juga digunakan untuk membunuh mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 (Jenzen-Jones dan Senft, 2022). Di Oseania, senjata api hasil cetak 3D sedang marak di Australia dan Selandia Baru (Bright dan Mann, 2022; Church, 2022). Di negara-negara Oseania lainnya, hanya tersedia sedikit data tentang senjata api rakitan, tetapi beberapa penelitian menunjukkan keberadaan senjata api rakitan di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon (Alpers, 2005, h. 45; Alpers dan Twyford, 2003).⁵⁸ ●



Kurangnya keterlibatan dengan forum PBB dan instrumen yang relevan dengan ATT bermula dari kurangnya relevansi yang dirasakan terhadap kebutuhan keamanan nasional dan tantangan dalam menunjukkan bahwa ATT sendiri efektif dalam mengatasi pengalihan.”

Sikap terhadap ATT di kawasan Indo-Pasifik

Bagian ini menyelidiki sikap utama terhadap ATT di kawasan Indo-Pasifik. Bagian ini dibagi menjadi empat subbagian utama yang masing-masing berfokus pada subkawasan yang berbeda: Oseania, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Setiap subbagian memberikan gambaran singkat tentang perdagangan senjata dan masalah keamanan di tingkat subkawasan, menyajikan beberapa upaya utama menuju universalisasi dan kepatuhan yang dilakukan di subkawasan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dan menganalisis sikap utama negara-negara di subkawasan tersebut terhadap ATT.

Oseania⁵⁹

Australia dan Selandia Baru mempelopori upaya pengendalian senjata di Oseania melalui keterlibatan aktif dalam inisiatif pelucutan senjata regional. Subkawasan tersebut telah

Tabel 4 Keanggotaan ATT di Oseania sejak Juni 2004

Negara	Status	Tanggal
Australia	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 24 Desember 2014
Niue	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 4 November 2020
Palau	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 7 Juli 2019
Samoa	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 24 Desember 2014
Selandia Baru	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 24 Desember 2014
Tuvalu	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 3 Desember 2015
Kiribati	Penanda tangan	25 September 2013
Nauru	Penanda tangan	25 September 2013
Vanuatu	Penanda tangan	26 Juli 2013
Fiji	–	–
Kepulauan Marshall	–	–
Kepulauan Solomon	–	–
PNG	–	–
Solomon Islands	–	–
Tonga	–	–

Sumber: Sekretariat ATT (2024c)

terlibat dalam upaya pengendalian senjata dan pelucutan senjata tidak hanya melalui upaya negara itu sendiri, tetapi juga melalui upaya kolektif regional. Berbagai sejarah kekerasan, termasuk yang terjadi di Bougainville dan Kepulauan Solomon, mendorong program pelucutan senjata yang signifikan. Di tingkat kawasan, deklarasi dan perjanjian seperti Deklarasi Honiara dan Deklarasi Aitutaki (PIF, 1992; 1997) dan Kerangka Kerja Nadi (Forum Regional Security Committee, 2000), serta RUU Pengendalian Senjata Model Forum Kepulauan Pasifik (Control Arms, 2022, h. 97) menguraikan strategi komprehensif untuk pengendalian senjata. Perjanjian keamanan kolaboratif yang lebih baru, seperti Deklarasi Boe dan bagian Perdamaian dan Keamanan dalam Strategi untuk Benua Pasifik Biru 2050, mengadvokasikan komitmen berkelanjutan guna mendukung upaya perdamaian dan keamanan global (PIF, 2022). Pada saat penulisan ini, enam negara bagian dari subkawasan tersebut merupakan negara pihak ATT (lihat Tabel 4).

Meskipun Oseania saat ini merupakan salah satu negara dengan level kekerasan bersenjata dan perdagangan senjata internasional terendah di dunia, berbagai tantangan khas tetap ada. Papua Nugini, misalnya, terus bergulat dengan kekerasan yang terjadi di daerah perkotaan dan area suku terpencil. Meskipun konflik internal ini menimbulkan risiko terbatas bagi negara-negara kepulauan tetangga saat ini, di masa lalu terdapat kasus besar yang melibatkan senjata. Senjata berkontribusi, misalnya, pada destabilisasi dan kudeta di Fiji. Proliferasi senjata di Kepulauan Solomon setelah konflik di Bougainville, antara tahun 1988 dan 1998, juga menunjukkan bagaimana kekerasan bersenjata telah secara signifikan memengaruhi negara-negara di kawasan tersebut.

Dimensi maritim juga merupakan fitur penting perdagangan di Kepulauan Pasifik, dan perubahan iklim tetap menjadi prioritas bagi beberapa pulau, seperti Fiji, yang pelabuhannya terkena dampak badai. Selain itu, pulau-pulau tertentu tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk menegakkan kebijakan, seperti mesin sinar-X di pos perbatasan.

Berbagai upaya telah dilakukan selama bertahun-tahun guna membantu negara-negara di Oseania menandatangani dan meratifikasi ATT. Kantor PBB untuk Urusan Pelucutan Senjata (melalui Fasilitas Perwalian PBB yang Mendukung Kerja Sama tentang Regulasi Senjata/ UNSCAR) telah mendanai berbagai inisiatif sejak 2014, mulai dari kegiatan peningkatan kesadaran dan advokasi nasional guna mendorong penandatanganan, ratifikasi, dan implementasi ATT di seluruh Kepulauan Pasifik pada tahun 2015. Upaya ini diperluas pada tahun 2015–16 agar mencakup negara-negara tertentu seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu guna memajukan implementasi ATT di Oseania. Pada tahun 2019, UNSCAR telah mendukung pembaruan repositori GunPolicy.org dengan data tentang kekerasan bersenjata dan bukti berbasis gender untuk kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas, termasuk Fiji, Malaysia, Samoa, dan Thailand, serta penguatan pengendalian guna mencegah transfer senjata ilegal (UNODA, 2024a). Selain itu, VTF mendukung Palau, Negara Federasi Mikronesia, dan Kepulauan Marshall pada tahun 2018 guna meningkatkan penyelarasan sistem pengendalian senjata mereka dengan kewajiban ATT (Palau, 2018). Inisiatif seperti Program Pendanaan ATT memfasilitasi kehadiran beberapa negara dari Oseania pada Konferensi Negara Pihak (CSP) di Jenewa (ATT Secretariat, 2024b).

Australia

Australia merupakan salah satu pengeksport senjata konvensional terbesar di kawasan ini, dan hanya menghadapi kasus perdagangan senjata ilegal dalam jumlah terbatas yang sebagian besar diakibatkan oleh pengalihan dari individu berlisensi. Pengendalian senjata menjadi prioritas kebijakan publik utama di Australia setelah pembantaian Port Arthur pada tahun 1996,⁶⁰ yang memicu reformasi ketat undang-undang senjata api. Hal ini menjadi titik balik yang memperkuat pendirian Australia tentang pengendalian senjata, baik di dalam negeri maupun internasional (CAVR, 2024). Partisipasi aktif Australia dalam berbagai macam perjanjian pengendalian senjata, mulai dari yang terkait dengan senjata konvensional hingga senjata pemusnah massal, menegaskan dedikasinya terhadap pengendalian senjata.

Australia berperan penting dalam ATT sejak awal, memperjuangkan kemunculan Traktat melalui Resolusi UNGA 61/89 pada tahun 2006 dan memainkan peran penting dalam rancangan resolusi berikutnya. Analisis Kepentingan Nasional mengungkapkan upaya proaktif Australia dalam mendorong pendekatan inklusif terhadap persiapan Traktat, di mana ia melibatkan konsultasi antarlembaga yang luas di bawah pimpinan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Konsultasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan menggambarkan komitmen Australia terhadap sebuah Traktat komprehensif yang meliputi masalah kemanusiaan, keamanan, olahraga, dan industri tanpa mengorbankan kegiatan sipil yang sah. Australia memegang jabatan presidensi Konferensi PBB terakhir tentang Traktat Perdagangan Senjata (ATT) dan meratifikasi Traktat tersebut pada tahun 2014, serta secara konsisten menghadiri CSP dan memenuhi kewajiban pelaporan tahunannya.

Australia memiliki tujuan untuk mendorong universalisasi ATT, khususnya di antara negara-negara tetangganya di Indo-Pasifik. Target ini telah diupayakan melalui dorongan langsung, diplomasi regional, dan penyediaan sumber daya untuk hibah VTF dan UNSCAR yang dirancang agar dapat memfasilitasi partisipasi Traktat bagi negara-negara Kepulauan Pasifik.

Fiji

Fiji memiliki peraturan kepemilikan dan pembuatan senjata yang ketat. Komitmen negara tersebut terhadap pengendalian senjata internasional terbukti melalui partisipasinya dalam Konvensi Pelarangan Ranjau (*Mine Ban Convention*), Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW*), dan Konvensi Munisi Curah (*Convention on Cluster Munitions/CCM*). Fiji juga merupakan penyumbang pasukan penjaga perdamaian yang signifikan di panggung global.

Perjalanan Fiji menuju akses ATT menunjukkan adanya perubahan perspektif di negara tersebut. Selama negosiasi ATT, pemerintah Fiji sebelumnya abstain dari pemungutan suara mengenai teks Traktat dan pemungutan suara ATT di Komite Pertama PBB pada tahun 2019. Setelahnya, Fiji memberikan suara mendukung ATT pada tahun 2020 dan 2021, tetapi tidak berpartisipasi pada tahun 2022 dan 2023. Di tahun 2023, pemerintah Fiji menyampaikan

maksud yang jelas untuk mengakses ATT, serta mempertimbangkan bantuan dan kerja sama internasional (Fiji, 2023).

Sebagai negara penyumbang pasukan aktif untuk operasi penjaga perdamaian, Fiji mengimpor berbagai macam senjata dan perlengkapan, termasuk kapal angkatan laut dan Bushmaster.⁶¹ Keraguan militer terhadap ketentuan ATT, khususnya seputar pengungkapan publik, sirna oleh upaya mengklarifikasi kekhawatiran ini. Perkembangan ini menegaskan adanya konsensus di antara perwakilan keamanan terkait penerimaan akses ATT—pandangan yang kemudian tercermin dari keterlibatan Fiji dalam dialog bersama Melanesian Spearhead Group, yang menunjukkan keterbukaan regional terhadap Traktat tanpa takut akan dampak hubungan diplomatik yang merugikan (CAVR, 2024).

Kemajuan Fiji menuju akses ATT melibatkan pengembangan rencana aksi nasional (RAN) dan daftar pengendalian nasional, analisis kesenjangan hukum, dan penyusunan draf amandemen yang diperlukan, serta pelatihan ekstensif di berbagai lembaga—kegiatan yang didorong oleh partisipasi aktif delegasi yang membiayai sendiri dalam CSP dan advokasi regional. Masyarakat sipil yang aktif di negara tersebut, khususnya kelompok perempuan yang berfokus pada perdamaian dan keamanan, memainkan peran penting dalam mengadvokasi akses ATT Fiji, terlepas adanya aspek sensitif terkait perdagangan senjata akibat ketidakstabilan politik di masa lalu. Dorongan dari Australia dan Selandia Baru menggarisbawahi dukungan internasional terhadap proses akses Fiji, yang diantisipasi akan bebas hambatan. Proses ini memerlukan persetujuan dari kabinet dan parlemen negara tersebut, dan undang-undang yang ada sebagian besar sejalan dengan persyaratan ATT. Pendekatan yang inklusif dan multilateral terhadap pengendalian senjata ini memosisikan Fiji sebagai advokat ATT di Oseania (Fiji, 2023).

Kiribati

Penandatanganan ATT oleh Kiribati pada tahun 2013, ditambah dengan ratifikasi Konvensi Pelarangan Ranjau pada tahun 2000, menggambarkan komitmen negara tersebut terhadap pengendalian senjata. Meskipun tidak memiliki pasukan militer, pendekatan Kiribati terhadap regulasi senjata api sipil dapat disebut 'restriktif' (CAVR, 2024), sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan undang-undang yang mendukung, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977 dan Undang-Undang Senjata dan Amunisi (Kiribati, 1977).

Selama negosiasi Traktat, Kiribati tidak hadir dalam pemungutan suara untuk teks ATT. Meskipun demikian, penandatanganan Traktat oleh negara tersebut, beserta beberapa partisipasi dalam CSP, menunjukkan pengakuan atas pentingnya Traktat dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas global. Pada tahun 2022, Kiribati menyampaikan komitmen yang kuat untuk ratifikasi, serta menyatakan kekhawatiran terhadap ancaman yang muncul akibat kejahatan terorganisasi transnasional dan potensi penggunaan senjata ilegal karena faktor lingkungan geografis dan ekonominya (Kiribati, 2022).

Dengan tidak adanya keberatan oleh internal untuk bergabung dengan ATT, dan mengingat rezim pengendalian senjata yang ketat serta perdagangan senjata yang tidak signifikan di

negara tersebut, tantangan utama Kiribati terletak pada perlunya bantuan ahli dan dukungan sumber daya guna meratifikasi dan menerapkan Traktat tersebut sepenuhnya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengamankan bantuan VTF dapat memacu pengembangan kapasitas nasional dan kerangka legislatif yang diperlukan untuk ratifikasi Traktat (CAVR, 2024).

Kepulauan Marshall

Kepulauan Marshall memberlakukan kebijakan regulasi senjata api yang 'restriktif' (CAVR, 2024), yang utamanya dipandu oleh Undang-Undang Pengawasan Senjata tahun 1971 yang direvisi pada tahun 2004 (ICRC, n.d.), dan Undang-Undang Pengawasan Senjata Api (Marshall Islands, 1983). UNROCA mencatat hanya satu kasus impor senjata—80 senjata kecil yang diimpor dari Amerika Serikat pada tahun 2020—sejak tahun 1993. Aktivitas yang sedikit ini menunjukkan keterlibatan terbatas dalam perdagangan senjata global yang sejalan dengan kebijakan domestiknya yang restriktif.

Kepulauan Marshall memberikan suara yang mendukung teks Traktat pada tahun 2013 dan secara konsisten mendorong resolusi ATT di Komite Pertama PBB dari tahun 2018 hingga 2023; namun, meskipun mengaksesi Konvensi Pelarangan Ranjau, negara itu belum bergabung dengan ATT maupun CCM. Hal ini menunjukkan komitmen selektif terhadap upaya pengendalian dan pelucutan senjata internasional. Jalur untuk bergabung dengan ATT bagi Kepulauan Marshall melibatkan pertimbangan konteks regional dan prioritas internalnya. Ketertarikan negara tersebut terhadap ATT yang tidak terlalu tinggi sejauh ini dapat dikaitkan dengan volume senjata yang kecil dan partisipasi yang terbatas dalam instrumen pengendalian senjata lainnya. Namun demikian, keterlibatan dengan ATT yang lebih proaktif oleh negara-negara tetangga seperti Kiribati dapat mendorong Kepulauan Marshall untuk mempertimbangkan kembali posisinya untuk bergabung dengan Traktat (CAVR, 2024).

Kepulauan Solomon

Setelah periode kekerasan bersenjata penuh gejala yang dikenal sebagai 'Ketegangan (*the Tensions*)', Kepulauan Solomon, didukung oleh Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon pada tahun 2003, memprioritaskan pengumpulan dan pemusnahan senjata api dari polisi dan warga sipil, dan menjadi kisah sukses pelucutan senjata yang luar biasa (Alpers, Muggah, dan Twyford, 2004). Kepulauan Solomon mulai mengimpor senjata kecil untuk pasukan polisi pada tahun 2021. Negara tersebut mempertahankan dukungan kepada teks ATT selama negosiasi dan resolusi ATT Komite Pertama PBB dari tahun 2019 hingga 2023. Selain itu, Kepulauan Solomon juga telah menyerahkan 14 laporan kepada UNROCA. Ratifikasi negara tersebut terhadap Konvensi Pelarangan Ranjau pada tahun 1999 menegaskan keterlibatannya dalam upaya pelucutan senjata internasional, meskipun tidak bergabung dengan ATT maupun CCM (CAVR, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Solomon terlibat dalam lokakarya ATT regional dan lokal, yang menunjukkan pengakuan negara tersebut atas perlunya kerja sama internasional dan regional guna menerapkan ATT secara efektif. Kegiatan tersebut menggarisbawahi pentingnya pembentukan lembaga utama untuk koordinasi ATT dan mendorong kerja sama antarlembaga di antara penegak hukum, badan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberhasilan adopsi dan implementasi Traktat (Kepulauan Solomon, 2016). Peningkatan impor senjata untuk keperluan kepolisian belakangan ini membuka peluang baru bagi advokasi akses Kepulauan Solomon atas ATT.

Nauru

Nauru menetapkan kebijakan yang tegas terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Kebijakan pengendalian senjata api yang ketat ini didukung oleh Undang-Undang Larangan Senjata dan Opium tahun 1936–1967 (Nauru, 1967) yang melarang warga sipil memiliki senjata api dan masih berlaku hingga saat ini. Nauru menandatangani ATT pada tahun 2013 dan menyetujui Konvensi Pelarangan Ranjau dan CCM pada tahun yang sama.

Riwayat pemungutan suara Nauru baru-baru ini yang mendukung resolusi ATT di PBB pada tahun 2022 dan 2023, setelah sebelumnya tidak memberikan suara, mengindikasikan pendekatan yang positif dan terukur terhadap Traktat tersebut. Meskipun Nauru memberikan suara mendukung teks Traktat selama negosiasi, tidak adanya pertentangan atau keberatan terhadap ATT, ditambah dengan pertimbangan mengenai relevansi dan prioritas yang diberikan atas masalah nasional lainnya (CAVR, 2024), mencerminkan posisi Nauru terhadap Traktat tersebut. Mempertimbangkan populasi Nauru yang kecil dan kendala pragmatis terhadap partisipasi Traktat, jalur menuju akses ATT tampaknya efisien dan tidak terhambat oleh kebutuhan akan amandemen hukum. Fakta bahwa Nauru telah mematuhi sejumlah kewajiban ATT membuka peluang yang menekankan bahwa akses tidak akan menambah beban yang tidak semestinya, serta membuatnya memiliki kesamaan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik kecil lainnya yang telah bergabung dengan ATT (CAVR, 2024).

Negara Federasi Micronesia

Negara Federasi Mikronesia (NFM) memiliki pendekatan yang agak berbeda terhadap inisiatif pengendalian dan pelucutan senjata global. Tidak seperti kebanyakan negara tetangganya di Pasifik, NFM berdiri sendiri karena tidak menyetujui salah satu perjanjian pengendalian senjata konvensional terpenting hingga saat ini. Posisi regulasi NFM terhadap senjata dikategorikan sebagai 'permissif', kategorisasi yang langka dalam konteks negara-negara Kepulauan Pasifik (CAVR, 2024). Kepemilikan senapan untuk berburu di wilayah tertentu adalah legal dengan izin, meskipun kepemilikan senjata genggam adalah ilegal, yang menggambarkan kerangka regulasi senjata api yang agak berbeda. Senjata api terkadang digunakan untuk tujuan intimidasi, terutama di daerah

pedesaan (CAVR, 2024). Namun, perdagangan senjata di dalam NFM terbatas, dan negara ini termasuk yang paling sedikit terkena dampak kekerasan senjata di Kepulauan Pasifik (Global Organized Crime Index, n.d.b).

Terlepas dari sikap persimisifnya, NFM secara konsisten mendukung resolusi ATT di pertemuan Komite Pertama PBB dari tahun 2019 hingga 2023, dan memberikan suara yang berpihak kepada teks Traktat selama negosiasi yang menunjukkan sikap positifnya terhadap Traktat. Jalan menuju akses NFM ke ATT tampaknya bergantung pada peningkatan keterlibatan dan minat yang ditunjukkan oleh perwakilannya dalam proses dan lokakarya Traktat. Meskipun kurang terlihatnya keberatan terhadap ketentuan ATT saat ini menunjukkan nihilnya penolakan terhadap prinsip-prinsip Traktat, momentum maupun ketertarikan untuk bergabung tetap tidak ada (CAVR, 2024).

Niue

Niue, meskipun merupakan negara kecil, telah bergabung dengan berbagai perjanjian internasional penting, seperti Konvensi Pelarangan Ranjau pada tahun 1998, CCM, dan TPNW. Saat ini, Niue belum melapor ke UNROCA maupun Program Aksi untuk Mencegah, Memerangi, dan Memberantas Perdagangan Ilegal Senjata Kecil dan Senjata Ringan PBB (UN PoA), yang menegaskan perannya yang kurang terlihat dalam dinamika persenjataan global.

Minat Niue terhadap ATT telah berkembang, terutama setelah insiden kekerasan bersenjata pada tahun 2012. Setelahnya, negara tersebut aktif mempertimbangkan Traktat dan melakukan akses pada tahun 2020. Niue merupakan peserta aktif dalam lokakarya regional Kepulauan Pasifik mengenai penanganan perdagangan senjata api ilegal pada tahun 2018 (PGA, 2020). Meskipun ada perkembangan ini, Niue menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pelaporannya di bawah ATT, dan sejauh ini belum menyerahkan laporan awal maupun laporan tahunan. Namun, perjalanan negara tersebut dari mengalami kekerasan terkait senjata hingga bergabung dengan ATT menunjukkan narasi yang sejalan dengan tujuan Traktat tersebut, bahkan untuk negara-negara dengan populasi kecil (sekitar 1.500 untuk Niue) (CAVR, 2024).

Palau

Palau tidak terlibat langsung dalam perdagangan senjata internasional. Meskipun demikian, negara tersebut telah menyerahkan 11 laporan 'nihil' kepada UNROCA, yang terakhir pada tahun 2022. Palau aktif dalam proses pengendalian senjata internasional dan menonjol di antara sebagian besar negara Kepulauan Pasifik karena telah meratifikasi ketiga perjanjian pengendalian senjata konvensional utama: ATT, CCM, dan Konvensi Pelarangan Ranjau.

Setelah menyelesaikan proyek pertama dari dua proyek dukungan VTF yang dilaksanakan oleh CAVR, Palau meratifikasi ATT pada tahun 2019. Lebih jauh, proyek pertama melibatkan kerja sama dengan perwakilan Senat Palau dalam penyusunan Makalah Kabinet dan resolusi yang mendukung ratifikasi ATT. Sebagai bagian dari proses ini, Palau membentuk Kelompok

Kerja ATT, yang terdiri dari perwakilan Kantor Wakil Presiden; Kementerian Negara (Divisi Luar Negeri dan Dalam Negeri); Biro Keamanan Publik; Biro Pengembangan Komersial; Biro Keamanan Maritim, Pelindungan Ikan dan Satwa Liar; Badan Investasi Asing; Biro Imigrasi dan Tenaga Kerja; Kementerian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Badan Penegakan Narkotika; dan Biro Pendapatan, Bea Cukai, dan Perpajakan. Para peserta mengikuti lokakarya nasional dan dilanjutkan dengan konsultasi titik kontak nasional bersama penasihat hukum Senat Palau guna mengajukan Resolusi tersebut. Sejak bergabung dengan Traktat tersebut, Palau konsisten dalam pelaporan tahunannya dan merupakan satu-satunya dari empat negara pihak Kepulauan Pasifik yang telah menyerahkan semua laporan ATT yang disyaratkan.

Meskipun merupakan negara kecil yang tidak terlibat dalam perdagangan senjata global, Palau memenuhi kewajiban pelaporannya di bawah ATT. Dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, dan pemerintahan yang menangani banyak isu, perwakilan Palau hampir tidak dapat diharapkan untuk secara aktif mendukung negara-negara Oseania lainnya. Akan tetapi, keberhasilan Palau dapat memandu OMS negara lain dalam mengumpulkan informasi yang tersedia dari perwakilan Palau dan menggunakannya guna mendukung universalisasi ATT di negara mereka sendiri.

Papua Nugini

Papua Nugini menghadapi risiko perdagangan senjata yang tinggi akibat perbatasan pantainya yang luas dan sebagian besar tidak terlindungi, sehingga ia sangat rentan terhadap perdagangan senjata dan bahan-bahan terlarang lainnya (PNG, 2014; lihat Kotak 2). Mosaik kekuasaan dan hubungan ekonomi yang kompleks di antara komunitas suku di seluruh wilayah Papua Nugini turut menghadirkan rintangan khusus bagi pengendalian senjata di negara tersebut, meskipun oleh karenanya terdapat tawaran insentif untuk bergabung dengan ATT. Terlepas adanya tantangan-tantangan tersebut, Papua Nugini menunjukkan kemauan untuk terlibat dengan komunitas global dalam pelucutan senjata, terutama melalui aksesinya ke Konvensi Pelarangan Ranjau. Upaya-upaya menuju pelucutan senjata, terutama setelah konflik Bougainville, telah menghasilkan langkah-langkah signifikan dalam mengurangi kekerasan terkait senjata di Papua Nugini.⁶² Secara khusus, proses perdamaian Bougainville dan inisiatif pelucutan senjata setelahnya, termasuk penghancuran sepertiga inventaris senjata kecil militer negara tersebut oleh Pasukan Pertahanan Papua Nugini (*Papua New Guinea Defence Force/PNGDF*) dengan dukungan pemerintah Australia, telah menempatkan PNGDF sebagai salah satu pasukan militer dengan rasio penghancuran senjata api tertinggi secara global (Alpers, 2008).

Namun demikian, sikap terhadap ATT di Papua Nugini telah menghasilkan kombinasi antara ketertarikan yang sarat kewaspadaan dan kemajuan yang lambat, dengan pemerintah saat ini menunjukkan fokus baru pada pengendalian senjata dan potensi manfaat dari keanggotaan ATT. Pada tahun 2005, Papua Nugini menyelenggarakan Gun Summit, yang ke-244 rekomendasinya tidak dilaksanakan karena kurang diprioritaskan (The National, 2011; CAVR, 2024; Haley dan Muggah, 2006).⁶³ Hingga saat ini, meskipun Papua Nugini bukanlah negara

pihak maupun penanda tangan ATT, negara tersebut telah berpartisipasi dalam sejumlah lokakarya dan program pelatihan terkait ATT yang diatur oleh CAVR dan UNRCPD. Pada tahun 2022, UNRCPD juga melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan kerangka hukum terkait senjata kecil negara tersebut guna menilai kepatuhan mereka terhadap PoA PBB dan ATT. Di dalam negeri, beberapa OMS di Papua Nugini dan Bougainville telah aktif dalam diskusi terkait ATT satu dekade terakhir, termasuk Peace Foundation of Melanesia dan anggota Komite Hukum Humaniter Internasional Papua Nugini. Dengan demikian, manfaat utama bergabung dengan ATT bagi Papua Nugini meliputi pengurangan pengalihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyelundupan lintas batas negara (CAVR, 2024; The National, 2024). Dengan bantuan dari VTF dan donor lain, serta upaya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, langkah Papua Nugini menuju keanggotaan ATT tampak lebih memungkinkan. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dan kolaborasi internasional yang berkelanjutan guna memfasilitasi akses Traktat negara tersebut.

Samoa

Penggunaan senjata api di Samoa dibatasi: hanya Bagian Operasi Taktis dari kepolisian negara tersebut yang dipersenjatai, dan hanya beberapa senapan laras panjang dan senapan gentel yang diizinkan untuk keperluan pertanian. Semua senjata api yang terdaftar di negara tersebut dicatat dalam daftar kepolisian (CAVR, 2024; Samoa, 2024).

Samoa mendukung ATT sejak awal, yang ditunjukkan melalui suara dukungan terhadap teks Traktat. Pada tahun 2013, Tuila'epa Sa'ilele Malielegaoi, mantan perdana menteri Samoa, menyatakan komitmen negaranya terhadap pengendalian senjata dengan menyoroti dampak signifikan yang dapat ditimbulkan oleh senjata kecil, sekalipun dalam jumlah rendah, terhadap stabilitas negara-negara kepulauan kecil (Samoa, 2013). Maka dari itu, Samoa meratifikasi ATT pada tahun 2014, dan menjadi negara Kepulauan Pasifik pertama yang melakukannya. Setelah ratifikasi ATT, Samoa mendapat manfaat dari dukungan VTF yang berfokus pada pengumpulan dan pelaporan data, membuat Undang-Undang Senjata Konvensional—yang juga mencakup daftar pengendalian nasional—pada tahun 2017, dan setelahnya merevisi Undang-Undang Senjata dan Amunisi pada tahun 2018 guna memperkuat kepatuhannya terhadap kewajiban Traktat. Samoa mengajukan laporan ATT awal pada tahun 2015, dan tersedia untuk publik. Laporan ATT tahunan terakhir negara itu adalah pada tahun 2018, yang sudah terlambat beberapa tahun. Meskipun demikian, Samoa telah menyerahkan lebih banyak laporan UNROCA (17 sejak 1993) dibandingkan negara Kepulauan Pasifik lainnya.

Tantangan utama Samoa berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, teknis, dan finansial untuk menerapkan berbagai instrumen internasional (Samoa, 2024). Lebih jauh, keterisolasian negara-negara Kepulauan Pasifik menimbulkan tantangan dalam hal pemantauan transfer dan pemindahan muatan antarkapal. Meskipun demikian, Samoa secara aktif mendorong negara-negara lain di subkawasan tersebut untuk bergabung dengan ATT dengan menekankan pendekatan komprehensif Traktat tersebut terhadap keamanan regional, yang mencakup langkah-langkah pengendalian perbatasan yang ketat. Sikap ini diperkuat oleh Deklarasi Boe tentang Keamanan Kawasan yang memperluas konsep keamanan agar mencakup ancaman dari perubahan iklim, faktor lingkungan, dan kekerasan

berbasis gender—sebuah isu yang diakui dalam kebijakan keamanan nasional Samoa (Samoa, 2019).

Selandia Baru

Selandia Baru dikenal sebagai importir senjata kecil dan eksportir amunisi aktif di kawasan Indo-Pasifik. Negara ini memainkan peran proaktif dan terdepan dalam upaya multilateral menuju pelucutan dan pengendalian senjata, sebagaimana ditunjukkan oleh ratifikasi negara tersebut pada semua perjanjian utama terkait senjata konvensional, termasuk ATT pada tahun 2014.

Hingga November 2023, Selandia Baru memiliki menteri pelucutan dan pengendalian senjata, satu-satunya jabatan semacam itu di Oseania. Amandemen tahun 2021 atas rezim Barang Strategis mencerminkan upaya berkelanjutan supaya lebih selaras dengan persyaratan ATT (New Zealand, 2021). Duta Besar Dell Higgie, seorang warga negara Selandia Baru dan mantan ketua Komite Seleksi VTF, dikenal dengan kontribusinya yang signifikan. Selandia Baru juga mendanai beberapa hibah VTF untuk negara-negara Kepulauan Pasifik dan menyelenggarakan konferensi regional tentang ATT, seperti Konferensi Pasifik tentang Traktat Senjata Konvensional di Auckland pada tahun 2018.



Helikopter SH-2G(I) Seasprite lepas landas dari HMNZS Aotearoa, Selandia Baru.

Sumber: Pasukan Pertahanan Selandia Baru

Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, Selandia Baru turut menyelenggarakan pertemuan meja bundar Asia-Pasifik tahunan tentang ATT bersama Australia, Jepang, dan Control Arms.

Dengan kebijakan luar negeri yang berfokus pada Oseania, Selandia Baru memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan ATT, memulai diskusi tentang potensi hambatan akses, dan memberikan bantuan yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan tersebut (New Zealand, 2020). Pada tahun 2014, Selandia Baru mendukung pengembangan model undang-undang guna membantu negara-negara Oseania dalam menerapkan ATT, bekerja sama dengan Small Arms Survey (New Zealand and Small Arms Survey, 2014).

Tonga

Tonga mengendalikan persenjataannya berdasarkan kerangka hukum di bawah Undang-Undang Senjata dan Amunisi tahun 1968 dan Peraturan Senjata dan Amunisi tahun 1969 (CAVR, 2024). Meskipun undang-undang persenjataannya bersifat restriktif, Tonga menunjukkan keterlibatan yang minim dalam mekanisme pelaporan pengendalian senjata internasional, seperti UN PoA, dan belum menyerahkan laporan apa pun kepada UNROCA sejak tahun 2006. Meskipun menyediakan penempatan pasukan dalam koalisi internasional dan misi penjaga perdamaian, Tonga belum menyetujui perjanjian pengendalian senjata konvensional utama apa pun, termasuk ATT.

Selama negosiasi ATT, Tonga memberikan suara mendukung teks Traktat. Pola pemungutan suara baru-baru ini di Komite Pertama PBB juga menunjukkan sikap positif terhadap Traktat, dengan suara setuju diberikan guna mendukung resolusi Komite Pertama ATT, kecuali pemungutan suara pada tahun 2019 saat negara tersebut tidak berpartisipasi. Sikap Tonga terhadap ATT mencerminkan meningkatnya kesadaran akan kerentanan kawasan tersebut terhadap perdagangan senjata ilegal dan risiko yang ditimbulkannya bagi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan warga negara. Pada tahun 2015, perwakilan Tonga berpartisipasi dalam lokakarya tentang proses ratifikasi dan implementasi ATT, yang dirancang guna meningkatkan kesadaran akan manfaat Traktat. Pada saat itu, Ketua DPR Tonga Tu'ivakano menyatakan keyakinannya bahwa wawasan yang diperoleh dari lokakarya tersebut akan mempercepat upaya Tonga untuk bergabung ke dalam ATT (Tonga, 2015). Terdapat kekhawatiran apabila tidak bergabung dengan ATT, Tonga berpotensi menjadi titik transit perdagangan senjata ilegal, sehingga menggarisbawahi urgensi tindakan guna mengurangi risiko tersebut (Matangi Tonga Online, 2016). Terlepas adanya pengakuan ini serta kurangnya hambatan substantif menuju akses, pemerintah belum juga memprioritaskan bergabung dengan perjanjian pengendalian senjata konvensional. Hal ini mengindikasikan terbatasnya prospek Tonga untuk segera bergabung dengan ATT.

Tuvalu

Tuvalu menunjukkan komitmennya terhadap pengendalian senjata dengan bergabung dalam Konvensi Pelarangan Ranjau dan ATT. Ia menampakkan dukungan kepada ATT sejak

awal. Tuvalu memberikan suara untuk mendukung teks Traktat selama negosiasi dan menandatangani pada hari penandatanganan dibuka. Tuvalu kemudian meratifikasi Traktat tersebut pada tahun 2015, menyusul upaya bantuan yang dikoordinasikan oleh OMS regional, termasuk Melanesian Spearhead Group dan Pacific Small Arms Action Group, sebuah jaringan yang dikoordinasikan oleh CAVR. Tuvalu telah menyerahkan laporan awal ATT yang bersifat rahasia, dan laporan nihil tahunan untuk tahun 2017 dan 2018. Tidak ada laporan tahunan berikutnya yang diserahkan (CAVR, 2024).

Vanuatu

Vanuatu menunjukkan posisi yang proaktif terhadap pengendalian senjata, sebagaimana digambarkan melalui kepatuhannya terhadap Kovensi Pelarangan Ranjau dan penandatanganan ATT pada tahun 2013. Kerangka kerja hukum Vanuatu yang mengatur pengendalian senjata, utamanya Undang-Undang Senjata Api (Vanuatu, 1988), dikenal dengan sifatnya yang restriktif. Kerangka kerja ini secara efektif berfungsi sebagai daftar pengendalian *de facto*, membatasi berbagai jenis senjata dan amunisi, termasuk senjata api otomatis dan semi-otomatis, di samping pistol, revolver, dan senjata api berkaliber khusus, serta amunisi.

Jalan menuju ratifikasi ATT di Vanuatu maju dengan kecepatan yang diinginkan, sesuai dengan maksud negara tersebut untuk menjamin adanya konsultasi nasional yang komprehensif dan membangun kapasitas yang cukup bagi implementasi Traktat. Akses Traktat oleh Vanuatu mungkin mencegah peredaran senjata ilegal, khususnya melalui jalur maritim (Cullwick, 2016). Meskipun menghadapi tantangan dan gangguan kapasitas akibat Covid-19, Vanuatu telah membuat kemajuan yang signifikan dalam upaya konsultasi dan pelatihan, yang menunjukkan ketiadaan penolakan politis tertentu terhadap akses ATT. Melihat ke depan, jalan Vanuatu menuju bergabung dengan ATT tampak lancar, mengingat sistem pengendalian senjatanya yang memang sudah ketat. Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan bantuan teknis dari OMS dan dorongan baru untuk advokasi nasional, Vanuatu dapat mengakses Traktat tanpa kendala yang berarti (CAVR, 2024).

Asia Tenggara⁶⁴

Signifikansi strategis dan geopolitik Asia Tenggara dalam perdagangan senjata global dibentuk oleh konteks historisnya, tantangan keamanan saat ini, dan dinamika politik global yang terus berkembang. Subkawasan ini, yang secara historis menjadi pusat berbagai konflik mulai dari perjuangan kolonial hingga dampak perang dunia, kini berada di persimpangan kekuatan global yang sedang berkembang, seperti Tiongkok, India, dan Rusia. Transisi ini berdampak langsung pada sikap Asia Tenggara terhadap pengendalian senjata dan ATT. Dekolonisasi pasca-Perang Dunia II dan tanggungan beban konflik bersenjata telah menyebabkan beberapa negara di kawasan tersebut mengadopsi pendekatan yang ketat terhadap kepemilikan senjata, dengan beberapa negara menerapkan larangan nyaris total terhadap kepemilikan senjata api sipil.

Tabel 5 Keanggotaan ATT di Asia Tenggara sejak Juni 2024

Negara	Status	Tanggal
Filipina	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 22 Juni 2022
Kamboja	Penanda tangan	18 Oktober 2013
Malaysia	Penanda tangan	26 September 2013
Singapura	Penanda tangan	5 Desember 2014
Thailand	Penanda tangan	25 November 2014
Brunei	–	–
Indonesia	–	–
Laos	–	–
Myanmar	–	–
Timor Leste	–	–
Vietnam	–	–

Sumber: Sekretariat ATT (2024c)

Aliansi dan pengaruh geopolitik Asia Tenggara—mulai dari afiliasi dengan negara adikuasa global, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga tantangan keamanan regional, seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan dan krisis di Myanmar—mencerminkan faktor-faktor yang membentuk keterlibatannya dengan ATT. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini telah menjadi pasar yang signifikan dalam perdagangan senjata global di tengah ancaman keamanan internal dan regional yang terus berlanjut, yang menekankan peran ganda negara-negara Asia Tenggara sebagai importir dan eksportir perangkat keras militer. Akses ATT oleh Cina pada tahun 2020 dan peningkatan perannya sebagai pemasok senjata yang menawarkan opsi militer yang mudah diakses dan terjangkau, disertai upaya modernisasi militer yang sedang berlangsung di seluruh kawasan, dapat memicu perubahan dalam cara negara-negara Asia Tenggara memandang partisipasi mereka dalam ATT (lihat Tabel 5).

Dalam satu dekade terakhir, upaya bantuan yang besar diarahkan ke negara-negara Asia Tenggara guna mendukung akses mereka ke ATT berikut penyesuaian. Organisasi seperti Expertise France, BAFA, dan UNRCPD, serta mekanisme pendanaan, seperti UNSCAR dan VTF, termasuk berbagai mitra pelaksana, memainkan peran penting dalam inisiatif ini. Upaya ini mencakup spektrum kegiatan yang luas, termasuk advokasi, pengembangan kapasitas, bantuan teknis dan hukum, dan pengembangan RAN. Upaya ini terdiri dari kampanye kesadaran dan advokasi nasional untuk domestikasi ATT, promosi ratifikasi ATT, dan implementasi UN PoA melalui pengembangan kapasitas dan berbagi praktik unggulan. Misalnya, lokakarya dan diskusi meja bundar diselenggarakan

guna memahami hambatan dan rintangan menuju universalisasi ATT di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Proyek bantuan hukum dilakukan oleh UNRCPD guna mendukung implementasi UN PoA dan ATT di Kamboja, Timor Leste, dan Filipina. Lebih jauh, VTF dan UNSCAR juga melakukan inisiatif, seperti pengembangan kursus pelatihan tentang kebijakan perizinan, investigasi, dan penegakan hukum, serta penguatan keterlibatan antarlembaga menuju kerja sama multilateral terkait regulasi senjata konvensional. Proyek-proyek khusus kawasan, seperti proyek yang mempromosikan transparansi persenjataan melalui pelaporan UNROCA di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) atau menangani kekerasan bersenjata dan perdagangan senjata kecil ilegal dari perspektif gender, turut menggambarkan pendekatan multilevel dari upaya-upaya ini (UNODA, 2024b).⁶⁵

Brunei

Brunei memiliki keterlibatan dalam perdagangan senjata global yang terbatas, di samping perdagangan senjata juga tidak dianggap sebagai masalah yang signifikan di wilayah tersebut. Kepemilikan dan transfer senjata di negara tersebut tunduk pada undang-undang domestik yang ketat.

Selama negosiasi ATT, Brunei mempertahankan posisi yang tertutup dan selaras dengan pernyataan kolektif ASEAN tanpa melakukan intervensi secara mandiri. Pengakuan Brunei atas ancaman yang ditimbulkan oleh transfer senjata kecil dan senjata ringan internasional secara ilegal (Holtom dan Parker, 2016) mengisyaratkan sikap yang mendukung prinsip-prinsip dasar ATT—meskipun tidak secara khusus merujuk pada Traktat itu sendiri. Hingga saat ini, Brunei belum bergabung dengan ATT. Kurangnya keterlibatan negara tersebut di dalam forum dan instrumen PBB yang berkenaan dengan ATT berasal dari kurangnya relevansi yang dirasakan bagi kebutuhan keamanan nasional serta tantangan dalam menunjukkan bahwa ATT sendiri efektif dalam menangani pengalihan (NISEA, 2024). Akibatnya, ATT belum menjadi hal yang penting di level nasional, yang akhirnya mendorong kurangnya partisipasi aktif dari pihak berwenang, terlepas dari apakah Brunei cenderung mendukung atau menentang ATT. Selain itu, kekhawatiran terkait pengalihan dan perdagangan senjata ilegal dalam konteks ATT tidaklah sepenting isu-isu lain bagi Brunei, seperti lingkungan, pengurangan risiko bencana, dan sumber daya alam. Bagi Brunei, ‘ASEAN merupakan jantung keterlibatan multilateral Brunei dalam domain Pertahanan dan Keamanan, dan khususnya dari perspektif Pertahanan’ (Brunei, 2021). Akibatnya, Konvensi Pelarangan Ranjau atau TPNW tampaknya dianggap oleh Brunei memiliki kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut daripada ATT.

Pengendalian domestik Brunei yang ketat terhadap senjata dan amunisi, ditambah dengan keterlibatan dalam perdagangan senjata ilegal yang terbatas, membentuk persepsi negara tersebut bahwa ATT adalah prioritas nasional yang rendah. Selain itu, persepsi bahwa keterlibatan ASEAN cukup untuk mengatasi urusan pertahanan dan keamanan Brunei semakin melemahkan insentif untuk mengakses Traktat tersebut.



Penduduk desa menanam padi dengan dipersenjatai senapan untuk mempertahankan desa mereka dari serangan ISIS di Datu Piang, Filipina, September 2018. Sumber: Getty Images/Jes Aznar

Filipina

Filipina berperan aktif dalam perdagangan senjata global sebagai eksportir signifikan senjata kecil dan amunisi di kawasan Indo-Pasifik. Filipina juga merupakan salah satu negara di kawasan yang paling terdampak oleh perdagangan senjata akibat karakter kepulauannya, garis pantai yang panjang, pengalihan dari persediaan nasional, dan aktivitas perdagangan oleh aktor non-negara (Global Organized Crime Index, n.d.b). Langkah menuju ratifikasi ATT di Filipina merupakan perjalanan yang rumit akibat pengaruh berbagai faktor, seperti prioritas pemerintah, kesenjangan pengetahuan tentang implikasi Traktat, dan lobi oleh industri senjata.

Selama fase persiapan dan negosiasi ATT, Filipina menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi, yang ditunjukkan melalui penyelenggaraan beberapa pertemuan regional dan kontribusi aktif dalam dialog yang dirancang untuk membentuk Traktat. Pendirian Filipina, sebagaimana disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selama fase negosiasi, menekankan pada hak dasar negara untuk memperoleh senjata demi kebutuhan pertahanan diri dan keamanan yang sah tanpa pembatasan internasional. Melalui intervensinya, Filipina secara konsisten mengadvokasi kerangka Traktat yang menghormati kedaulatan negara, hak membela diri, dan pembangunan sosial-ekonomi negara, yang menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa ATT selaras dengan kepentingan nasional dan regional (Holtom dan Parker, 2016).

Setelah menandatangani Traktat di tahun 2013, proses ratifikasi Filipina menemui perlawanan karena prioritas pemerintah yang berbeda, kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan dampak ATT, dan penolakan dari para pelobi senjata (Cruz-Ferrer and Lubang, 2022); namun, advokasi dan partisipasi OMS sejak 2003, di samping keperluan mendesak yang ditandai oleh pengepungan Marawi di tahun 2017,⁶⁶ mendorong pembahasan nasional akan perlunya Traktat tersebut. Dampak signifikan dari pengepungan oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Islamic State, yang menunjukkan kemampuan kelompok bersenjata untuk mengumpulkan ratusan senjata, menegaskan kembali kebutuhan yang mendesak akan pengendalian senjata yang lebih ketat –tujuan utama dari ATT (Austero and Gorospe, 2019).

Ratifikasi Traktat oleh Presiden Duterte, bersama dengan persetujuan Senat, pada tahun 2022—setelah pertimbangan yang panjang dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah dan OMS—merupakan langkah signifikan menuju pembinaan kerja sama internasional, penguatan regulasi nasional, dan pertukaran informasi intelijen di antara negara-negara pihak (Cruz-Ferrer dan Lubang, 2022). Semua otoritas pemerintah yang relevan menyerahkan kertas posisi yang mendukung ratifikasi Traktat. Setiap lembaga atau otoritas menguraikan tantangan yang mereka hadapi dalam kegiatan impor dan ekspor, mengindikasikan di mana kontrol lebih lanjut akan diperlukan, dan memberikan proposal konkret guna mengatasi tantangan ini. Ratifikasi Traktat yang berhasil menjadi tonggak penting bagi Filipina dan merefleksikan pendekatannya terhadap ratifikasi Traktat yang melibatkan: peningkatan kesadaran nasional; pembangunan kapasitas nasional; dan penanganan masalah industri persenjataan (NISEA, 2024).

Sejak 2015, Filipina telah menerapkan Undang-Undang Manajemen Perdagangan Strategis (STMA), yang menyediakan kerangka hukum untuk menerapkan sebagian besar kewajiban ATT. Negara tersebut telah mendirikan Kantor Perdagangan Manajemen Strategis di dalam Departemen Perdagangan dan Kemitraan, yang mengawasi penerapan STMA dan Peraturan Pelaksanaannya (Filipina, 2020). Selain itu, Filipina telah menerima bantuan dan kegiatan penjangkauan dari VTF, Program Pendanaan ATT, Sekretariat ATT, UNSCAR, dan Program Penjangkauan ATT UE, serta donor bilateral.⁶⁷ Negara tersebut berpartisipasi dalam lokakarya regional di Jakarta guna mempromosikan ATT di kawasan ASEAN pada Mei 2023 dan menegaskan kembali komitmennya dalam memajukan universalisasi ATT di kawasan tersebut. Langkah yang diambil negara tersebut mencakup berbagi inisiatif peningkatan kesadaran nasionalnya, kerangka hukum domestiknya guna mendukung negara lain dalam membangun infrastruktur kebijakan dan peraturan yang konsisten dengan ATT, dan pengalamannya sendiri dengan proses ratifikasi ATT (Filipina, 2023).

Lebih lanjut, Filipina mengambil peran proaktif pada inisiatif untuk mengatur senjata lainnya di tingkat kawasan. Kantor Utusan Khusus untuk Kejahatan Transnasional Filipina, bersama dengan NISEA dan dukungan UNSCAR, memprakarsai Peta Jalan Kawasan untuk Pengaturan Senjata di Asia-Pasifik. Diluncurkan pada Desember 2023, peta jalan tersebut merupakan hasil dari lima tahun konsultasi antara negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk anggota ASEAN, Bangladesh, India, Nepal, dan Sri Lanka. Bertujuan mengharmonisasi peraturan nasional terkait senjata, peta jalan tersebut mencakup ragam prioritas dan tantangan yang luas; melibatkan perwakilan masyarakat sipil secara aktif

(termasuk melalui pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender); dan menangani pengaturan perantaraan senjata, transfer senjata yang transparan, dan memerangi perdagangan ilegal (Phillipines, 2024).

Indonesia

Setelah pencabutan embargo AS pada tahun 2005, Indonesia tidak hanya meningkatkan impor senjatanya, tetapi juga berupaya menjadi produsen senjata yang mandiri (Stanley-Lockman, 2019). Negara ini telah beralih ke berbagai sumber untuk pengadaan senjatanya, termasuk kesepakatan dengan Prancis terkait pesawat tempur—yang menggambarkan pendekatan pragmatis guna memperkuat kapasitas pertahanannya sembari menavigasi sensitivitas geopolitik, terutama dengan mitra dagang utama, seperti Tiongkok (Wezeman, P.D., Gadon, dan S.T. Wezeman, 2023). Indonesia telah aktif dalam lanskap persenjataan global, baik sebagai importir maupun eksportir senjata kecil.

Selama tahap awal negosiasi ATT, Indonesia memosisikan dirinya sebagai advokat vokal untuk kedaulatan negara dan hak membela diri dengan menyatakan bahwa perdagangan senjata untuk tujuan membela diri harus tetap tidak terganggu. Negara ini menekankan kekhawatiran akan potensi Traktat dalam membatasi kemampuan negara untuk memperoleh, memproduksi, dan mentransfer senjata konvensional dengan menekankan pentingnya menjaga integritas teritorial dan hak untuk mengembangkan industri pertahanan. Sikap Indonesia, yang ditegaskan kembali pada tahun 2023, merupakan perwujudan aspirasinya akan Traktat yang 'seimbang', yang tidak akan secara tidak proporsional memberdayakan negara pengekspor dengan mengorbankan hak importir (Indonesia, 2023). Sejak berlakunya ATT, Indonesia belum bergabung dengan Traktat tersebut, tetapi telah menggarisbawahi, bersama dengan negara-negara lain, bahwa ATT sendiri tidak cukup untuk membatasi proliferasi dan pengalihan senjata ilegal.

Dengan mengutamakan kerja sama regional dan transparansi, Indonesia menekankan pentingnya pengalaman bersama dan kerja sama regional (Indonesia, 2023), serta menunjukkan bahwa negara tersebut 'lebih memilih untuk terlibat dengan negara-negara di Asia Tenggara baik secara bilateral maupun regional dalam mengatur dan memantau transfer senjata dalam kawasan' (NISEA, 2024). Seperti negara-negara lain di subkawasan tersebut, Indonesia mengutamakan upaya penanggulangan terorisme dan antipenyelundupan, mengingat pengalaman negara tersebut dengan beberapa peristiwa keamanan nasional. Misalnya, di bawah kepemimpinan Indonesia, Rencana Aksi ASEAN–PBB untuk Menerapkan Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2021–25) menyebutkan langkah strategis terkait penyelundupan senjata dan perjanjian pengendalian senjata (ASEAN, 2021). Dukungan Indonesia terhadap Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan Penyelundupan Senjata pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-17 tentang Kejahatan Transnasional yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Indonesia, pada tanggal 21 Agustus 2023, turut membantu pengadopsiannya, dan menunjukkan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN tengah bekerja keras dalam berbagai upaya pengendalian senjata di tingkat internasional dan regional.

Kamboja

Kamboja merupakan negara pengimpor senjata kecil dan pengekspor amunisi aktif di subkawasan Asia Tenggara dengan undang-undang dalam negeri yang sangat ketat yang melarang impor senjata untuk alasan apa pun selain pertahanan nasional. Meskipun Kamboja bukan merupakan tempat transit, sebagai negara yang terkurung daratan dengan beberapa negara tetangga, negara ini menghadapi tantangan pengendalian senjata yang lebih besar. Kamboja melarang kepemilikan senjata api oleh warga sipil dan memiliki undang-undang serta peraturan yang berbeda tentang senjata api (NISEA, 2024). Namun, perdagangan gelap merupakan tantangan yang terus berlanjut.

Kamboja adalah pendukung kuat ATT saat berbagai OMS, yang dipimpin oleh jaringan Kelompok Kerja Pengurangan Senjata, mulai mendorong negara untuk mensponsori Traktat tersebut pada tahun 2001–03. Selama negosiasi ATT, Kamboja memperjuangkan Traktat tersebut dan menjadi salah satu dari tiga negara pertama yang secara terbuka memberi dukungan, bersama Mali dan Kosta Rika (Green dan Macdonald, 2015). Dukungan vokal Kamboja berlanjut melalui proses negosiasi hingga penandatanganan Traktat pada tahun 2013. Pada tahun-tahun berikutnya, keterlibatan langsung Kamboja dalam universalisasi Traktat terlihat menjadi lebih moderat, yang dipengaruhi oleh sumber daya dan personel yang terbatas –terlepas ia menerima kunjungan presiden CSP4 guna membahas universalisasi (ATT Secretariat, 2018b). Justru sejak tahun 2020, Kamboja telah memfokuskan upayanya dalam meningkatkan kapasitas nasional terkait regulasi perdagangan senjata. Misalnya, pada tahun 2020, Direktorat Jenderal CAMCONTROL, di bawah mandat Kementerian Perdagangan bidang pengendalian impor dan ekspor, direstrukturisasi menjadi Direktorat Jenderal Persaingan Pelindungan Konsumen dan Penindakan Penipuan. Sejak penunjukan menteri kabinet yang baru, Kamboja telah berupaya memperbarui undang-undangnya guna memenuhi kebutuhan negara yang terus berkembang, termasuk undang-undang yang mencakup pengendalian perdagangan dan regulasi senjata (NISEA, 2024). Namun, kantor-kantor yang diamanatkan untuk melaksanakan ATT masih terus bertumbuh, dan mungkin tidak memiliki personel yang cukup untuk menangani semua masalah terkait dengan Traktat tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Kamboja menerima kerja sama dan bantuan internasional, serta dukungan pengembangan kapasitas dari serangkaian entitas dan mitra, seperti UNRCPD pada tahun 2022, dan Control Arms melalui pendanaan VTF pada tahun 2023 (ATT Secretariat, 2024e). Meskipun kurangnya kapasitas untuk mengimplementasikan Traktat telah menjadi tantangan bagi Kamboja selama satu dekade terakhir, termasuk perampangan kebijakan dan struktur nasional, tantangan utama negara saat ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah personel yang bekerja pada penerapan ATT. Kamboja berupaya untuk menambah jumlah personel dengan keahlian pada masalah pengendalian senjata, terutama mengingat peran kepemimpinan negara tersebut dalam adopsi Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan Penyelundupan Senjata (ASEAN, 2023). Namun, memperoleh tingkat keahlian yang diperlukan merupakan proses yang panjang, serta perubahan tata kelola negara setelah pemilihan umum Juli 2023, yang mendorong peran generasi muda dalam pasar kerja dan kabinet, dapat menambah lapisan tantangan lain (NISEA, 2024).

Laos

Informasi dari Laos tentang keterlibatannya dalam perdagangan senjata global masih terbatas, yang menyiratkan jejaknya yang sedikit dan sebagian besar terkait dengan impor senjata kecil. Selain partisipasinya yang relatif rendah dalam negosiasi ATT, negara tersebut juga tidak menyampaikan pandangannya tentang ATT ketika diundang oleh Sekretaris Jenderal dan tidak terlibat dalam CSP. Tren ini sejalan dengan pola regional yang lebih luas dalam ASEAN, ketika posisi kolektif sering kali lebih diutamakan daripada intervensi masing-masing negara anggota di arena diplomatik global. Sejak diadopsinya ATT, Laos belum bergabung dengan Traktat tersebut.

Mirip dengan negara-negara berkembang kecil lainnya di kawasan tersebut, kehati-hatian ini mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan jumlah personel dalam struktur pemerintahan (NISEA, 2024). Tantangan-tantangan ini semakin ditegaskan oleh geografi Laos yang unik karena 'terhubung dengan daratan' (ITA, 2024). Aspek geografis ini, yang dipromosikan oleh Laos guna menonjolkan konektivitas strategisnya, juga membawa tantangan tersendiri dalam memantau transfer senjata, menegakkan pengendalian, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan senjata. Meskipun demikian, Laos diuntungkan oleh berbagai upaya peningkatan kapasitas oleh OMS dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, UNRCPD menyelenggarakan program pelatihan tentang pengendalian senjata kecil yang mengarusutamakan gender, yang menghasilkan lokakarya pada tahun 2022 tentang peninjauan RAN yang relevan dengan pengendalian senjata kecil dan responsif gender.

Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara pengimpor sekaligus pengeksport senjata kecil utama di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun Malaysia memberlakukan larangan total terhadap kepemilikan senjata sipil, negara tersebut juga menghadapi perdagangan senjata dalam jumlah terbatas hingga lumayan, yang sebagian didorong oleh kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan narkoba (Dahari, Idris, dan Othman, 2019).

Malaysia berpartisipasi secara konstruktif dalam seluruh proses negosiasi ATT. Zahid Rastam ditunjuk sebagai fasilitator oleh presiden untuk menyelenggarakan diskusi informal tentang transit atau pemindahan muatan antarkapal (Woolcott, 2014, hlm. 4). Negara tersebut juga mengadvokasikan sebuah Traktat yang akan secara tegas menangani perdagangan senjata ilegal tanpa melanggar hak untuk membela diri yang sah. Kontribusi Malaysia terhadap dialog tersebut digarisbawahi oleh dukungannya terhadap kerangka ATT yang kuat, dan akhirnya menghasilkan suara dukungan untuk teks akhir Traktat tersebut. Malaysia menandatangani ATT pada tahun 2013, tetapi belum meratifikasinya. Meskipun demikian, negara tersebut secara teratur menegaskan kembali komitmennya terhadap tujuan-tujuan ATT dalam berbagai CSP yang telah dihadapinya. Malaysia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas regional,⁶⁸ dan melibatkan negara-negara tetangganya untuk mempromosikan Undang-Undang Perdagangan Strategis negara tersebut sebagai model untuk pengendalian ekspor di Asia

Tenggara. Malaysia juga aktif dalam proses-proses lain, seperti UN PoA (Malaysia, 2023).

Terlepas dari sikap positifnya, Malaysia menghadapi tantangan dalam meratifikasi dan menerapkan ATT, sebagian besar karena dinamika politik internal dan transisi kepemimpinan—negara tersebut telah berganti lima perdana menteri dalam satu dekade terakhir (2014–24). Negara ini juga menghadapi tantangan yang konsisten terkait pemantauan transfer senjata dan penegakan ketentuan Traktat yang efektif. Malaysia harus segera meratifikasi ATT setelah kesulitan yang ditimbulkan oleh transisi kepemimpinan dalam struktur pemerintahan teratasi (NISEA, 2024).

Sikap Malaysia yang menentang transfer senjata ke Israel terkait perang 2023–24 di Gaza, termasuk melarang kapal-kapal Israel berlabuh di pelabuhannya, mencerminkan kekhawatiran negara-negara lain atas kepatuhan eksportir senjata besar terhadap ATT (Chen, 2023a).

Myanmar

Mengingat sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada kepada negaranya, pilihan Myanmar untuk pemasok senjata didasari perhitungan politik yang bertujuan mencegah isolasi sekaligus menghindari ketergantungan yang berlebihan. Negara ini bergantung pada impor karena produksi industri dalam negeri yang tidak memadai. Tindakan penyeimbangan di antara pemasok senjata regional utama, khususnya Tiongkok dan India, yang dilakukan oleh Myanmar bukanlah sekadar strategi guna menghindari dampak sanksi, tetapi juga merupakan pendekatan strategis guna mempertahankan kedaulatan dan otonomi dalam menghadapi konflik internal yang kompleks (Liu, Miao, dan Huan, 2022). Sejak kudeta tahun 2021, Myanmar telah meningkatkan impornya secara signifikan, terutama dari Tiongkok dan Rusia, dengan jumlah di atas USD 1 miliar yang digunakan dalam eskalasi konflik bersenjata melawan pasukan pemberontak yang memerangi pemerintah militer (Chen, 2023b).

Selama negosiasi ATT, Myanmar abstain dari pemungutan suara resolusi tentang adopsi ATT dan belum bergabung dengan Traktat tersebut sejak saat itu. Kurangnya partisipasi Myanmar dalam CSP dan tidak adanya posisi yang tersedia untuk umum terkait Traktat tersebut menunjukkan peran perifer Myanmar dalam pengendalian senjata internasional. Selama CSP9, sebuah acara sampingan membahas dukungan terhadap militer Myanmar dan implikasinya terhadap ATT dan menyoroti kekhawatiran internasional terkait transfer senjata ke negara tersebut (Control Arms dan the EU Delegation to the UN, 2023). Transfer senjata ke Myanmar dari negara-negara pihak, penanda tangan, dan non-negara pihak ATT yang tengah terjadi, terlepas adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan eskalasi militer pascakudeta, menggambarkan berbagai intrik geopolitik terkait keterlibatan dengan penguasa militer Myanmar (OHCHR, 2023).⁶⁹

Akibatnya, Myanmar menghadapi tantangan yang signifikan terkait implementasi dan kepatuhan terhadap norma perdagangan senjata konvensional. Pada konteks internal, penyebaran senjata kecil memperparah konflik, kejahatan terorganisasi, dan kekerasan politik. Pada konteks eksternal, transfer senjata dari pemasok utama menyoroti keterbatasan

mekanisme pengendalian senjata global saat ini dalam menghambat aliran ke negara-negara yang berkonflik, terlepas adanya sanksi internasional (AOAV, 2023). Myanmar, yang ‘menyaksikan terjadinya proses demokratisasi sebelum kudeta militer 2021, perlu mengatasi kekhawatiran nasional terhadap legitimasi pemerintahan sembari menangani konflik internal sebelum mempertimbangkan ratifikasi ATT’ (NISEA, 2024).

Singapura

Singapura merupakan partisipan aktif dalam pasar senjata global, terutama sebagai produsen dan eksportir senjata kecil dan amunisi terkait di kawasan. Negara tersebut tidak menghadapi masalah perdagangan senjata ilegal yang signifikan.

Selama negosiasi ATT, Singapura memberikan suara dukungan kepada Traktat. Intervensi Singapura selama fase negosiasi secara konsisten menekankan pentingnya menyerahkan tanggung jawab utama terkait peraturan perdagangan senjata kepada otoritas nasional dan mengadvokasi agar Traktat dapat menghormati kondisi dan keunikan sistem pengendalian masing-masing negara. Singapura menandatangani Traktat di tahun 2014, dan telah secara konsisten menghadiri dan membagikan pengalamannya dalam setiap CSP sembari berkontribusi terhadap inisiatif global lainnya, seperti UN PoA dan Instrumen Internasional untuk Memungkinkan Negara Mengidentifikasi dan Melacak Senjata Kecil dan Senjata Ringan Terlarang Secara Tepat Waktu dan Andal (*International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons/ITI*). Negara tersebut memiliki salah satu rezim pengendalian ekspor senjata yang paling mumpuni di kawasan guna memerangi perdagangan senjata ilegal, seperti tercantum dalam Undang-Undang Pengawasan Senjata, Bahan Peledak dan Senjata (Singapore, 2021); Undang-Undang Pengaturan Impor dan Ekspor (Singapore, 1995); dan Undang-Undang (Pengendalian) Barang Strategis (Singapore, 2002) –yang secara komprehensif mencakup semua ketentuan dan kewajiban di bawah ATT.

Singapura merupakan pusat transit dan pemindahan muatan antarkapal global, serta memiliki industri pertahanan yang besar. Negara tersebut tetap berkomitmen untuk menjamin pengendalian barang-barang strategis. Sebuah contoh yang cukup jelas adalah penuntutan pedagang lokal yang melanggar Undang-Undang Barang Strategis dengan menjual teknologi sensitif –sebuah ‘sistem *multi-beam echo sounder* untuk pemetaan dasar laut—yang pada akhirnya mencapai angkatan laut Myanmar (Devaraj, 2023). Dalam kasus ratifikasi ATT, kepemimpinan Singapura dalam mengatasi perdagangan strategis barang-barang di kawasan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan efektivitas implementasi ATT dan menjadi contoh di tingkat subkawasan.

Thailand

Thailand mengimpor dan mengekspor senjata konvensional. Strategi pertahanan negara tersebut menekankan pentingnya mempertahankan tingkat kemampuan militer tertentu. Dinamika ini semakin diperkuat karena riwayat Thailand sebagai titik transit utama

perdagangan senjata, terutama selama periode kerusuhan sipil di negara-negara tetangganya, seperti Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Thailand terus menghadapi risiko perdagangan senjata yang signifikan.

Sepanjang negosiasi Traktat, Thailand menunjukkan pemahaman mengenai perlunya keseimbangan antara kebutuhan pertahanan negara dan upaya pengendalian senjata internasional. Thailand mendukung ATT dengan mengakui potensi dampak globalnya bagi negara-negara pihak dan non-negara pihak; namun, negara tersebut juga mengemukakan perlunya Traktat guna memastikan hak negara-negara untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, mentransfer, dan menyimpan senjata konvensional guna memenuhi kebutuhan keamanan dan pertahanan mereka sendiri tanpa menambah biaya yang akan memengaruhi perdagangan senjata yang sah.

Thailand menandatangani Traktat tersebut pada tahun 2014, dan, sejak saat itu, secara konsisten berpartisipasi dan memberikan pidato di CSP. Pada tahun 2015, negara tersebut membentuk subkomite antarlembaga yang bertugas mempersiapkan ratifikasi dan telah menganalisis undang-undang domestik guna memastikan kepatuhan terhadap ATT (Thailand, 2023). Kerangka hukum saat ini mencakup ketentuan terkait daftar pengendalian nasional, produksi, ekspor, impor, transit, pemindahan muatan antarkapal, dan penilaian ekspor, termasuk pencegahan pengalihan. Pada saat penulisan ini, diskusi tengah berlangsung guna memastikan pengendalian perantara (BAFA, 2024). Thailand mengakui relevansi ATT, mendorong sinergi dengan instrumen internasional lainnya seperti ITI, dan secara teratur berupaya meningkatkan kerja sama internasional dengan mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kapasitas dan berbagi pengalaman selama bertahun-tahun (Thailand, 2023).⁷⁰

Thailand sudah menerapkan beberapa ketentuan Traktat. Tantangan utama menuju ratifikasi berhubungan dengan pembaruan undang-undang nasional, identifikasi kemungkinan titik fokus nasional untuk implementasi Traktat, dan penanganan ketidakpastian atas proses ratifikasi internal. Tantangan kepatuhan yang mungkin terjadi mencakup pelaporan tahunan, memastikan keahlian berbagai lembaga yang menerapkan ATT dan implementasi yang efektif, serta menerima kerja sama multilateral dan bilateral guna membangun kapasitas (BAFA, 2024). Melakukan rekonsiliasi antara kepentingan industri pertahanan dan kewajiban Traktat juga merupakan kunci. Dalam pemungutan suara resolusi UNGA yang mendesak negara anggota untuk ‘mencegah aliran senjata’ ke Myanmar, suara anggota ASEAN terbagi: empat dari sepuluh anggota –Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand—memilih abstain (Bangkok Post, 2021). Lebih jauh, perdagangan dan penyelundupan senjata juga menimbulkan tantangan beserta konflik bersenjata internal di Thailand selatan, mengingat posisi geografis dan riwayat Thailand sebagai pusat transit kawasan.

Timor Leste

Timor Leste merupakan negara yang terbentuk oleh riwayat yang penuh gejolak, khususnya terkait perjuangan meraih kemerdekaan (1975–99) dan periode konflik internal setelahnya selama masa transisi (1999–2012) (Sugito dan Anam, 2022). Latar belakang sejarah negara

tersebut mendorong sikap pemerintah yang sangat mendukung adanya peraturan terkait kepemilikan senjata oleh warga sipil yang ketat, yang pada prinsipnya mengarah pada pelarangan nyaris total (NISEA, 2024). Kebijakan ini menegaskan upaya Timor Leste untuk menjaga perdamaian dan memastikan keamanan internal dengan memprioritaskan pencegahan segala bentuk kekerasan bersenjata yang dapat mengganggu usahanya membangun kembali negara.

Selama negosiasi Traktat, Timor Leste menunjukkan sikap positifnya dengan memberikan suara mendukung kepada resolusi UNGA terkait teks ATT. Namun, sejak saat itu, Timor Leste belum bergabung dengan Traktat tersebut maupun terlibat dalam CSP. Berkaca pada perjanjian senjata konvensional lainnya, Timor Leste hanya menyetujui Konvensi Pelarangan Ranjau (UNRCPD, t.t.). Meskipun demikian, Timor Leste beberapa kali terlibat dengan badan-badan PBB guna mendapatkan bantuan teknis terkait ATT dan berpartisipasi dalam diskusi regional serta internasional terkait subjek tersebut. Secara khusus, pada bulan Mei 2022, menteri luar negeri dan kerja sama Timor Leste terlibat dengan UNRCPD dalam sesi pelatihan mengenai gender dan pengendalian senjata kecil, serta dalam lokakarya tentang mekanisme koordinasi nasional dan RAN terkait senjata kecil dan senjata ringan (UNRCPD, 2020b).

Meskipun Timor Leste mendukung ATT dan prinsip-prinsip yang melandasinya, negara tersebut menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikan Traktat tersebut secara penuh, termasuk dalam membangun kapasitas kelembagaan yang diperlukan guna menegakkan ketentuan-ketentuan Traktat secara efektif. Beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, Timor Leste mungkin harus menggandakan upayanya dalam menghubungkan prioritas nasional dengan tujuan ATT, sembari menangani prioritas nasional mendesak lainnya, termasuk kerentanan iklim.

Vietnam

Pendekatan Vietnam terhadap perdagangan senjata sangat dipengaruhi oleh konteks historisnya yang ditandai dengan periode konflik berkepanjangan dan upaya membangun pertahanan dan keamanan nasional di era pascaperang. Hal ini melahirkan rezim yang sangat ketat terhadap kepemilikan senjata oleh warga sipil. Vietnam kini menjadi importir dan eksportir terbatas untuk senjata kecil dan telah mengembangkan industri pertahanan nasionalnya. Strategi pertahanan negara tersebut, yang bertujuan untuk memodernisasi kekuatan militer dan mendiversifikasi sumber persenjataan guna menghindari ketergantungan, menegaskan tujuan yang lebih luas demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional (Guarascio dan Vu, 2022; Stanley-Lockman, 2019).

Keterlibatan Vietnam dalam negosiasi ATT ditandai dengan partisipasi yang hati-hati. Meskipun tidak menyampaikan posisi resmi sebagai tanggapan atas undangan Sekretaris Jenderal, Vietnam menunjukkan pandangannya melalui intervensi yang menggambarkan keprihatinan yang serupa dengan negara-negara lain di subkawasan tersebut. Vietnam menyatakan kekhawatiran mengenai dimasukkannya transfer teknologi dalam lingkup ATT (yang akhirnya tidak diadopsi), mengingat hal itu dapat berdampak buruk pada pembangunan

nasional. Negara tersebut (dengan sukses) mengusulkan pengecualian pembangunan sosial-ekonomi, korupsi, dan pengurangan kemiskinan dari kriteria penilaian ekspor ATT, serta menggarisbawahi bahwa isu-isu ini lebih baik ditangani dalam proses internasional yang terpisah. Vietnam menekankan pentingnya kedaulatan, integritas teritorial, dan non-intervensi dalam urusan internal negara, dan menyuarakan kekhawatiran bahwa ATT dapat membatasi akses negara terhadap senjata yang diperlukan untuk membela diri dan kebutuhan keamanan yang sah (Holtom dan Parker, 2016).

Hingga saat ini, Vietnam bukanlah negara pihak maupun penanda tangan ATT, dan tanpa keterlibatan dalam CSP. Vietnam juga belum menyetujui perjanjian senjata konvensional lainnya. Meskipun demikian, Vietnam telah terlibat dalam inisiatif bantuan teknis. Negara tersebut juga telah dengan jelas menunjukkan bahwa pengendalian senjata dan peraturan perdagangannya yang ketat secara efektif menghambat proliferasi ilegal, baik senjata maupun barang, sehingga mengurangi insentif untuk bergabung dengan ATT.⁷¹ Masalah terkait perdagangan lintas batas negara di luar ASEAN juga menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap Traktat. Meningkatkan kapasitas negara dalam mengatur perdagangan senjata merupakan prioritas, terutama mengingat meningkatnya konflik bersenjata di dunia, serta ketegangan geopolitik akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan (Hunnicutt dan Bose, 2023; NISEA, 2024).

Asia Timur

Ketegangan dan masalah keamanan yang beragam menjadi ciri khas subkawasan Asia Timur—termasuk situasi yang tidak stabil di semenanjung Korea, klaim yang saling bertentangan di Laut Tiongkok Selatan, dan meningkatnya ketegangan atas Taiwan, Tiongkok. Di tengah berbagai masalah regional ini, Asia Timur menjadi tuan rumah bagi para aktor penting dalam perdagangan senjata global. Hal ini mencakup Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, yang merupakan negara-negara yang diakui sebagai produsen dan eksportir senjata utama; Mongolia, yang sebagian besar merupakan importir senjata; dan Korea Utara, yang masih terisolasi dan sudah menjadi sasaran embargo PBB sejak 2006. Dalam konteks ini, sikap negara-negara di Asia Timur terhadap ATT berbeda-beda (lihat Tabel 6). Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan menjadi negara pihak ATT, sejalan dengan tujuannya untuk mengatur perdagangan senjata internasional. Sebaliknya, Mongolia, meskipun telah menandatangani Traktat pada September 2013, belum juga melanjutkan ke ratifikasi, yang kemungkinan mencerminkan keraguan atau tantangan dalam menyelaraskan undang-undang nasionalnya dengan ketentuan Traktat. Korea Utara secara khusus memosisikan dirinya berlawanan dengan Traktat tersebut dengan memberikan suara menentang resolusi selama negosiasi.

Upaya penjangkauan menuju universalisasi dan kepatuhan di subkawasan tersebut terbatas, mengingat fakta bahwa sebagian besar negara di Asia Timur merupakan negara pihak ATT. Dalam beberapa tahun terakhir, Mongolia memperoleh manfaat dari upaya peningkatan kapasitas yang ditujukan untuk merampingkan dan memperkuat implementasi UN PoA dan memfasilitasi akses ATT. Sejak tahun 2004 dan setelahnya, Saferworld juga

melakukan berbagai kegiatan dengan mitra Tiongkok guna meningkatkan kesadaran tentang ATT (Saferworld, 2020).⁷²

Tabel 6 Keanggotaan ATT di Asia Timur sejak Juni 2024

Negara	Status	Tanggal
Jepang	Negara pihak (penerimaan)	Sah berlaku: 24 Desember 2014
Korea Selatan	Negara pihak (ratifikasi)	Sah berlaku: 26 Februari 2017
Tiongkok	Negara pihak (aksesi)	Sah berlaku: 4 Oktober 2020
Mongolia	Penanda tangan	24 September 2013
Korea Utara	–	–

Sumber: Sekretariat ATT (2024c)

Jepang

Pendekatan Jepang terhadap perdagangan senjata secara historis dicirikan oleh pengendalian ekspor yang ketat dan penekanan kuat pada perdamaian dan keamanan, yang didukung oleh konstitusi pasifisnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, negara tersebut telah mempertahankan pelarangan ekspor senjata secara mandiri (ATT Monitor, 2018) yang kemudian dilonggarkan pada tahun 2014 setelah penerapan 'Tiga Prinsip Transfer Perlengkapan dan Teknologi Pertahanan', sehingga memungkinkan transfer perlengkapan dan teknologi pertahanan ke luar negeri dalam kasus-kasus yang sangat terbatas dan spesifik (Jepang, 2014). Pergeseran ini memungkinkan sikap yang lebih proaktif dalam berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas melalui sektor pertahanan internasional, sembari tetap mempertahankan komitmen non-agresi (Foster, 2023; Yasutomo dan Ishigaki, 2017). Selanjutnya, pada tahun 2024, kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida menyetujui pedoman baru untuk melonggarkan 'Tiga Prinsip', yang pada akhirnya mengizinkan ekspor senjata mematikan yang diproduksi oleh Jepang bersama negara lain (Japan Times, 2024).

Sepanjang negosiasi ATT, Jepang secara aktif berkontribusi pada pengembangan Traktat dan beralih dari 'diplomasi perdamaian' menuju 'pasifisme proaktif'. Pendekatan ini selaras dengan prinsip panduan Strategi Keamanan Nasional pertama Jepang—konsep 'Kontribusi Proaktif untuk Perdamaian', yang diperkenalkan oleh pemerintahan Abe pada tahun 2013 (Sasaki, 2023; Yasutomo dan Ishigaki, 2017). Jepang merupakan salah satu sponsor pendamping untuk resolusi pertama UNGA tentang traktat perdagangan senjata pada tahun 2006. Strategi negosiasi negara tersebut menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan traktat. Keterlibatan ini menunjukkan pergeseran strategis menuju diplomasi yang lebih tegas dan normatif—dimediasi melalui kemitraan yang erat dengan para aktor masyarakat sipil, khususnya

Control Arms, Stimson Center, dan SIPRI—serta fokus untuk menjembatani kesenjangan di antara perspektif negara yang berbeda (Yasutomo dan Ishigaki, 2017).

Sejak menjadi negara pihak ATT pada tahun 2014, Jepang secara konsisten menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Traktat. Hal tersebut mencakup penyerahan laporan tahunan dengan tepat waktu dan partisipasi aktif dalam CSP. Selama bertahun-tahun, Jepang telah mempromosikan universalisasi ATT dengan menjadi tuan rumah diskusi dan merujuk pada diskusi meja bundar di kawasan tersebut terkait universalisasi. Ketika Jepang terpilih menjadi presiden CSP4, CSP berlangsung di Tokyo. Pada CSP5, Jepang memanfaatkan posisinya sebagai wakil ketua KKUT guna mempromosikan universalisasi ATT di Asia-Pasifik. Jepang telah menyelenggarakan diskusi meja bundar tahunan tentang universalisasi sejak saat itu dan menjadi bagian dari Komite Seleksi VTF sejak CSP8 hingga CSP10 (ATT Sekretariat, 2024d). Jepang juga menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam diskusi tematik, termasuk tentang tantangan utama terkait senjata kecil (Japan, 2021). Industri-industri di Jepang menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Traktat tersebut, seperti yang terlihat melalui penangguhan transfer senjata ke Israel oleh perusahaan Jepang Itochu Corporation pada bulan Februari 2024, menyusul perintah dari Mahkamah Internasional terkait warga Palestina di Gaza (ICJ, 2024).

Mongolia

Keterlibatan Mongolia dalam perdagangan senjata global, khususnya dalam aspek impor, memberikan gambaran yang agak khas dalam konteks komitmennya yang lebih luas terhadap kerangka kerja perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai negara yang terkurung di antara dua kekuatan besar (Rusia dan Tiongkok), partisipasi Mongolia dalam perdagangan senjata lebih sejalan dengan kebutuhan pertahanannya daripada ambisi untuk ekspansi atau mendapatkan pengaruh. Pendekatan ini terlihat dari tindakan penyeimbangan Mongolia: kebutuhan untuk mempertahankan kapabilitas pertahanan yang diperlukan, sembari mematuhi prinsip netralitas militer dan mendukung norma-norma internasional yang mempromosikan stabilitas dan perdamaian (Mendee dan Soyolgerel, 2022).⁷³

Selama negosiasi ATT, Mongolia menunjukkan komitmen terhadap tujuan Traktat melalui dukungan suara terhadap rancangan resolusi ATT. Mongolia menandatangani Traktat pada tahun 2013, tetapi menunjukkan sedikit keterlibatan dalam aspek kehadiran atau partisipasi hingga CSP8. Pada tahun 2022, Duta Besar Davaasuren Gerelmaa menegaskan dedikasi Mongolia terhadap tujuan dan sasaran ATT, serta menyoroti peringatan 30 tahun status bebas senjata nuklir Mongolia (Mongolia, 2022).

Mongolia sebagian besar merupakan negara pengimpor yang mengandalkan materiel dari Rusia. Ketergantungan pada impor ini menyoroti potensi tantangan dalam mematuhi ATT. Pengesahan Traktat dianggap akan berimplikasi pada impor dan masalah keamanan nasional, dan karenanya bergantung pada evaluasi positif atas Traktat oleh berbagai lembaga. Mongolia juga memperoleh manfaat dari dukungan internasional, termasuk inisiatif penjangkauan dan peningkatan kesadaran serta kunjungan studi ke Rumania guna mempelajari pengalaman negara tersebut. Upaya ini tepat waktu, mengingat Mongolia

perlu menghindari risiko menjadi titik transit senjata dan materiel penggunaan ganda, serta menunjukkan peningkatan kesadaran dan tindakan terhadap pengendalian senjata.⁷⁴

Korea Utara

Korea Utara berada di bawah embargo PBB sejak tahun 2006 (DK PBB, 2006). Selama fase negosiasi ATT, Korea Utara menyuarakan penolakannya. Keberatannya berpusat pada ketidakseimbangan yang dirasakan ada dalam Traktat tersebut, yang lebih memihak eksportir senjata daripada importir, dan gagal secara khusus melarang transfer ke kelompok pemberontak dan kelompok bersenjata non-negara (Jalil, 2016). Penolakan ini menyebabkan Korea Utara secara resmi menolak adopsi ATT (bersama Iran dan Suriah) pada pemungutan suara pleno Konferensi PBB Akhir tentang ATT dan mencegah tercapainya konsensus. Ketidakpuasan ini menggarisbawahi kekhawatiran yang lebih luas di antara beberapa negara pedagang senjata utama, termasuk Tiongkok, India, dan Rusia, serta menyoroti ketentuan-ketentuan Traktat yang kontroversial berikut tantangan penegakannya (Prizeman, 2013).

Sebagai non-penanda tangan maupun peserta CSP selama bertahun-tahun, Korea Utara tetap berada di luar kerangka kerja sama ATT. Ketidakhadiran negara tersebut tampaknya sejalan dengan strategi yang lebih besar untuk memanfaatkan perdagangan senjata sebagai sumber pendapatan penting sekaligus mempertahankan otonomi strategisnya yang bebas dari pengawasan internasional (Lee, J.M., 2023). Dalam kerangka kerja ATT maupun pelanggaran sanksi PBB yang kian berlanjut, ketidakhadiran yang ditunjukkan oleh Korea Utara menimbulkan rintangan yang signifikan dalam mengurangi risiko terkait senjata ilegal hasil ekspor dari negara tersebut, terutama ke daerah yang terkena dampak konflik (Kim, 2022).

Korea Selatan

Korea Selatan telah berkembang pesat menjadi eksportir senjata yang signifikan; berada di antara sepuluh negara dengan penjualan senjata tertinggi dan mengalami peningkatan ekspor senjata global sebesar 74 persen antara periode 2013–17 dan 2018–22 (Wezeman, P.D., Gadon, dan S.T. Wezeman, 2023). Perluasan ini sejalan dengan ambisi Korea Selatan untuk memperkuat statusnya sebagai pemasok pertahanan global terkemuka dengan bekal kemajuan teknologi industri pertahanan domestik dan penjualan internasional yang signifikan, termasuk ke negara-negara NATO di tengah konflik Ukraina (Lee dan Smith, 2023).

Menjelang aksesinya ke ATT, Korea Selatan menunjukkan komitmennya dalam pengaturan barang dan teknologi sensitif guna memperkuat keamanan nasional dan mencegah penyebaran senjata ke wilayah yang dikhawatirkan, seperti Korea Utara. Penerapan pengendalian ekspor Korea Selatan mengalami percepatan sejak tahun 2007, termasuk melalui pembentukan Institut Perdagangan Strategis Korea (ATT Monitor, 2018; Lee, J., 2013). Korea Selatan menyiapkan landasan untuk ratifikasi ATT dengan berpartisipasi aktif



Karyawan bekerja di jalur perakitan howitzer di pabrik dirgantara di Changwon, Korea Selatan, 16 Maret 2023.
Sumber: Getty Images/Bloomberg/Woohae Cho

dalam rezim pengendalian ekspor multilateral dan mengadvokasi kerangka regulasi yang efisien, termasuk dengan memberikan suara mendukung ATT selama negosiasi UNGA tahun 2013.

Sejak resmi menjadi negara pihak ATT pada tahun 2017, Korea Selatan telah terlibat aktif dalam mekanisme Traktat tersebut, termasuk secara konsisten menyerahkan laporan tahunan yang tersedia untuk umum, dan berpartisipasi serta berbicara di CSP. Di CSP2, misalnya, Korea Selatan menekankan upayanya untuk merevisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri, berikut peraturan pelaksanaannya, setelah berhasil menyelesaikan amandemen yang diperlukan bagi undang-undang dan peraturan nasional tentang perdagangan senjata konvensional sebagai bagian dari proses ratifikasi (Korea Selatan, 2016). Selanjutnya, Korea Selatan secara teratur menegaskan perlunya memberi penekanan yang lebih besar pada aspek kemanusiaan ATT saat membahas isu-isu substansial lebih lanjut, kegiatan universalisasi, dan pentingnya kepatuhan negara terhadap pelaporan dan kewajiban keuangan. Pidato-pidato yang disampaikan merujuk pada kegiatan penjangkauan di kawasan tersebut, termasuk Konferensi Pengendalian Ekspor Internasional 2019 yang diadakan di Korea Selatan—yang mengundang negara-negara non-penanda tangan, para ahli pengendalian ekspor, dan Sekretariat ATT—serta upaya untuk menerjemahkan Perangkat Universalisasi Traktat dan ‘Paket Selamat Datang’ ke dalam semua bahasa ASEAN (ATT Secretariat, 2019a; 2024g; South Korea, 2019). Korea Selatan juga menjadi salah satu ketua KKUT selama siklus CSP9 dan CSP10 dan

menyelenggarakan lokakarya penjangkauan di kawasan ASEAN pada bulan Mei 2023 di Jakarta, Indonesia, sehingga lebih jauh menekankan Asia-Pasifik sebagai area prioritas untuk upaya universalisasi. Menyusul terpilihnya Korea Selatan sebagai presiden CSP9 pada tahun 2023, tema tahunan yang dipilih berfokus pada peningkatan keterlibatan antara industri dan pemangku kepentingan utama ATT lainnya guna saling memperkuat implementasi ATT. Upaya untuk menguniversalisasikan ATT di kawasan Asia-Pasifik tetap menjadi ambisi yang krusial nan menantang, mengingat Korea Selatan berupaya memperluas dampak Traktat tersebut di tengah berbagai dinamika keamanan regional—termasuk hubungannya yang tegang dengan Korea Utara, dan kepentingan strategis lainnya.

Tiongkok

Tiongkok merupakan salah satu pengekspor senjata konvensional utama di kawasan ini dan secara global dengan peningkatan penjualan sebesar 212 persen dari tahun 2004–08 hingga 2009–13 (Wezeman, S.T. and P.D. Wezeman, 2014). Tiongkok mengalami pertumbuhan lebih lanjut sebesar 38 persen antara tahun 2013 dan 2017 (Sharma dan Finaud, 2019). Peningkatan ini menggarisbawahi pengaruh Tiongkok yang semakin meluas dan keberadaannya yang strategis dalam domain ekspor senjata, terutama bagi negara-negara di kawasan yang menerima bagian utama dari ekspor ini (RAND, t.t.).

Pada saat negosiasi Traktat, Tiongkok menunjukkan skeptisisme tentang penggunaan Traktat internasional untuk mengendalikan masalah yang berkaitan dengan pertahanan kedaulatan, serta keberatan atas regulasi hukum hak asasi manusia yang ketat karena sifat subjektif penilaiannya, di antara berbagai kekhawatiran lainnya (Jalil, 2016). Meskipun demikian, seiring berjalannya proses negosiasi, Tiongkok mencabut keberatan teknisnya terhadap Traktat dan memilih untuk abstain dari pemungutan suara UNGA pada tahun 2013 karena ketidakmampuan Traktat untuk mengamankan konsensus (CIP, t.t.; Stavrianakis and Yun, 2014).

Pada tahun 2020, beberapa tahun setelah berlakunya ATT, Tiongkok mengaksesi Traktat tersebut dan mempromosikan multilateralisme dan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap ekspor senjata (China, 2020). Beberapa komentator berpendapat bahwa penarikan diri AS dari komitmen multilateral tertentu, termasuk ATT, turut memberi Tiongkok kesempatan untuk bergabung dengan Traktat dan instrumen multilateral lainnya (Vestner, 2020).⁷⁵ Sebelum bergabung, Tiongkok telah memiliki Undang-Undang tentang Administrasi Senjata Api dan Peraturan tentang Administrasi Ekspor Produk Militer, serta Daftar Pengendalian Ekspor Produk Militer; pada bulan Oktober 2020, Tiongkok mengumumkan Undang-Undang Pengendalian Ekspor yang semakin memperkuat sistem legislatif pengendalian ekspor negara tersebut, termasuk produk militer (China, 2021).

Tiongkok menyampaikan laporan awalnya dan disusul oleh laporan tahunan pada tahun 2021–2023, tetapi tidak menyediakannya untuk umum. Tiongkok juga telah mengirim delegasi setiap tahun guna menghadiri CSP, bahkan sebelum menyetujui ATT, dan melakukan intervensi pada berbagai kesempatan. Negara tersebut telah menggunakan

platform tersebut guna menyampaikan visinya mengenai perdagangan senjata dengan menekankan prinsip-prinsip seperti non-intervensi, perdamaian dan stabilitas regional, serta kemampuan pertahanan diri yang sah bagi negara-negara penerima. Tiongkok juga menekankan prinsip-prinsip ini di forum-forum lainnya (China, 2022) dengan menitikberatkan prioritas-prioritas tertentu, termasuk meningkatkan: universalitas dan efektivitas ATT; interaksi dan koordinasi di antara mekanisme-mekanisme yang relevan terkait pengendalian senjata konvensional dalam kerangka PBB; dan rasa tanggung jawab dalam perdagangan senjata. Tiongkok juga merupakan bagian dari Komite Manajemen VTF pada saat CSP10.

Selama proses ATT, Tiongkok menyoroti upaya bantuan yang diberikan dalam kerangka kerja Organisasi Kerja Sama Shanghai dan Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika, serta pengembangan Inisiatif Keamanan Global (China, 2023). Negara ini memimpin 'Mode Pengiriman Terkendali Shenzhen untuk Memerangi Perdagangan Senjata Api melalui Saluran Pos dan Kurir', sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan tujuh negara: Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Vietnam (China, 2024). Pada bulan Februari 2024, Tiongkok mempresentasikan sistem pengendalian nasionalnya selama pertemuan KKITE (ATT Secretariat, 2024f). Oleh beberapa aktor di komunitas ATT, Tiongkok dianggap memiliki potensi untuk menjadi pemain regional dan subregional dalam upaya universalisasi yang mampu mempromosikan aksi yang lebih proaktif guna meningkatkan partisipasi ATT di kawasan tersebut (China, 2023).⁷⁶ Pada saat artikel ini ditulis, negara tersebut tampaknya belum mengambil peran ini.

Asia Selatan

Asia Selatan adalah subkawasan yang dicirikan oleh realitas dan masalah keamanan yang berbeda, termasuk ketegangan antara India dan Pakistan atas Kashmir, risiko proliferasi senjata dari Afghanistan, warisan konflik di Nepal dan Sri Lanka, dan ketidakamanan di dalam subkawasan akibat maraknya aktor bersenjata non-negara. Subkawasan ini juga memiliki tingkat keanggotaan Traktat yang sangat rendah (lihat Tabel 7) dengan hanya satu negara pihak (Maladewa, yang mengaksesi Traktat pada 26 Desember 2019) dan satu negara penanda tangan (Bangladesh). Sebagai negara terbesar di subkawasan tersebut, India memang abstain pada saat negosiasi ATT. Bagi beberapa negara di kawasan tersebut, pencarian akan Traktat yang lebih seimbang dan mengakomodasi kepentingan negara-negara pengimpor senjata mencerminkan perjuangan yang lebih besar dalam menavigasi interaksi antara upaya pengendalian senjata global dan keamanan regional yang mendesak. Mengatasi masalah keamanan dalam negeri, yang diperparah oleh sensitivitas geostrategis dan warisan sejarah, tampaknya mempersulit proses akses Traktat tersebut.

Berbagai upaya berkelanjutan guna mendukung negara-negara Asia Selatan dalam mengaksesi dan menerapkan ATT telah dilakukan selama bertahun-tahun melalui peran penting beberapa entitas internasional. Inisiatif seperti kampanye kesadaran dan advokasi nasional, penyediaan bantuan teknis dan hukum, serta lokakarya peningkatan kapasitas berlangsung antara tahun 2014 dan 2023. Mekanisme pendanaan seperti UNSCAR juga

mensponsori proyek-proyek yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan bersenjata dan perdagangan senjata ilegal di seluruh Asia Selatan dengan fokus khusus pada penggabungan perspektif gender (UNODA, 2018). UNRCPD, yang berpusat di Kathmandu, juga telah menyelenggarakan lokakarya dan sesi pelatihan yang dirancang khusus guna mempromosikan ATT dan mendukung upaya akses, termasuk di Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal.⁷⁷

Tabel 7 Keanggotaan ATT di Asia Selatan sejak Juni 2024

Negara	Status	Tanggal
Maladewa	Negara pihak (aksesi)	Sah berlaku: 26 Desember 2019
Bangladesh	Penanda tangan	26 September 2013
Bhutan	–	–
India	–	–
Nepal	–	–
Pakistan	–	–
Sri Lanka	–	–

Sumber: Sekretariat ATT (2024c)

Bangladesh

Bangladesh menavigasikan lanskap perdagangan senjata global yang unik dan utamanya ditandai oleh berbagai masalah seputar penyebaran senjata kecil di wilayah perbatasannya. Sisa-sisa senjata dari perang kemerdekaan tahun 1971, produksi senjata api rakitan, dan posisi negara tersebut sebagai koridor penyelundupan senjata api berkontribusi terhadap peredaran lebih dari 200.000 senjata kecil yang memicu kejahatan dan kekerasan terorganisasi (Mustafa, 2005; lihat Kotak 1).

Bangladesh menunjukkan dukungan awal untuk ATT dengan memberikan suara yang berpihak kepada resolusi ATT, serta menjadi negara pertama dari Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (*South Asian Association for Regional Cooperation/SAARC*) yang menandatangani Traktat pada tahun 2013 (Weiss, 2017). Selama negosiasi, Bangladesh sangat menganjurkan agar Traktat mencakup semua jenis transfer dan menyatakan dukungannya untuk keterlibatan OMS dalam seluruh proses PBB (Rahman, 2012). Namun, perjalanannya menuju ratifikasi mengalami stagnasi, yang ditandai oleh delegasi Bangladesh yang hanya menghadiri CSP2 dan CSP6. Sebagai negara penanda tangan, keterlibatan Bangladesh dalam kerangka kerja ATT masih tentatif, dan momentum tampaknya telah berlalu akibat beberapa kemungkinan, termasuk kekhawatiran mendasar tentang dinamika keamanan regional dan kompatibilitas Traktat dengan standar pengendalian nasional.⁷⁸ Meskipun demikian, negara tersebut

menerima dukungan dari UNRCPD pada bulan Juni 2022, termasuk lokakarya gabungan tentang pengendalian senjata kecil yang mengarusutamakan gender dan penyusunan RAN tentang senjata kecil dan senjata ringan.

Kebutuhan akan mekanisme untuk mengatasi aliran gelap dan penyalahgunaan senjata kecil dalam lanskap sosial-politik Bangladesh tetap menjadi perhatian yang mendesak, seperti halnya kelaziman perdagangan senjata kecil. Masalah-masalah tersebut memperburuk kerentanan keamanan Bangladesh, ditambah pula dengan posisinya sebagai rute transit perdagangan senjata kecil. Pengaruh kekuatan regional semakin mempersulit jalur Bangladesh menuju keterlibatan penuh bersama ATT. Hal ini sebagian disebabkan oleh munculnya skeptisisme terhadap ATT di entitas terkuat dalam subkawasan tersebut, yaitu India. Meskipun belum banyak penelitian yang membahas kasus Bangladesh, beberapa studi telah berasumsi bahwa tanpa keterlibatan India dalam Traktat tersebut, memajukan tujuan ATT di subkawasan Asia Selatan berpotensi menimbulkan berbagai tantangan yang signifikan, termasuk di Bangladesh (Weiss, 2017). Kurangnya relevansi yang dirasakan terhadap produksi dan impor militer negara tersebut, ditambah dengan adanya area lain yang lebih diprioritaskan, semakin mengurangi insentif untuk meratifikasi Traktat tersebut.⁹

Bhutan

Terbatasnya interaksi langsung Bhutan dengan perdagangan senjata dipengaruhi oleh ketidakterlibatannya dalam produksi maupun impor senjata konvensional yang signifikan. Sebagai negara kecil yang dikelilingi oleh dua kekuatan besar, Tiongkok dan India, partisipasi Bhutan dalam perdagangan senjata selaras dengan lanskap geopolitik negara-negara tetangganya. Meskipun negara tersebut dipengaruhi oleh prinsip kebahagiaan nasional bruto yang menekankan pada perdamaian dan nirkekerasan, posisi dan keterlibatan khusus Bhutan dalam ATT tampaknya dibentuk oleh prioritas diplomatiknya, termasuk komitmennya untuk menjaga hubungan strategis dengan negara-negara tetangga (Kaul, 2022). Berdasarkan riwayatnya, pendekatan Bhutan bergantung pada undang-undang domestik yang ketat guna mengatur kepemilikan senjata api di wilayah mereka. Kekhawatiran utama negara tersebut terletak pada perdagangan senjata kecil ilegal di sepanjang perbatasannya yang berpori; sebuah tantangan yang diperkuat oleh kedekatannya dengan wilayah yang terkena dampak aktivitas ilegal tersebut (Bhutan, 2016).

Meskipun Bhutan belum menandatangani ATT, suara dukungannya terhadap resolusi ATT di UNGA menunjukkan sikap positif terhadap upaya internasional untuk mengatur perdagangan senjata. Namun, negara itu belum terlibat langsung dalam CSP. Bhutan juga belum memberikan pernyataan resmi di platform ini. Dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada Sekretariat ATT pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri Bhutan menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh dan konsultasi pemangku kepentingan sebelum berkomitmen terhadap perjanjian internasional. Meskipun sangat sedikit dokumentasi yang ada tentang topik ini, tantangan utama Bhutan terkait dengan ATT tampaknya berputar di sekitar penyeimbangan antara komitmen internasionalnya dan kemampuan dan prioritas domestik. Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri



Tentara wanita Pasukan Keamanan Perbatasan India berpatroli di pos terdepan Petrapole di perbatasan India–Bangladesh, India, 20 Oktober 2019. Sumber: Getty Images/NurPhoto/Debjayoti Chakraborty

mengakui pada tahun 2016 bahwa meskipun hukum domestik yang kuat amatlah krusial, kerja sama regional juga penting guna mengatasi masalah internasional seperti senjata terlarang (Bhutan, 2016).

India

Interaksi India dengan perdagangan senjata global memiliki banyak dimensi, yang dicirikan oleh perannya sebagai importir penting dan eksportir senjata konvensional yang sedang berkembang. Secara historis aktif dalam kerangka kebijakan global pelucutan dan pengendalian senjata, kebijakan India telah berevolusi –yang mencerminkan peningkatan statusnya sebagai pembelanja militer global serta kebutuhan untuk mandiri dalam produksi pertahanan (Oxfam, 2006). Sejak 2013, India telah menjadi bagian dari tiga rezim pengendalian ekspor multilateral yang berfokus pada pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal: Ia merupakan salah satu dari tiga negara Asia (bersama dengan Jepang dan Korea Selatan) yang menjadi bagian dari Pengaturan Wassenaar tentang Pengendalian Ekspor untuk Senjata Konvensional dan Barang dan Teknologi Penggunaan Ganda, serta menjadi anggota di Rezim Pengendalian Teknologi Rudal dan Grup Australia (Sharma dan Finaud, 2019).

Meskipun berpartisipasi aktif dalam negosiasi Traktat tersebut, India abstain dari pemungutan suara UNGA untuk adopsi teks ATT karena kekhawatiran terkait keseimbangan kewajiban antara negara pengekspor dan pengimpor senjata. India menyatakan bahwa mereka 'tidak dapat menerima bahwa Traktat tersebut dimanfaatkan sebagai instrumen oleh negara pengekspor untuk mengambil tindakan *force majeure* sepihak atas negara pengimpor tanpa

konsekuensi' (India, 2013). Sifat diskriminatif yang dirasakan dari Traktat ini, beserta persepsi akan kurangnya efektivitas dalam menghambat aliran senjata ilegal ke aktor non-negara, menjadi elemen kunci yang membentuk posisi India terhadap ATT (Sharma dan Finaud, 2019).

Alasan India untuk abstain dari komitmen terhadap ATT tetaplah konsisten. Meskipun bukan negara pihak maupun penanda tangan Traktat tersebut, India mengubah Undang-Undang Senjata India (1959) pada tahun 2019 dan meningkatkan pengendalian dan kategorisasi senjata api dan amunisi mereka (India, 2024). India juga memberlakukan langkah-langkah pengendalian dan penegakan hukum, termasuk penggunaan sertifikat pengguna akhir (Kanwal, 2013). Selama konflik Sri Lanka dengan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), India menolak untuk menyediakan persenjataan ofensif kepada negara tersebut, terlepas permintaan Sri Lanka maupun risiko kehilangan target ekspor senjata ke Tiongkok atau Pakistan, dan hanya memasok peralatan pertahanan seperti senjata pertahanan udara dan radar (Kanwal, 2013).

India menghadapi sejumlah tantangan dalam menavigasi lanskap ATT, termasuk menangani proliferasi senjata kecil ilegal di subkawasan tersebut, mengelola hubungannya yang rumit dengan negara-negara tetangga seperti Pakistan dan Tiongkok di tengah ketegangan keamanan yang tengah berlangsung, dan menyelaraskan ambisi industri pertahanannya dengan norma-norma perdagangan senjata internasional. Namun, sikap India juga berimplikasi ke negara-negara tetangga yang lebih kecil, seperti Bangladesh dan Nepal, yang merupakan pembeli utama peralatan pertahanan India (Sharma dan Finaud, 2019).⁸⁰

Maladewa

Keterlibatan Maladewa dalam perdagangan senjata masih terbatas karena negara tersebut mengimpor senjata—terutama senjata kecil—untuk keperluan pertahanan dan melakukan transfer secara sporadis.⁸¹ Pada tahun 2015, muncul kekhawatiran di dalam negeri perihal meningkatnya serangan teroris menyusul kesepakatan senjata pemerintah untuk gudang senjata pribadi—yang menegaskan perlunya regulasi dan transparansi yang lebih mumpuni dalam perdagangan senjata (Maldives Independent, 2015).

Selama negosiasi ATT, Maladewa memberikan suara dukungan kepada Traktat tersebut. Tindakan Maladewa berikutnya, khususnya aksesi ATT negara tersebut pada tahun 2019, menandai langkah signifikan dalam komitmennya terhadap regulasi perdagangan senjata global. Sejak aksesi, Maladewa telah menyerahkan laporan tahunannya sesuai dengan persyaratan ATT, meskipun laporan-laporan ini, selain laporan tahun 2021, pada umumnya tidak dapat diakses publik.⁸² Partisipasi Maladewa yang konsisten dalam CSP7, CSP8, dan CSP9 menunjukkan keterlibatan dan dukungannya terhadap tujuan-tujuan Traktat tersebut.

Maladewa telah memiliki sistem pengendalian yang kokoh sebelum bergabung dengan ATT.⁸³ Negara tersebut terus mempertahankan serta memperkuat kepatuhan dan keterlibatannya dengan ATT di tengah kekhawatiran akan keamanan yang lebih besar dan terlepas dari biaya yang ditimbulkan oleh partisipasi ATT. Pada bulan Februari 2024, Maladewa berbicara atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (*Organisation of Islamic Cooperation/OIC*) dan dalam kapasitas nasional selama debat pertemuan Kelompok Kerja

CSP10 tentang 'Masalah Implementasi Saat Ini dan yang tengah Berkembang', yang berkaitan dengan perang 2023-2024 di Gaza. Negara tersebut juga berbicara selama konsultasi informal virtual tentang 'Menegakkan Kewajiban Hukum di bawah ATT: Kasus Rakyat Palestina' (Varella, 2024).

Nepal

Keterlibatan Nepal dalam perdagangan senjata global berpusat pada impor, yang sebagian besar bergantung pada dukungan dari India berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan tahun 1950, serta negara-negara lain seperti Amerika Serikat.⁸⁴ Dilihat dari riwayatnya, Nepal telah mengalami dampak destabilisasi akibat senjata kecil, terutama karena gerakan pemberontakan bersejarah, seperti pemberontakan Maois, yang diperparah oleh kegiatan kriminal serta penggunaan senjata kecil oleh beberapa 'elit lokal dan nasional' (Mustafa, 2005; Paudel, 2014). Dampak pemberontakan Maois yang berkepanjangan, koordinasi yang tidak memadai antara badan keamanan Nepal dan India di sepanjang perbatasan terbuka, murahnya biaya senjata api, serta munculnya kelompok bersenjata dan ketidakstabilan politik merupakan alasan-alasan di balik penggunaan senjata kecil di negara tersebut (Bogati, 2014).

Selama negosiasi ATT, Nepal memberikan suara mendukung kepada Traktat tersebut. Langkah-langkah berikutnya yang diambil oleh pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat sipil dan mitra internasional guna mendorong akses Nepal ke ATT, menunjukkan keterlibatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Traktat tersebut. Meskipun bukan negara pihak atau penanda tangan Traktat tersebut, Nepal telah menunjukkan minat terhadap ATT melalui lokakarya peningkatan kapasitas, termasuk diskusi tentang tema-tema terkait gender dan senjata kecil di bawah Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.⁸⁵ Namun, Nepal belum menghadiri CSP mana pun. KII yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan nasional menyoroti tantangan-tantangan yang juga dialami oleh beberapa negara lain di subkawasan tersebut, seperti kurangnya bantuan keuangan dan teknis, kapasitas, dan keahlian, serta kebutuhan untuk mempertahankan momentum seputar Traktat tersebut (Control Arms, 2018).⁸⁶ Di tingkat nasional, kemajuan ATT dan isu-isu pengendalian senjata konvensional lainnya saat ini terhenti di parlemen. Pada tahun 2024, topik-topik semacam ini menunggu perdebatan parlemen yang bergantung pada pengesahan RUU Keadilan Transisi—salah satu tonggak terpenting perjanjian damai.⁸⁷ Selain itu, upaya negara menuju akses dipersulit oleh pertimbangan regional, khususnya dinamika dengan pemasok senjata tetangga, seperti India.

Pakistan

Pakistan merupakan salah satu importir utama senjata konvensional dan senjata kecil di subkawasan tersebut, meskipun bukan pengekspor senjata konvensional yang signifikan. Namun, Pakistan merupakan salah satu negara di subkawasan tersebut yang paling terdampak oleh proliferasi senjata kecil. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh lokasinya

yang berdekatan dengan Afghanistan, tempat peristiwa geopolitik bersejarah seperti invasi Soviet ke Afghanistan yang berkontribusi terhadap masuknya senjata ke wilayah tersebut, dan mundurnya Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021 yang memicu perdagangan senjata lebih lanjut di bawah Taliban (Fleischner, 2023). Industri senjata rakitan dalam negeri, khususnya di wilayah seperti Darra Adam Khel, semakin mempersulit upaya pengendalian karena keterikatan historis dan budaya, serta terciptanya lapangan kerja yang besar. Upaya pemerintah Pakistan untuk mengendalikan aliran senjata ilegal menekankan perjuangan melawan ketergantungan ekonomi lokal pada industri senjata yang tengah berlangsung, yang diperburuk oleh kesenjangan sosial-politik (Hashim, 2019). Kekhawatiran penyelundupan di daerah perbatasan dengan Afghanistan tetap tinggi, mengingat banyaknya penyitaan di dekat perbatasan Pakistan dan meningkatnya serangan oleh Tehreek-e-Taliban Pakistan, terutama di Khyber Pakhtunkhwa yang beroperasi dari tanah Afghanistan (Fleischner, 2023).

Selama negosiasi ATT, Pakistan menyatakan dukungan mereka terhadap prinsip-prinsip dasar yang mendasari Traktat tersebut dengan menekankan perlunya pendekatan yang seimbang yang membahas aspek penawaran dan permintaan perdagangan senjata. Kekhawatiran Pakistan atas dugaan bias Traktat tersebut terhadap negara pengeksport senjata dibandingkan negara pengimpor menggambarkan kecemasan mereka akan distribusi kewajiban yang adil dan potensi penyalahgunaan ketentuan Traktat guna merugikan negara pengimpor senjata. Selain itu, posisi Pakistan terkait sifat Traktat yang tidak seimbang semakin ditekan oleh kegagalan Traktat dalam menetapkan mekanisme akuntabilitas apa pun jika negara pengeksport senjata melanggar ketentuannya (Jalil, 2016). Hal ini memicu keraguan Pakistan karena perkiraan risiko destabilisasi akibat penumpukan senjata, serta skeptisisme tentang ambang batas ATT yang tidak dipatuhi oleh negara pengeksport.⁸⁸ Keberatan ini menggarisbawahi sikap hati-hati Pakistan yang berupaya memastikan agar tindakan pengendalian senjata internasional tidak ceroboh membahayakan kebutuhan keamanan atau kedaulatan. Meskipun telah memberikan suara mendukung pengesahan Traktat pada tahun 2013 dan dalam pemungutan suara Komite Pertama antara tahun 2019 dan 2023, Pakistan belum juga bergabung dengan ATT. Namun demikian, tidak seperti non-negara pihak Traktat lainnya di subwilayah tersebut, Pakistan telah menghadiri dua CSP: CSP2 dan CSP9. Negara tersebut memiliki sistem pengendalian nasional yang mencakup otoritas penerbit izin dan prosedur untuk memberikan pendapat tentang perizinan, meskipun beberapa langkah hukum lebih lanjut mungkin diperlukan jika terjadi akses Traktat di masa depan.⁸⁹

Sri Lanka

Interaksi Sri Lanka dengan perdagangan senjata global masih belum jelas karena negara tersebut hanya menyerahkan empat laporan kepada UNROCA antara tahun 1992 dan 1995. Penyebaran dan peredaran senjata kecil di negara tersebut berakar kuat dari konflik internal yang berkepanjangan. Konflik dengan LTTE tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi juga mengukuhkan budaya militerisasi yang difasilitasi oleh pencurian senjata pemerintah oleh kelompok pemberontak dan perdagangan gelap (Gorea, 2006). Para politisi

yang menggunakan tentara pribadi untuk keberhasilan pemilu, ditambah dengan celah pada perbatasan laut yang memfasilitasi penyelundupan senjata, semakin memperumit lanskap keamanan (Mustafa, 2005). Antara tahun 2008 dan 2016, Amerika Serikat memberlakukan embargo senjata terhadap negara tersebut karena pelanggaran hak asasi manusia oleh angkatan bersenjata Sri Lanka pada tahap akhir Perang Eelam (Jelvin and Reghunathan Nair, 2021).⁹⁰ Ketidakstabilan masih terjadi di negara tersebut, seperti yang dibuktikan oleh kerusuhan politik tahun 2022 dan serangkaian serangan terkait ISIS yang menewaskan total 269 orang pada bulan April 2019 (BBC News, 2020).

Meskipun sikap spesifik Sri Lanka selama fase negosiasi ATT tidak dipublikasikan, berbagai upaya pascakonflik dan langkah hukum yang diambil oleh pemerintah negara tersebut menunjukkan hubungan yang rumit dengan inisiatif pengendalian senjata. Menyusul posisi abstain Sri Lanka dalam pemungutan suara ATT pada tahun 2013, interaksi strategis dengan negara-negara besar, terutama dukungan Tiongkok melalui bantuan militer di tengah sanksi Barat selama Perang Eelam dan keterlibatan setelahnya dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan, menunjukkan navigasi yang cermat terhadap norma-norma internasional untuk tujuan kemajuan dan kelangsungan hidup geopolitik di tengah sanksi dan pengawasan global. Dalam satu dekade terakhir, Sri Lanka telah menyetujui Konvensi Pelarangan Ranjau dan CCM.

Negara tersebut tetap berada di luar kerangka ATT dan absen dari CSP. Bagi Sri Lanka, warisan abadi proliferasi senjata dari era perang saudara, serta perlunya mekanisme yang kuat guna mencegah perdagangan ilegal, menuntut implementasi kerangka hukum yang efektif (Foster dan Abeywardana, 2006). Meskipun demikian, beberapa kegiatan telah dipromosikan guna mengatasi proliferasi senjata terlarang –menunjukkan beberapa penyelarasan tidak langsung dan tentatif dengan tujuan Traktat. Misalnya, anggota parlemen Sri Lanka Nimal Siripala de Silva dan Thilanga Sumathipala telah mendukung promosi Traktat melalui *Parliamentarians for Global Action* (Abhayagunawardena, 2018). Demikian pula pada tahun 2024, UNRCPD mendukung serangkaian kegiatan yang diajukan oleh polisi Sri Lanka dan dilaksanakan dalam kemitraan bersama Mines Advisory Group, yang bertujuan meningkatkan kapasitas polisi Sri Lanka dalam akuntansi, penyimpanan, transportasi, dan penanganan senjata milik negara yang aman dan terjamin (UNODA, 2024b). ●



Meskipun sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk terlibat atau mematuhi Traktat ini, beberapa negara menganggap universalisasi atau implementasi nasional sebagai prioritas kedua dibandingkan masalah domestik lainnya.”

Universalisasi dan kepatuhan kepada ATT: tantangan dan langkah ke depan

Bagian ini mengkaji dan merangkum tantangan utama yang menghambat universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan Indo-Pasifik, serta mengusulkan beberapa potensi titik masuk untuk keterlibatan dan kerja sama lebih lanjut guna memperkuat efektivitas ATT di Indo-Pasifik.

Tantangan utama bagi universalisasi dan kepatuhan kepada ATT

Kawasan Indo-Pasifik menempati posisi strategis dalam perdagangan senjata global yang dipengaruhi oleh signifikansi geopolitiknya saat ini, berbagai tantangan keamanan, dan pembangunan ekonomi. Kawasan ini telah menjadi saksi banyak konflik, mulai dari perjuangan antikolonial dan perang dunia hingga pergeseran dinamika politik global saat ini—termasuk kemunculan kekuatan global baru, seperti Tiongkok, India, dan Rusia (Lodgaard, 2023; NISEA, 2024).

Dalam konteks ini, pada umumnya sikap negara-negara di kawasan terhadap ATT berkisar dari mendukung hingga khawatir. Kekhawatiran ini utamanya berkaitan dengan perlindungan kedaulatan nasional dan pembangunan kapasitas pertahanan nasional. Sebagian besar tantangan bagi universalisasi dan kepatuhan kepada ATT yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan yang diidentifikasi dalam Laporan ini menyerupai tantangan pada studi sebelumnya—termasuk persaingan antara prioritas nasional, pengaruh geopolitik, masalah keamanan, dan keterbatasan kapasitas.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa beberapa isu dan keberatan bertahan selama bertahun-tahun, meskipun ada upaya dari beberapa aktor internasional, regional, dan non-pemerintah untuk mengatasinya.

Keberatan dan skeptisisme dalam negeri terhadap aspek-aspek ATT yang menghambat universalisasi

Negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk beberapa yang saat ini sedang dalam proses reformasi dan modernisasi, telah menyuarakan kekhawatiran tentang bagaimana ATT dapat memengaruhi industri pertahanan mereka yang sedang berkembang dan impor untuk tujuan keamanan nasional.

Misalnya, ATT menghadapi skeptisisme dari beberapa negara karena sentimen bahwa Traktat tersebut dapat menyalahi hak kedaulatan nasional dalam mengatur perdagangan senjata mereka, serta dianggap sebagai ancaman bagi pertahanan diri (contoh, kapasitas mengimpor senjata untuk tujuan keamanan nasional) dan kepentingan ekonomi (seperti keuntungan komersial). Dalam beberapa kasus, kekhawatiran mengenai kemampuan untuk menjamin pertahanan diri suatu negara berasal dari ketidaksepakatan awal selama negosiasi yang masih berlanjut hingga saat ini, dan berkaitan erat dengan perbedaan antara negara pengimpor senjata dan negara pengeksport senjata. Pada saat negosiasi, negara-negara seperti India dan Pakistan menyuarakan kekhawatiran bahwa ATT tidak

cukup seimbang dalam memenuhi tanggung jawab ini, dengan mengisyaratkan bahwa Traktat tersebut secara inheren lebih menguntungkan negara-negara pengekspor (India, 2013; Jalil, 2016). Kekhawatiran ini bisa jadi masih memengaruhi penilaian dan pendekatan beberapa negara.⁹²

Terkait ATT yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi, Singapura, misalnya, secara konsisten telah menegaskan kembali kekhawatiran serupa di CSP: '[K]ami sangat yakin bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk memperoleh senjata konvensional guna menjalankan haknya untuk membela diri, dan kami tidak dapat mengabaikan kepentingan sah negara-negara dalam hal ini. Oleh karena itu, kita harus mencapai keseimbangan yang tepat antara memenuhi kewajiban kita berdasarkan ATT dan memungkinkan perdagangan internasional senjata konvensional yang sah' (Singapura, 2023). Berkaitan erat dengan strategi ekonomi dan kepentingan komersial beberapa negara, hal ini juga dapat menjadi perhatian bagi negara-negara yang berupaya memperluas ekspor pertahanan mereka (Sharma dan Finaud, 2019).⁹³

Pengecualian ketentuan transfer senjata kepada aktor non-negara dalam Traktat ini masih menjadi masalah yang kontroversial pada saat negosiasi. Keengganan untuk memasukkan peraturan tentang transfer senjata kepada aktor non-negara, misalnya, oleh India dan Indonesia (Sharma dan Finaud, 2019), menekankan kesulitan dalam mencapai konsensus pada beberapa isu. Keterbatasan ini menimbulkan kritik lebih lanjut, mengingat Traktat tersebut dapat dianggap gagal dalam menangani semua aspek utama perdagangan senjata global secara memadai.⁹⁴

Saat ini, skeptisisme beberapa negara terhadap ATT masih signifikan karena Traktat ini dianggap belum menunjukkan dampaknya pada perdagangan ilegal dan legal yang telah berkontribusi terhadap ketegangan di dalam dan luar kawasan tersebut. Beberapa negara di kawasan tersebut mungkin menganggap ATT tidak adil atau cukup komprehensif, dan lebih berfokus pada kepentingan negara-negara Barat. Persepsi ini, setidaknya dalam beberapa hal, telah berakumulasi membentuk sikap negatif terhadap ATT. Misalnya, diskusi selama pertemuan Kelompok Kerja ATT pada bulan Februari 2024 menunjukkan bahwa beberapa negara pihak bahkan merasa bahwa Traktat tersebut belum menunjukkan kemampuannya untuk menghentikan transfer dari negara-negara pihak yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia, seperti transfer ke Israel selama perang 2023–24 di Gaza.⁹⁵ Selain itu, beberapa negara akan menganggap pentingnya memasukkan ketentuan mengenai aktor bersenjata non-negara, terutama mengingat kekhawatiran yang muncul terkait peran perusahaan militer swasta.⁹⁶

Kebutuhan untuk membangun dan mendukung momentum politik menuju ratifikasi dan kepatuhan, serta meningkatkan kesadaran akan aspek-aspek Traktat

Ketiadaan mekanisme koordinasi regional yang kuat juga dapat menjadi tantangan bagi universalisasi dan implementasi Traktat di kawasan tersebut (Varisco, Maletta, dan Robin,

2021).⁹⁷ Tingkat keterlibatan yang bervariasi di antara berbagai entitas kawasan, seperti Forum Kepulauan Pasifik (*Pacific Islands Forum*/PIF), SAARC, dan ASEAN, dengan beberapa dianggap sebagai pemain kurang aktif dalam pengendalian senjata, menyoroti keterbatasan lingkungan untuk mendukung universalisasi dan implementasi ATT. Di tingkat subkawasan, inisiatif seperti Deklarasi ASEAN 2023 tentang Pemberantasan Penyelundupan Senjata, kerangka kerja ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional, dan Peta Jalan Regional untuk Regulasi Senjata merupakan upaya positif guna membangun mekanisme regional dalam menangani senjata di Asia Tenggara.

Kekhawatiran ini juga sejalan dengan kecenderungan memudarnya antusiasme yang kerap menyertai di awal saat pengenalan konvensi internasional seperti ATT seiring berjalannya waktu. Hal ini menambah tantangan dalam mempertahankan momentum politik menuju ratifikasi dan kepatuhan seiring berubahnya pemerintahan nasional dan prioritas. Menurut hasil konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, semangat yang menandai permulaan Traktat telah berkurang dan beralih ke isu-isu lain yang lebih mengkhawatirkan atau inisiatif yang sedang berkembang.⁹⁸

Bagi beberapa negara di kawasan tersebut, jalan menuju ratifikasi ATT terbukti berliku-liku. Beberapa negara menunjukkan minat dan penyelerasan dengan Traktat tersebut dengan menandatangani lebih dari sepuluh tahun yang lalu, tetapi, hingga waktu artikel ini ditulis, belum juga meratifikasinya, meskipun telah ada kegiatan penjangkauan dan bantuan yang ditujukan guna mencapai tujuan itu. Kegiatan-kegiatan ini sering kali melibatkan berbagai aktor dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai aspek atau pasal Traktat yang mungkin dianggap tidak jelas atau berpotensi bermasalah (misalnya, perantara), dan telah memberi negara-negara kesempatan untuk belajar dari pengalaman pihak lain.

Meskipun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengakses materi dan jenis dukungan lainnya, tantangan tetap masih ada. Penerjemahan dari Perangkat Universalisasi Traktat dan ‘Paket Selamat Datang’ ke dalam bahasa-bahasa di kawasan tersebut untuk negara-negara pihak ATT yang baru merupakan salah satu contoh upaya ini (ATT Sekretariat, 2019a; 2024g). Ketersediaan kerja sama dan bantuan juga telah ditekankan. Namun, fakta bahwa VTF hanya terbuka melalui pendaftaran oleh negara,⁹⁹ berikut persyaratan proses pendaftarannya, mungkin telah membatasi kemampuan negara-negara untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan (Maletta dan Bauer, 2021; Varisco, Maletta, dan Robin, 2021, pp. 43–51).¹⁰⁰ Selain itu, beberapa wawancara menyoroti masalah umum: upaya penjangkauan mungkin hanya mencakup sedikit keterlibatan dengan OMS dari kawasan tersebut, yang dalam beberapa kasus juga disebabkan oleh terbatasnya akses OMS ke pendanaan internasional yang memang juga cukup ketat. Keterlibatan yang marjinal ini, disertai kelangkaan pendanaan berkelanjutan untuk studi komprehensif dan kegiatan peningkatan kesadaran, menegaskan perlunya penyederhanaan proses, konsultasi yang lebih luas, dan pengembangan sumber daya guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan Traktat di antara para pemangku kepentingan utama, termasuk anggota parlemen dan pegawai senior di lembaga keamanan.



Peserta diskusi di Lokakarya untuk Asia Tenggara tentang Kekerasan Senjata dan Perdagangan Senjata Kecil Ilegal dari Perspektif Gender yang diselenggarakan oleh UNRCPD di Bangkok, Thailand, Juli 2018.

Sumber: UNRCPD

Hal ini juga menunjukkan pentingnya menilai hasil dari inisiatif yang didanai maupun dari pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan yang bermakna dalam kerangka kerja OMS juga masih kurang di beberapa subkawasan, khususnya dalam diskusi nasional tentang isu persenjataan. Hal ini dapat menyulitkan OMS yang bekerja di bidang kesetaraan gender untuk menjadi bagian dari diskusi terkait di tingkat nasional, dan, akibatnya, untuk turut bergabung dalam perdebatan regional dan global. Beberapa upaya telah dilakukan guna mengatasi masalah tersebut, termasuk membangun berbagai inisiatif terkait perspektif gender atas kekerasan bersenjata dan perdagangan senjata kecil di kawasan Asia-Pasifik (UNRCPD, 2020a). Acara regional untuk mendorong pengendalian senjata yang responsif gender, khususnya yang berkaitan dengan UN PBB dan ATT, juga telah memberikan kontribusi positif (UNIDIR dan UNRCPD, 2024).

Masalah keamanan dan pengaruh geopolitik regional di tengah universalisasi

Pertimbangan keamanan juga memengaruhi perspektif negara-negara Indo-Pasifik terhadap ATT, khususnya di kawasan yang dicirikan oleh persaingan historis dan ketegangan geopolitik. Keengganan India untuk bergabung dengan ATT, misalnya, sebagian berakar dari kekhawatiran atas industri ekspor senjata Tiongkok yang sedang berkembang dan implikasinya terhadap

lingkungan keamanan domestik dan regional India. Kekhawatiran ini diperparah oleh ancaman kelompok bersenjata non-negara, serta perdagangan senjata ilegal yang difasilitasi oleh aktor non-negara. Ketegangan lain, seperti ketegangan antara Pakistan dan India, atau Vietnam dan Tiongkok, juga berkontribusi dalam membentuk sikap negara-negara terhadap Traktat tersebut (Sharma dan Finaud, 2019). Kurangnya kepercayaan antara kekuatan besar dalam kawasan, yang diperparah oleh konflik historis dan pertikaian strategis di wilayah-wilayah maritim utama, memicu peningkatan persenjataan nasional dan menambah skeptisisme terhadap instrumen seperti ATT yang dianggap dapat membatasi persiapan pertahanan nasional (Lee, J., 2023).

Sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi contoh lain dari masalah keamanan kawasan yang melibatkan banyak negara (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam). Menurut sebuah studi, 'meskipun bukan pendorong utama meningkatnya impor senjata, penentangan terhadap klaim teritorial Tiongkok telah memicu kenaikan permintaan impor senjata selama lima tahun terakhir, seiring dengan modernisasi pertahanan dan penegasan kedaulatan' (Austero dan Gorospe, 2019). Masalah ini juga memengaruhi persepsi publik mengenai ancaman keamanan nasional, topik yang secara teratur dibahas di surat kabar di kawasan tersebut dan merupakan faktor yang berkontribusi memastikan bahwa modernisasi militer menjadi bagian dari agenda nasional (NISEA, 2024).

Meskipun demikian, beberapa pihak melihat masuknya kekuatan global seperti Tiongkok ke ATT sebagai sesuatu yang dapat membantu mengubah kalkulasi keamanan regional, asalkan ketegangan saat ini mereda.¹⁰¹ Keraguan negara-negara yang lebih kecil—misalnya, beberapa negara di Asia Selatan mempertimbangkan dampak dari potensi reaksi India terhadap ratifikasi mereka—menggambarkan bagaimana hubungan bilateral dapat secara signifikan memengaruhi keputusan terkait keterlibatan dengan Traktat. Senada dengan hal tersebut, pandangan regional yang lebih luas, seperti kemungkinan negara bergabung dengan kontingen ATT setelah partisipasi negara-negara tetangga terkemuka, dapat menunjukkan bagaimana menargetkan negara-negara berpengaruh untuk universalisasi ATT dapat mengkatalisasi penerimaan regional yang lebih memadai.

Keterbatasan kapasitas dan sumber keuangan, serta rintangan birokratis

Beberapa negara Indo-Pasifik menggunakan pendekatan yang lebih ketat dan hati-hati untuk kewajiban internasional mereka guna memastikan sistem dan praktik pengendalian nasional yang dimiliki dapat sepenuhnya mematuhi kewajiban Traktat sebelum menjadi negara pihak. Ini menyiratkan bahwa beberapa negara di kawasan tersebut, meskipun mereka belum menjadi negara pihak Traktat, memiliki peraturan dan sistem pengendalian nasional yang berlaku. Namun, pendekatan ini dapat mengakibatkan beberapa negara Indo-Pasifik menghadapi tantangan dan hambatan legislatif dan prosedural internal yang signifikan yang menghambat kemampuan mereka untuk bergabung atau mematuhi ATT. Proses penyusunan amandemen legislatif dan penetapan peraturan baru menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan kewajiban ATT (Varisco, Maletta,

dan Robin, 2021), seperti yang dialami oleh beberapa negara di kawasan tersebut. Tidak jauh berbeda, rintangan prosedural dan birokratis dalam mekanisme internal dapat memperlambat laju menuju ratifikasi ATT, selain juga terhalang oleh kompleksitas kerja sama antardepartemen dan kerapnya rotasi birokratis yang menghambat kesinambungan dan memori kelembagaan. Sebagai contoh, OMS yang telah melakukan pendekatan ke beberapa negara Indo-Pasifik menyoroti kurangnya mekanisme koordinasi atau titik kontak yang mapan untuk masalah senjata, sehingga mempersulit efisiensi keterlibatan (ATT BAP, 2017).

Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai macam masalah, termasuk sumber daya manusia yang tidak memadai, kurangnya pelatihan rutin bagi pejabat baru guna memastikan keberlanjutan upaya tersebut jika terjadi pergantian, pencatatan yang terdesentralisasi, dan terputusnya komunikasi antara misi tetap PBB dan ibu kota. Dalam hal ini, biaya yang berkaitan dengan keterlibatan internasional, termasuk biaya untuk menghadiri diskusi yang berpusat di Jenewa, semakin menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh beberapa negara. Namun, perlu dicatat bahwa Program Pendanaan yang diberlakukan oleh Sekretariat ATT guna mengatasi masalah semacam ini telah mensponsori beberapa negara dari Asia dan Oseania selama bertahun-tahun. Pada tahun 2024, misalnya, 11 negara dari Asia dan tiga negara dari Oseania disponsori untuk menghadiri CSP10 (ATT Sekretariat, 2024h).

Persyaratan pelaporan beberapa instrumen, ditambah dengan kurangnya koordinasi dan pertukaran informasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah, terus memberikan tekanan tambahan kepada negara-negara pihak yang memiliki keterbatasan sumber daya di kawasan tersebut. Dalam konteks kepatuhan terhadap ATT, persyaratan pelaporan menciptakan tantangan yang signifikan bagi negara, termasuk kebutuhan untuk mengatasi kolaborasi antarlembaga yang buruk (ATT Sekretariat, 2024a; Holtom dan Bromley, 2011). Hal ini tidak hanya memengaruhi kepatuhan negara terhadap persyaratan pelaporan ATT, tetapi juga menjadi hambatan untuk bergabung dengan Traktat. Terkadang, negara atau pemangku kepentingan yang berminat masih kurang kesadaran akan kewajiban pelaporan—meskipun ada upaya ekstensif oleh Kelompok Kerja Transparansi dan Pelaporan (KKTP) dan OMS untuk mengatasi hal ini. Masalah tersebut, ditambah dengan budaya kerahasiaan dalam lembaga yang ditugaskan menyimpan informasi terkait, memperburuk tantangan pelaporan.

Kelelahan pelaporan, ketidakpastian tentang relevansi pelaporan bagi negara-negara tertentu, dan tidak adanya tolak ukur atau indikator keberhasilan yang jelas terkait dengan implementasi semakin mempersulit upaya kepatuhan (ATT BAP, 2017; Holtom dan Bromley, 2011). Di Bangladesh, misalnya, para peneliti mengamati bahwa 'menjadi negara berkembang dengan kendala pendanaan dan birokrasi yang terlalu menekan, mekanisme pelaporan lain di bawah ATT tidak hanya akan sulit bagi Bangladesh, tetapi juga dapat membuat negara tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan ini tanpa bantuan internasional' (Rahman, 2012). Maka karena itu, kewajiban tersebut mungkin dianggap memerlukan waktu dan upaya yang besar oleh negara, serta dapat memicu skeptisisme di antara negara-negara non-pihak untuk mengakses Traktat. Namun, perlu dicatat bahwa KKTP telah berupaya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Sejak tahun 2021, misalnya, negara-negara dapat menggunakan data dari laporan tahunan ATT sebagai dasar pengajuan ke UNROCA hanya dengan mencentang kotak di templat pelaporan ATT (Wezeman, S.T., George, dan P.D. Wezeman, 2024).

Persaingan prioritas nasional dan kurangnya kemauan politik dalam upaya universalisasi dan kepatuhan

Tantangan terhadap universalisasi dan prioritas ATT di kawasan Indo-Pasifik juga berasal dari prioritas yang saling bertentangan dan bersaing. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemauan politik untuk menyetujui atau mematuhi Traktat (Varisco, Maletta, dan Robin, 2021). Sikap ini dianut oleh berbagai negara di kawasan tersebut, di mana manfaat yang dirasakan dari bergabung dengan ATT dibayangi oleh kekhawatiran atas kewajiban ATT. Negara mungkin memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharuskan oleh ATT dalam hal persyaratan dan 'biaya' (seperti kewajiban pelaporan, kehadiran di pertemuan, dan biaya tahunan), tetapi kurang jelas tentang manfaat yang dapat diperoleh dengan bergabung bersama ATT, terutama bagi negara-negara yang telah memiliki undang-undang yang ketat mengenai senjata dan pengendalian transfer senjata.¹⁰²

Keengganan yang ditimbulkan juga sebagian dapat dikaitkan dengan persepsi bahwa Traktat tersebut memberlakukan persyaratan yang bertentangan dengan hukum domestik, sebuah kekhawatiran yang disuarakan oleh Indonesia pada tahun 2018 (Santi dan Manan, 2018; Sharma dan Finaud, 2019, h. 6). Ketika sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk terlibat atau mematuhi Traktat tersebut, beberapa menganggap universalisasi atau implementasi nasional sebagai prioritas sekunder dibandingkan masalah domestik lainnya, seperti konflik bersenjata internal, migrasi dan pengungsi, ketegangan di perbatasan darat dan laut yang disengketakan, pembangunan nasional, dan kerentanan iklim (NISEA, 2024). Beberapa negara di Oseania, misalnya, mungkin tidak melihat ATT sebagai isu utama dalam daftar prioritas politik mereka karena terbatasnya perdagangan senjata di negara mereka, dan sebaliknya memilih untuk fokus pada perubahan iklim sebagai prioritas politik utama. Dengan demikian, di beberapa negara ATT kurang menjadi prioritas dibandingkan isu-isu lain yang lebih mendesak dan berprioritas lebih tinggi, yang mungkin berada di bawah mandat lembaga atau pejabat yang sama terbebannya. Keengganan tersebut diperkuat oleh keberadaan iklim geopolitik yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kerangka hukum internasional, di samping persepsi akan kepatuhan yang terbatas.

Titik masuk dan peluang

Meskipun terdapat kesulitan dalam mencapai universalisasi dan kepatuhan, ada beberapa titik masuk konkret yang memungkinkan terjadinya keterlibatan dan kerja sama lebih lanjut dengan kawasan tersebut yang akan memperkuat efektivitas ATT beserta tujuan-tujuannya di kawasan Indo-Pasifik.¹⁰³ Langkah-langkah yang mungkin dilakukan ini dimaksudkan untuk mendukung dan melengkapi upaya berbagai aktor—KKUT, Sekretariat ATT, lembaga nasional, dan OMS—yang terlibat dalam universalisasi dan kepatuhan ATT, termasuk proposal tentang 'Mengoptimalkan Pekerjaan KKUT ATT' yang didukung di CSP9 (ATT Sekretariat, 2023a; 2023b) dan rencana kerja KKUT untuk upaya universalisasi ATT yang tengah ditinjau (ATT Sekretariat, 2024g).

Universalisasi

Dalam upaya mendefinisikan strategi menuju universalisasi Traktat, CSP dan KKUT pada tahun 2023 menyerukan agar fokus 'terutama pada negara-negara penanda tangan karena mereka telah menunjukkan komitmen politik terhadap Traktat sembari tetap terbuka dan terlibat dengan negara-negara lain yang tertarik untuk bergabung dengan Traktat kapan saja, serta mempertimbangkan perkembangan lain yang relevan dengan tujuan Perjanjian' (ATT Secretariat, 2023b). Ihwal ini dikombinasikan dengan diskusi mengenai wilayah-wilayah di mana upaya universalisasi harus difokuskan selama rencana kerja multi-tahun, termasuk mengidentifikasi negara-negara Asia-Pasifik yang belum bergabung dengan Traktat sebagai fokus utama untuk siklus CSP₁₁ hingga CSP₁₃. Beberapa delegasi juga menyebutkan bahwa KKUT harus 'tetap terlibat dengan eksportir dan importir utama yang belum menjadi negara pihak, serta mempertimbangkan kepentingan strategis, seperti potensi berkontribusi dalam memerangi kejahatan terorganisir' (ATT Secretariat, 2024g, para. 16). Namun, diskusi sejauh ini lebih menitikberatkan pada menerapkan fokus geografis daripada memprioritaskan negara-negara yang memiliki peran menonjol dalam perdagangan senjata, baik sebagai eksportir utama atau importir senjata konvensional.

Langkah-langkah dan titik masuk yang mungkin dilakukan untuk menghadapi tantangan universalisasi antara lain sebagai berikut:

- **Para aktor yang terlibat dalam upaya universalisasi ATT (yaitu, KKUT, Sekretariat ATT, lembaga nasional, organisasi kawasan yang aktif, dan OMS) dalam jangka pendek harus berkonsentrasi pada negara-negara yang telah menunjukkan kecenderungan awal dan kemauan untuk bergabung dengan Traktat, meskipun menghadapi tantangan yang cukup besar.**

Sejalan dengan usulan untuk meningkatkan kinerja KKUT ATT dan rencana kerjanya, negara-negara yang dimaksud mencakup negara-negara penanda tangan yang telah menunjukkan komitmen dan kepentingan politik terhadap Traktat, serta non-negara pihak yang memberikan suara mendukung adopsi ATT pada tahun 2013 dan mendukung resolusi-resolusi ATT di UNGA. Bagi negara-negara tersebut, upaya yang ditargetkan dapat mencakup hal-hal berikut: melakukan penilaian terhadap hambatan-hambatan menuju ratifikasi/aksesi; membantu negara-negara melakukan penilaian mandiri nasional atas hukum mereka dan bagaimana hukum-hukum tersebut mematuhi ATT atau tidak (ini juga akan mencakup pengakuan terhadap negara-negara yang telah memiliki undang-undang nasional dan pengendalian ekspor yang kuat guna menekankan praktik-praktik perdagangan senjata yang bertanggung jawab); melakukan analisis kesenjangan yang komprehensif di tingkat nasional; mengembangkan peta jalan atau strategi nasional menuju ratifikasi dan akses Traktat; menyediakan panduan dan materi terkini tentang ATT; dan mendukung kegiatan (seperti peningkatan kesadaran atau kegiatan lainnya) guna membangun kembali atau memperkuat momentum menuju ratifikasi dan akses ATT. Semua kegiatan ini dapat didanai melalui mekanisme seperti VTF.

Secara paralel, para aktor yang sama yang terlibat dalam upaya universalisasi, dan khususnya negara pihak pengekspor dari kawasan tersebut, dapat mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk melibatkan non-negara pihak. Proses ini dapat meliputi



Seorang anggota Pasukan Pertahanan Nasional Karenni menunjukkan senapan yang sebagian dibuat dengan komponen cetak 3D di Negara Bagian Kayah, Myanmar, 20 Februari 2023. Sumber: Getty Images/LightRocket/Thierry Falise

hal-hal berikut: 1) mengadakan kegiatan penjangkauan guna memahami dan mengatasi masalah-masalah tertentu (seperti kekhawatiran bahwa ATT dapat membatasi kapasitas suatu negara untuk mengimpor senjata) dan membangun konsensus dan dukungan terhadap ATT; 2) mengundang negara-negara untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam Kelompok Kerja ATT dan CSP;¹⁰⁴ dan 3) memantau dan mengadaptasi strategi berdasarkan catatan pemungutan suara dalam resolusi-resolusi ATT di UNGA. Hal ini akan melibatkan penargetan negara-negara yang menunjukkan keberatan, bekerja menuju pembangunan konsensus, mengakui perubahan positif, dan terlibat dengan negara-negara yang mengalami pergeseran sikap dari positif ke negatif.

- **Para donor dan negara pihak, khususnya negara pengekspor, harus mendukung upaya membangun basis bukti yang lebih kuat untuk tantangan keamanan yang lebih luas yang dihadapi negara-negara saat mempertimbangkan bergabung dengan ATT, dan mengembangkan strategi guna mengatasinya.**

Dalam beberapa konteks nasional, pertimbangan terkait keamanan yang lebih luas atau subkawasan dapat menentukan dan memengaruhi sikap suatu negara terhadap ATT. Aktor politik, seperti kementerian pertahanan, mungkin khawatir bahwa bergabung dengan ATT dapat membatasi kemampuan negara untuk mengimpor senjata, atau berimplikasi pada keamanan nasional. Para pemangku kepentingan nasional lainnya, termasuk industri atau anggota parlemen, mungkin skeptis bahwa kewajiban Traktat

tertentu, seperti pelaporan, dapat mengungkapkan informasi terkait kapasitas nasional atau impor suatu negara.

Dalam beberapa keadaan, data dan informasi tentang aliran senjata ilegal dan tantangan keamanan sulit diperoleh. Para donor harus mempertimbangkan untuk memberikan dana khusus kepada OMS, lembaga penelitian, dan otoritas penegak hukum nasional guna meningkatkan basis bukti terkait aliran senjata ilegal melalui pemantauan yang lebih sistematis terhadap aliran tersebut. Dalam situasi lain, negara menganggap bahwa Traktat tersebut tidak cukup mengatasi ancaman keamanan semacam itu, atau bahkan dapat membatasi impor negara. Dalam kasus ini, negara-negara pihak, terutama negara pengekspor, perlu lebih terlibat dalam pertemuan Kelompok Kerja dan forum lainnya guna menunjukkan bagaimana mereka menanggapi masalah ini dengan serius dan bagaimana ATT sebagai sebuah mekanisme telah meningkatkan kualitas pembuatan keputusan mengenai ekspor dengan cara yang dapat dimanfaatkan oleh anggota di masa mendatang. Hal ini juga akan melibatkan pembuktian kepada negara-negara pengimpor yang enggan akan adanya manfaat yang bisa diperoleh dari keanggotaan di ATT.

Terlibat dalam dialog secara konsisten bersama lembaga keamanan dan mempromosikan peran yang Traktat dapat mainkan dalam menyediakan platform global untuk mengatasi masalah-masalah yang ada merupakan kegiatan praktis tambahan guna membangun keyakinan bahwa ATT sesuai dengan tujuannya. Kegiatan pelengkap lain yang dapat disponsori oleh donor dapat mencakup pelaksanaan studi subkawasan yang komprehensif guna menganalisis dan memahami negara dan realitas subkawasan, serta mengembangkan kursus dan program pelatihan *ad hoc* mengenai ATT, atau paket pelatihan khusus dalam bahasa yang relevan, yang menargetkan kementerian pertahanan atau aktor-aktor yang menunjukkan keengganan lainnya. Hal ini bisa juga mencakup pengalaman dari rekan-rekan militer atau pertahanan dari negara-negara lain. Dalam konteks ini, keterlibatan yang disesuaikan dengan keadaan nasional akan lebih berguna, mengingat beragamnya tantangan dan situasi di kawasan Indo-Pasifik: inisiatif penjangkauan harus mempertimbangkan masalah keamanan yang unik, dinamika kawasan, dan konflik—menekankan manfaat khusus ATT untuk setiap negara, serta sifatnya yang melengkapi instrumen-instrumen lain.

- **Berbagai upaya harus dilakukan guna memperdalam pemahaman tentang berbagai dimensi yang menjadi ciri perdagangan senjata di kawasan tersebut—khususnya aspek maritim dan perantaraan perdagangan senjata—serta yang berkaitan dengan kesenjangan kapasitas atau kebutuhan yang harus diatasi agar dapat meningkatkan pengendalian atas perdagangan senjata ilegal.**

Beberapa tantangan terkait dimensi keamanan maritim dari perdagangan tersebut umum terjadi di seluruh kawasan, begitu pula dengan beberapa kesenjangan kapasitas dan kebutuhan yang diperlukan guna meningkatkan pengendalian atas perdagangan senjata ilegal. Pada tahun 2017, misalnya, banyak negara di Oseania menyoroti kurangnya mesin sinar-X yang memadai di pos perbatasan sebagai tantangan praktis dan umum (ATT BAP, 2017).

Terkait dengan perantaraan, beberapa kasus yang disajikan dalam Laporan ini menunjukkan bagaimana aktivitas perantaraan terjadi di beberapa bagian kawasan

tersebut. Beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi pusat perdagangan senjata, sementara yang lain berupaya untuk memperkuat undang-undang mereka terkait perantaraan senjata. Pasal 10 ATT mengatur perantaraan dalam konteks Traktat. Berbeda dengan Pasal 5, 6, 7, 9, dan 11, KKITE hingga saat ini belum pernah membentuk subkelompok kerja khusus mengenai perantaraan. Meskipun pembentukan kelompok tersebut mungkin akan sulit, Draf Rencana Kerja Multitahun untuk Subkelompok Kerja KKITE mengenai Pertukaran Praktik Implementasi Nasional (ATT Secretariat, 2024f) membayangkan di masa depan akan ada sesi tiga-jam mengenai perantaraan. Penting bagi para ahli dari negara-negara pihak untuk berbagi ide dan mengusulkan solusi efektif yang telah atau dapat diterapkan dalam kerangka ATT, dan bagi negara-negara yang masih berada di luar Traktat untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Para donor dapat mendukung perancangan dan implementasi kursus khusus yang dipimpin oleh beragam ahli nasional dari negara-negara yang telah mengembangkan praktik unggulan terkait regulasi perantaraan senjata yang efektif, juga melibatkan pejabat penegak hukum dan otoritas di tingkat nasional dan subkawasan. Kursus-kursus ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang realitas dan risiko, memungkinkan pertukaran informasi risiko mengenai negara-negara lain, dan mengeksplorasi cara-cara pelibatan ATT sebagai platform yang valid untuk mengatur aspek-aspek perdagangan senjata ini. Kursus-kursus serupa, termasuk versi daring, telah dipromosikan di masa lalu, serta menjadi platform yang mumpuni bagi negara dan pemangku kepentingan yang berminat dari kawasan tersebut.¹⁰⁵

- **Para aktor yang terlibat dalam upaya universalisasi ATT (seperti KKUT, Sekretariat ATT, lembaga nasional, organisasi kawasan yang aktif, dan OMS) harus mendorong kerja sama antarlembaga sejak awal pertimbangan nasional ATT melalui proses implementasi Traktat.**

Kerja sama antarlembaga merupakan aspek mendasar yang perlu dipertimbangkan untuk universalisasi dan implementasi Traktat yang efektif (ATT Secretariat, 2024a). Dengan menyatukan kementerian utama, lembaga penegak hukum, dan badan terkait lainnya, koordinasi antarlembaga memfasilitasi pertukaran informasi, keahlian, dan sumber daya yang pada akhirnya memperkuat kapasitas negara untuk mengaksesi Traktat dan memenuhi kewajibannya. Berbagai negara di kawasan Indo-Pasifik telah mengupayakan hal tersebut.¹⁰⁶ Lebih jauh, beberapa kewajiban Traktat—seperti membangun sistem pengendalian nasional, menilai risiko transfer senjata ke pengguna akhir yang berbeda, atau memberikan laporan dan informasi terkait transfer senjata—sering kali melibatkan lebih dari satu lembaga atau kementerian di tingkat nasional (Holtom, 2024). Oleh karena itu, membangun dan memperkuat mekanisme kerja sama antarlembaga merupakan hal mendasar untuk menarik minat dan partisipasi berbagai aktor dalam proses tersebut guna mengatasi keberatan yang mungkin dirasakan oleh beberapa lembaga terkait ATT, serta memfasilitasi proses internal ratifikasi atau akses dan implementasi. Langkah-langkah dalam bidang ini dapat mencakup hal-hal berikut: 1) pelaksanaan kegiatan penjangkauan dan pertemuan yang menargetkan berbagai aktor nasional secara berkelanjutan; 2) pembuatan memo oleh OMS nasional untuk berbagai kementerian dengan menyoroti potensi manfaat Traktat bagi masing-masing kementerian (Spano dan Alpers, 2017a); dan 3) bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan Traktat,

pengembangan peta jalan bersama menuju Traktat bersama lembaga terkemuka dengan melibatkan seluruh lembaga nasional dan pemangku kepentingan, termasuk OMS yang dapat membantu menjaga momentum jika terjadi perubahan pemerintahan. VTF dan Program Penjangkauan ATT UE, antara lain, dapat memberikan dukungan finansial untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan dan keterlibatan semacam itu dapat membantu mengatasi keraguan dan keberatan terkait Traktat yang mungkin dirasakan oleh beberapa lembaga dan kementerian.

- **KKITE dan para aktor yang melaksanakan kegiatan penjangkauan harus terus berbagi pengalaman dan ‘pelajaran yang dipetik’ dari negara-negara yang sepenuhnya menjadi bagian dari ATT guna meningkatkan pemahaman tentang cara mengatasi tantangan terhadap universalisasi dan kepatuhan.**

KII menekankan pentingnya berbagi pelajaran yang dipetik dari negara-negara lain guna menemukan kemungkinan tantangan bersama, serta memberikan kesempatan kepada negara-negara penanda tangan dan non-negara pihak untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain guna mengatasi tantangan mereka sendiri terhadap universalisasi dan kepatuhan. Berbagi pengalaman ini sudah berlangsung. Misalnya, Filipina mendapat manfaat dari beberapa kegiatan penjangkauan, termasuk kunjungan ke Pelabuhan Rotterdam sebelum ratifikasi. Filipina juga berpartisipasi dalam acara penjangkauan BAFA di Thailand pada bulan Maret 2024 untuk menyampaikan peta jalan mereka menuju ratifikasi kepada otoritas nasional Thailand. Para pelaksana kegiatan penjangkauan dapat terus menyelenggarakan acara sampingan yang memungkinkan negara-negara mitra untuk berbagi pengalaman dan praktik unggulan. Kegiatan tersebut dapat menjadi panduan bagi negara-negara yang berencana untuk bergabung dengan ATT terkait cara memperkuat strategi domestik dan kegiatan bantuan yang mungkin tersedia guna membantu mereka mengakses Traktat.

Keputusan CSP9 telah mengusulkan penyelarasan yang lebih baik antara pekerjaan KKUT dan pekerjaan arus utama KKITE melalui diskusi terstruktur mengenai tahap implementasi ‘ratifikasi atau akses dan domestikasi ATT’. Sub-kelompok Kerja KKITE yang baru, yakni tentang Pertukaran Praktik Implementasi Nasional, memberikan kesempatan untuk meningkatkan pertukaran semacam itu. Pertukaran ini tidak hanya akan menguntungkan negara-negara pihak, tetapi utamanya negara penanda tangan dan negara non-pihak yang juga dapat menghadiri pertemuan ATT. Salah satu langkah yang mendukung fokus baru KKITE adalah membagikan presentasi negara-negara sebelum pertemuan guna memberikan waktu yang cukup kepada perwakilan negara-negara lain untuk membacanya dan menyiapkan pertanyaan tanggapan selama kelompok kerja.

Inisiatif semacam itu akan memungkinkan negara-negara untuk berbagi pengalaman nasional mereka dan mempelajari cara mengatasi tantangan serupa terhadap universalisasi dan kepatuhan. Sekretariat ATT juga dapat mempertimbangkan pengembangan repositori *ad hoc* berisi pengalaman negara-negara di situs web ATT, wadah presentasi dari pertemuan Kelompok Kerja (baik presentasi PowerPoint maupun video) dikumpulkan dan dibagikan kepada publik.¹⁰⁷

- **Para donor dan aktor yang terlibat dalam upaya universalisasi ATT (seperti KKUT, Sekretariat ATT, lembaga nasional, organisasi kawasan yang aktif) harus mendorong proses-proses subkawasan yang bertujuan mengatasi keraguan dan ketakutan negara-negara.**

Mengusulkan, mendukung, atau mengidentifikasi pandangan umum kawasan atau subkawasan serta proses kolektif memang selalu menarik. Di kawasan Indo-Pasifik, proses maupun pandangan kawasan semacam itu tidak ada di semua subkawasan. Namun, subkawasan Asia Tenggara baru-baru ini telah mengambil langkah-langkah penting untuk mempromosikan pemahaman dan proses-proses kawasan di bidang persenjataan. Misalnya, Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan Penyelundupan Senjata yang baru diadopsi (ASEAN, 2023) merupakan upaya regional awal untuk membangun mekanisme kawasan yang menangani persenjataan. Dinamika dan mekanisme-mekanisme kerja sama lain yang ada termasuk Pertemuan Pejabat-Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional dan Pertemuan Setingkat Menteri tentang Kejahatan Transnasional. Di saat yang sama, Filipina tengah memperjuangkan Peta Jalan Regional untuk Regulasi Senjata, sebuah platform informal yang terbuka bagi negara-negara dari ASEAN serta negara-negara dari Asia Selatan dan Oseania (Filipina, 2024).

Di Oseania, proses subkawasan juga telah muncul di masa lalu, misalnya melalui Deklarasi Boe, Kerangka Nadi, hukum model untuk membantu negara-negara Pasifik dalam mengimplementasikan ATT, dan kegiatan-kegiatan PIF sebelumnya. Proses subkawasan tersebut dapat menyediakan platform untuk bertukar pengalaman dan merefleksikan tantangan-tantangan umum terkait keamanan. Konferensi-konferensi subkawasan tentang ATT, yang diselenggarakan oleh UNRCPD atau forum-forum subkawasan (seperti PIF di Oseania) dan negara, dan melibatkan OMS lokal maupun internasional, dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan momentum menuju ratifikasi Traktat di tingkat subkawasan serta memperkuat upaya negara-negara menuju kepatuhan ATT. Dalam beberapa keadaan, mereka dapat memastikan partisipasi negara-negara dengan masalah serupa yang lebih besar dalam berbagai diskusi, seperti negara pengimpor, serta menyarankan langkah-langkah untuk mengatasinya. Negara-negara pihak juga harus memasukkan ATT dalam percakapan-percakapan mengenai instrumen pengendalian senjata lainnya di tingkat kawasan, subkawasan, dan nasional, atau dalam pertukaran bilateral. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan Traktat tersebut, mengingat upaya-upaya di masa lalu dan yang sedang berlangsung terkait instrumen pengendalian senjata lainnya di kawasan tersebut serta keberadaan berbagai inisiatif regional, seperti Seminar Pengendalian Ekspor Asia tahunan yang diselenggarakan di Jepang sejak 1993.

Kepatuhan

Kemungkinan tindakan dan titik masuk untuk memenuhi tantangan kepatuhan meliputi hal berikut:

- **Negara pihak dan pemangku kepentingan ATT lainnya harus memfokuskan upaya pada negara-negara yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban implementasi Traktat.**

Kewajiban traktat mencakup kewajiban pengendalian transfer senjata (membangun sistem pengendalian nasional, termasuk daftar pengendalian nasional, dan mengatur transfer); kewajiban pelaporan (menyerahkan laporan awal dan tahunan); dan kewajiban keuangan (ATT Sekretariat, 2019a). Kehadiran di pertemuan juga dapat menjadi tantangan, terutama bagi negara-negara yang memiliki sumber daya terbatas, berlokasi jauh dari Eropa, dan mungkin memiliki sedikit perwakilan diplomatik di Jenewa. Kerja sama internasional dan upaya bantuan harus terus mendukung negara-negara yang telah mengalami beberapa tantangan implementasi. Sekretariat ATT harus terus mendukung kehadiran negara-negara melalui Program Pendanaan. Kegiatan bantuan, seperti klinik pelaporan nasional dan klinik tentang pembentukan sistem pengendalian nasional di bawah ATT yang diselenggarakan oleh Control Arms di sela-sela CSP9, juga membantu negara-negara mengatasi tantangan kepatuhan (Control Arms, 2023; Control Arms dan Stimson Center, 2023). Selain itu, negara-negara dapat mengembangkan peta jalan untuk implementasi guna menilai kemajuan dalam memenuhi kewajiban Traktat dan membantu mereka menyampaikan kebutuhan akan bantuan dan macamnya yang diperlukan. KKITE juga harus mempertimbangkan identifikasi dan penggunaan 'unggulan kawasan' (peran yang telah diidentifikasi dan berkaitan dengan strategi KKUT) guna mendukung tantangan implementasi masing-masing pemerintah.

- **Negara pihak dan pemangku kepentingan ATT lainnya harus fokus pada mekanisme antarlembaga.**

Langkah ini terkait dengan kerja sama antarlembaga dan memerlukan pembangunan mekanisme implementasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Hal ini krusial untuk kepatuhan yang efektif, terutama mengingat pentingnya kerja sama antarlembaga guna memastikan implementasi yang efektif di tingkat nasional, dan tingginya pergantian pejabat pemerintah. Mempromosikan pertukaran informasi yang aktif dan konstan di antara berbagai lembaga di tingkat nasional (dan, mungkin, sejak proses universalisasi) dapat menjadi langkah pertama menuju peningkatan kerja sama antarlembaga dari waktu ke waktu.

Mengingat prioritas negara dapat berubah karena berbagai alasan dari waktu ke waktu, langkah-langkah untuk mempertahankan komitmen politik dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan menjadi bermanfaat. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup hal berikut: 1) aktor yang mempromosikan kepatuhan ATT (seperti negara-negara pihak dan OMS) dapat menyoroti sinergi ATT dengan instrumen pengendalian senjata lainnya (Spano dan Alpers, 2017b); 2) organisasi kawaan dapat mendukung implementasi ATT sebagai bagian dari pendekatan regional; 3) donor, OMS, dan aktor lain yang mendukung implementasi ATT dapat menghubungkan Traktat tersebut dengan prioritas negara lain yang lebih mendesak; 4) negara dapat berbagi pelajaran, seperti 'praktik unggulan guna mendistribusikan beban kerja dan tanggung jawab yang lebih baik antara lembaga', dalam CSP, pertemuan kelompok kerja, dan kegiatan penjangkauan (ATT BAP, 2017, hlm.

19); 5) negara dapat mengembangkan dan menyederhanakan proses mengumpulkan dan berbagi informasi; dan 6) negara dapat lebih melibatkan pemangku kepentingan industri. Negara juga dapat mempertimbangkan mengembangkan mekanisme antarlembaga permanen di tingkat nasional untuk pemantauan dan tindakan implementasi nasional, yang dapat secara teratur berinteraksi dengan titik kontak nasional (sebagaimana ditunjuk oleh setiap negara pihak sesuai dengan Pasal 5(6)) guna memfasilitasi pertukaran informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Traktat.

- **Para donor harus terus mendukung peningkatan kapasitas bagi sektor-sektor nasional utama yang bertanggung jawab atas keputusan, pemantauan, dan penegakan transfer senjata dengan fokus pada pengembangan mekanisme berkelanjutan di tingkat nasional dan, jika memungkinkan, tingkat subkawasan.**

Kurangnya kapasitas terkadang dapat menghambat kepatuhan yang efektif terhadap Traktat. Bantuan yang paling umum diminta biasanya terkait dengan bantuan teknis dan keuangan, serta bantuan dalam membangun lembaga. Untuk mengatasi kesenjangan kapasitas ini, para donor harus terus menargetkan VTF dan pendanaan donor lainnya pada area kepatuhan yang spesifik, seperti dukungan teknis, pembangunan lembaga, dan analisis kesenjangan dalam kerangka hukum. Penting untuk dicatat bahwa kegiatan seperti lokakarya pengembangan kapasitas, analisis kesenjangan, dukungan pada undang-undang, bantuan untuk daftar pengendalian nasional, bantuan dalam meningkatkan dan membangun kapasitas pelaporan, dan penyediaan peralatan termasuk di antara jenis bantuan yang dapat diberikan VTF kepada negara-negara (United Kingdom, 2024).¹⁰⁸ Dalam hal ini, berbagai OMS dan pelaksana proyek, termasuk Small Arms Survey, juga memiliki pengalaman panjang yang signifikan dalam memberikan pelatihan, fasilitasi kebijakan, dan dukungan di tingkat nasional.

- **Negara, donor, dan pemangku kepentingan ATT lainnya harus mengakui, mendorong, dan mendukung kontribusi OMS dan anggota parlemen dalam mengatasi tantangan di berbagai tahap keterlibatan negara dengan ATT, termasuk kepatuhan.**

OMS, termasuk yang bergerak di bidang kesetaraan gender, memiliki peran advokasi dan pengawasan yang jelas dan berperan penting dalam mengatasi tantangan terhadap universalisasi dan kepatuhan ATT. Memberikan pendanaan rutin kepada OMS dari kawasan tersebut akan memungkinkan mereka untuk merancang proyek yang menasar konteks yang spesifik. Lebih jauh, memasukkan dan melibatkan OMS nasional atau kawasan dalam kegiatan penjangkauan memastikan keberlanjutan dalam upaya menuju ratifikasi dan kepatuhan, serta dialog terkait ATT di tingkat nasional.

OMS di tingkat nasional dapat terlibat aktif dalam universalisasi dan implementasi ATT. Mereka dapat membantu menghasilkan dokumen kabinet, mendorong agenda politik menuju universalisasi atau kepatuhan ATT melalui upaya advokasi, dan mempromosikan kegiatan yang ditargetkan untuk mendukungnya. Seiring berkembangnya dialog dengan pemangku kepentingan nasional, OMS dapat terus mendorong tinjauan legislatif; menyediakan keahlian teknis; memberi masukan kepada pemerintah, pejabat baru, anggota parlemen, dan pemangku kepentingan nasional terkait ATT; menangani

berbagai masalah yang mungkin timbul sebagai bagian dari proses tersebut; berbagi kisah sukses; dan menunjukkan dukungan publik dengan menyediakan, misalnya, konten untuk media atau dengan menyelenggarakan konsultasi dengan pemimpin masyarakat.

OMS dan anggota parlemen juga dapat memainkan peran kunci dalam mengadvokasi universalisasi dan memantau implementasi perjanjian internasional. OMS dapat memberikan analisis independen tentang isu-isu terkait pengendalian senjata dan kekerasan bersenjata. Mereka dapat mengadvokasi dan menyediakan akses ke pengetahuan yang terkadang kurang memadai atas nama pemerintah dan parlemen; merancang dan mendukung kampanye multi-negara untuk negara-negara dengan realitas yang sama; memberikan bantuan di tingkat nasional, kawasan, dan internasional; mengembangkan sumber daya kawasan atau tematik sesuai keperluan; dan memantau kepatuhan ATT. Anggota parlemen memiliki peran pengawasan dan pemberdayaan. Mereka dapat mengemban tugas legislatif dan pengawasan, seperti menyusun rancangan undang-undang, menyelenggarakan inisiatif dan dengar pendapat dialog, menyusun laporan bayangan, dan menentukan anggaran.

Dalam hal ini, KII menyoroti bagaimana perempuan yang aktif dalam OMS mungkin menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam perdebatan senjata global dalam beberapa konteks. Memastikan partisipasi perempuan yang bermakna dalam proses terkait universalisasi dan kepatuhan ATT dengan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam pertukaran pendapat dan kegiatan tidak hanya merupakan sebuah kewajiban hukum, tetapi juga dapat mendorong produksi kebijakan yang lebih baik (Watson, 2024). OMS yang bekerja pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan memainkan peran penting karena mereka membawa perspektif baru tentang bagaimana ATT dapat berkontribusi pada prioritas nasional lainnya, seperti penerapan kerangka kerja nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan; kesetaraan gender; pengurangan kekerasan; dan pembangunan berkelanjutan. Mereka juga dapat membantu mendukung implementasi Pasal 7.4 yang efektif dengan berbagi wawasan dan data tentang bentuk-bentuk spesifik kekerasan berbasis gender terkait senjata dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang lazim di suatu wilayah tertentu, serta jenis-jenis tindakan mitigasi yang akan efektif mencegahnya (Austero dan Watson, 2024). OMS ini juga dapat berperan penting dalam mendukung pekerjaan anggota parlemen dan kementerian dalam hal memantau penerapan langkah-langkah pengendalian senjata nasional dan dalam menyusun strategi yang efektif untuk memastikan kepatuhan ATT.

- **Negara harus mendorong serta mempertahankan kelompok pemangku kepentingan sipil dan narahubung yang lebih luas di tingkat nasional, termasuk industri.**

Beragam pemangku kepentingan dan narahubung dapat memainkan peran penting dalam upaya kepatuhan. Industri pertahanan, misalnya, merupakan pemangku kepentingan vital yang harus dilibatkan dalam merancang langkah-langkah efektif dan praktik unggulan guna mendukung implementasi dan kepatuhan ATT. Industri dan sektor swasta memiliki peran penting tidak hanya dalam memproduksi, tetapi juga mengangkut senjata dan amunisi. Kegiatan dan inisiatif penjangkauan dalam

kerangka ATT di masa lalu dan saat ini telah berupaya untuk melibatkan industri. Misalnya, acara penjangkauan industri merupakan salah satu kegiatan penjangkauan yang berlangsung di Filipina selama proses ratifikasinya (MACAAP, 2016; 2019). Demikian pula dengan pertemuan Kelompok Kerja CSP10 yang mencakup presentasi tentang uji tuntas perusahaan pengekspor senjata. Oleh karena itu, sangatlah berguna untuk terus melibatkan industri dan mempertimbangkan peran yang dapat dimainkannya dalam transfer senjata konvensional internasional yang bertanggung jawab dalam konteks ATT, sebagaimana direkomendasikan pada CSP9 dan fokus tematik kepresidenan Korea Selatan di ATT (ATT Sekretariat, 2023c).

Terakhir, kawasan Indo-Pasifik merupakan tuan rumah bagi beberapa lembaga, *think tank*, dan organisasi penelitian yang mempromosikan pendekatan akademis dan berbasis penelitian pada topik keamanan, pertahanan, dan pengendalian senjata. Organisasi-organisasi semacam itu menyediakan pengetahuan dan keahlian yang berguna untuk tema-tema yang berkaitan dengan Traktat. Para peneliti dan akademisi, misalnya, dapat mendukung berbagai kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan universalisasi dan kepatuhan, seperti proses legislasi dan implementasi nasional. Mereka juga dapat terlibat dengan para aktor militer, pertahanan, dan keamanan di tingkat domestik dan internasional serta memberikan saran berbasis bukti mengenai Traktat tersebut. Kepakaran organisasi-organisasi tersebut, serta para praktisi di bidang-bidang seperti kriminologi, studi pembangunan, dan gender, dapat menyoroti bagaimana ATT dapat berperan dan berkontribusi terhadap tujuan kebijakan nasional lainnya. ●



Keterlibatan yang kuat di tingkat subkawasan dan nasional diperlukan guna meningkatkan universalisasi dan kepatuhan ATT serta mengatasi masalah subkawasan dan nasional yang spesifik dengan lebih baik.”

Kesimpulan

Kawasan Indo-Pasifik yang sangat luas dan beragam menghadirkan berbagai realitas dan tantangan keamanan, dan memwadahi berbagai produsen, eksportir, dan importir utama senjata konvensional serta negara-negara kecil dan pulau-pulau dengan perdagangan yang agak terbatas dan sedikit masalah terkait senjata ilegal. Berbasis alasan-alasan tersebut, sulit untuk secara komprehensif menangkap berbagai tantangan terhadap universalisasi dan kepatuhan ATT dalam satu laporan. Namun demikian, Laporan ini memberikan gambaran sekilas tentang tantangan-tantangan yang ada dan pemahaman yang lebih mendalam terkait kompleksitas ini. Persepsi tentang ATT berbeda di seluruh kawasan, dan tercermin dalam sikap negara-negara terhadap Traktat tersebut. Pada saat yang sama, sikap-sikap ini dibentuk dengan cara yang unik bagi setiap negara serta dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap berbagai masalah dan pertimbangan geopolitik, strategis, perdagangan, dan kapasitas subkawasan maupun nasional.

Keterlibatan yang kuat di tingkat subkawasan dan nasional diperlukan guna meningkatkan universalisasi dan kepatuhan ATT serta menangani masalah subkawasan dan nasional tertentu dengan lebih baik; pendekatan 'satu ukuran untuk semua' tidak dapat menangkap realitas subkawasan dan nasional. Oleh karena itu, dukungan untuk analisis lebih lanjut tentang realitas negara serta keterlibatan yang konstan dan disesuaikan dengan para aktor dan pemangku kepentingan subkawasan dan nasional akan diperlukan guna menghasilkan penerimaan dan keanggotaan terhadap Traktat yang lebih tinggi di kawasan tersebut. Namun, ada beberapa kesamaan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut, sehingga terdapat beberapa langkah umum yang bisa diadopsi.

Laporan ini telah menyoroti sejumlah langkah dan sarana potensial guna mengatasi tantangan terhadap universalisasi dan kepatuhan, yang merupakan titik masuk konkret untuk keterlibatan dan kerja sama lebih lanjut dengan kawasan tersebut. Hal tersebut meliputi: langkah-langkah yang dapat diterapkan lebih lanjut oleh para aktor yang terlibat dalam mempromosikan universalisasi dan kepatuhan ATT, seperti berfokus pada negara-negara yang telah terlibat dengan ATT, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan membangun keterlibatan tersebut; kegiatan yang dapat dipromosikan oleh OMS dan lembaga penelitian, seperti menyediakan bukti dan penelitian yang lebih memadai terkait perdagangan senjata ilegal atau aspek-aspek tertentu dari Traktat guna memungkinkan negara dan lembaga pemerintah menilai tantangan keamanan dan manfaat keanggotaan ATT dengan lebih baik; dan saran bagi negara-negara, seperti mempromosikan kerja sama antarlembaga, baik di dalam negara maupun dengan kawasan dan subkawasan-subkawasan, guna memperlancar transisi menuju keanggotaan ATT, dan bagi negara-negara pihak ATT, khususnya donor dan eksportir utama ATT, untuk memastikan bahwa akses Traktat tersebut dilihat benar-benar sebagai manfaat, bukan beban. Terakhir, mereka menyertakan seruan untuk melibatkan masyarakat sipil, akademisi, industri, dan pihak berkepentingan lainnya dalam membantu membangun kemauan politik menuju keanggotaan ATT dan mempertahankan momentum menuju peningkatan universalitas dan kepatuhan.

Strategi-strategi potensial tersebut berikut yang lainnya tidak hanya akan meningkatkan universalisasi dan kepatuhan, tetapi juga mendukung strategi dan rencana kerja KKUT dan

KKITE saat ini, serta upaya Sekretariat ATT sekarang dan yang akan datang guna mencapai tujuan tersebut. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menawarkan jalan ke depan dan potensi peluang untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat ATT sebagai wahana pengendalian senjata di kawasan tersebut serta memajukan universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan Indo-Pasifik.

OMS tetap menjadi garda terdepan dalam upaya menuju peningkatan universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan tersebut. Dua dari OMS kawasan ini, CAVR dan NISEA, berperan penting dalam pembuatan Laporan ini, dan, bersama dengan organisasi lain di kawasan Indo-Pasifik, tentu dapat berkontribusi lebih banyak. Melibatkan dan menggunakan bakat serta koneksi yang dimiliki OMS kawasan akan sangat penting bagi peningkatan penerimaan ATT di kawasan tersebut.

Terakhir, kawasan Indo-Pasifik memiliki banyak lembaga, *think tank*, dan organisasi penelitian yang cakap yang terlibat dalam isu-isu terkait keamanan, pertahanan, dan pengendalian senjata. Para aktor ini tetap sangat relevan dalam mendukung universalisasi dan kepatuhan karena mereka dapat terlibat dengan pemangku kepentingan militer, pertahanan, dan keamanan serta memberikan saran berbasis bukti tentang cara-cara untuk memperkuat efektivitas universalisasi dan kepatuhan ATT di kawasan Indo-Pasifik.

Sepuluh tahun sejak sah berlaku, ATT tetap menjadi satu-satunya perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk mengatur dan meningkatkan regulasi perdagangan internasional senjata konvensional, serta mencegah dan memberantas perdagangan ilegal senjata konvensional dan mencegah pengalihannya. Dengan demikian, Traktat ini memiliki tujuan untuk berkontribusi pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional maupun kawasan; mengurangi penderitaan manusia; dan mendorong kerja sama, transparansi, dan tindakan yang bertanggung jawab oleh negara-negara pihak dalam perdagangan internasional senjata konvensional—sehingga dapat membangun kepercayaan di antara negara-negara pihak (UNGA, 2013, pasal 1). Universalisasi dan kepatuhan ATT tetap menjadi kunci untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan dalam Traktat. Dengan menyelidiki tantangan terhadap universalisasi dan kepatuhan terhadap ATT di kawasan Indo-Pasifik yang memiliki salah satu tingkat penerimaan terendah terhadap Traktat, Laporan ini telah mengidentifikasi kemungkinan titik masuk dan peluang untuk keterlibatan di masa depan dengan kawasan tersebut. Langkah-langkah ini dapat melengkapi upaya yang tengah berlangsung maupun yang akan datang terhadap universalisasi dan kepatuhan ATT serta memberikan opsi kebijakan lebih lanjut guna mengembangkan dan mendukung strategi keterlibatan yang efektif dengan ATT di kawasan Indo-Pasifik. ●

Catatan akhir

- 1 Beberapa langkah dan kegiatan berikut ini diambil dari atau diusulkan dalam wawancara dan pertukaran informal yang dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari proyek, atau diajukan selama sesi informal khusus bersama undangan yang diselenggarakan dengan negara-negara di kawasan tersebut selama pertemuan Kelompok Kerja ATT pada bulan Februari 2024.
- 2 Dalam Laporan ini, penggunaan istilah Indo-Pasifik merujuk pada 40 negara dan ekonomi yang diidentifikasi oleh Global Affairs Canada: Australia; Bangladesh; Bhutan; Brunei; Kamboja; Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara); India; Indonesia; Jepang; Laos; Malaysia; Maladewa; Mongolia; Myanmar; Nepal; Selandia Baru; negara-negara Kepulauan Pasifik (14); Pakistan; Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok); Filipina; Republik Korea (Korea Selatan); Singapura; Sri Lanka; Taiwan, Tiongkok; Thailand; Timor Leste; dan Vietnam.
- 3 Laporan ini menggunakan istilah ‘Indo-Pasifik’ sesuai dengan catatan akhir 2, tetapi merujuk pada ‘Asia’ atau ‘Asia dan Oseania’ jika sumber aslinya, dalam hal ini SIPRI, menyebutkan demikian. Cakupan geografis Asia dan Oseania, sebagaimana didefinisikan oleh SIPRI, melingkupi semua negara dan perekonomian yang menjadi perhatian Laporan, ditambah Afghanistan dan Asia Tengah (Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan).
- 4 Negara-negara tersebut adalah Australia, Tiongkok, Jepang, Maladewa, Selandia Baru, Niue, Palau, Filipina, Korea Selatan, Samoa, dan Tuvalu. Daftar ini didasarkan pada batas geografis Indo-Pasifik yang tercantum dalam catatan akhir 2, bukan batas geografis Asia dan Oseania yang digunakan oleh Sekretariat ATT.
- 5 Negara-negara tersebut adalah Bangladesh, Kamboja, Kiribati, Malaysia, Mongolia, Nauru, Singapura, Thailand, dan Vanuatu. Daftar ini didasarkan pada batasan geografis Indo-Pasifik yang tercantum dalam Catatan Akhir 2, bukan berdasarkan batasan geografis di Asia dan Oseania yang digunakan oleh Sekretariat ATT.
- 6 Kepatuhan didefinisikan sebagai ‘kondisi kesesuaian atau identitas antara perilaku aktor dan aturan yang ditetapkan’ (Raustiala dan Slaughter, 2002, p. 539). Mengenai perbedaan antara kepatuhan dan ‘implementasi’, lihat Raustiala dan Slaughter (2002, pp. 538–39).
- 7 Untuk definisi ‘kesetaraan gender’, lihat LeBrun (2019, h. 21).
- 8 Para penulis melacak aktivitas yang ditawarkan oleh KKUT, Sekretariat ATT, organisasi kawasan, dan pelaksana EU P2P Arms Trade Treaty Outreach Programme: BAFA dan Expertise France.
- 9 Ini termasuk semua proyek yang didanai oleh ATT VTF, Fasilitas Perwalian yang Mendukung

Kerja Sama Regulasi Senjata PBB (UN Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation/UNSCAR), dan donor bilateral.

- 10 Narasumber yang diwawancarai meliputi mantan presiden CSP dan wakil ketua KKUT, pejabat nasional, pejabat organisasi internasional, perwakilan lembaga nasional yang melaksanakan program bantuan, peneliti, dan perwakilan OMS. Sebagian besar narasumber berbicara atas nama pribadi dan bukan sebagai perwakilan pemerintah. Hal ini memastikan adanya pertukaran pendapat terbuka tentang sikap terhadap ATT dan kemungkinan tantangan terhadap universalisasi dan kepatuhan. Untuk menjaga anonimitas responden, informasi yang dikumpulkan dari percakapan dan wawancara tidak dikaitkan dengan narasumber tertentu.
- 11 Termasuk hasil dari penelitian ini, sebuah luaran blog tentang aspek gender terkait ATT diterbitkan sebagai bagian dari proyek 'Memahami Tantangan terhadap Universalisasi dan Kepatuhan Traktat Perdagangan Senjata (ATT) di Kawasan Indo-Pasifik' (lihat Austero dan Watson, 2024).
- 12 Definisi SIPRI tentang pengeluaran militer 'bertujuan mencakup semua pengeluaran untuk pasukan dan kegiatan militer saat ini'. Definisi ini juga mencakup pengeluaran untuk persenjataan, sistem dan platform persenjataan, serta peralatan militer khusus lainnya (termasuk penelitian dan pengembangan untuk peralatan tersebut) (SIPRI, n.d.b).
- 13 Laporan ini menggunakan istilah 'senjata kecil' untuk merujuk kepada senjata kecil dan senjata ringan. Akan tetapi, istilah 'senjata ringan' selalu merujuk hanya kepada senjata-senjata tersebut. Istilah 'senjata api' mencakup senjata ringan dan senapan mesin berat.
- 14 Lihat UNROCA (n.d.b); SIPRI (n.d.c); dan UN Comtrade (n.d.).
- 15 Cakupan ATT—yaitu, segala hal dan aktivitas yang ATT wajibkan ke negara-negara pihak untuk diatur melalui sistem pengendalian nasional mereka—ditentukan dalam Pasal 2. Perjanjian ini berlaku untuk delapan kategori senjata konvensional: (a) tank tempur; (b) kendaraan tempur lapis baja; (c) sistem artileri kaliber besar; (d) pesawat tempur; (e) helikopter serang; (f) kapal perang; (g) rudal dan peluncur rudal; dan (h) senjata kecil dan senjata ringan (UNGA, 2013, pasal 2(1)). Definisi ATT sesuai dengan daftar UNROCA pada saat mulai berlakunya Traktat pada 24 Desember 2014 (pasal 5(3)). Sejak saat itu, kategori UNROCA telah diamandemen, sementara cakupan minimum ATT belum berkembang (Holtom, 2021; Varisco, Maletta, dan Robin, 2021, hh. 5–13).
- 16 Negara-negara tersebut adalah Australia, Tiongkok, India, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Palau, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pelaporan mengenai transfer senjata kecil dan senjata ringan ke UNROCA bersifat opsional (Holtom, 2021). Untuk definisi senjata kecil dan senjata ringan, lihat International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (ITI) (UNGA, 2005, pasal 4).
- 17 Menurut definisi Pangkalan Data Transfer Senjata SIPRI, senjata utama meliputi: pesawat terbang; sistem pertahanan udara; senjata antikapal selam; kendaraan lapis baja; artileri; mesin; rudal; sensor; satelit; kapal; dan lain-lain (menara khusus untuk kendaraan lapis baja dan kapal, serta sistem pengisian bahan bakar udara). Untuk informasi lebih lanjut, lihat SIPRI (n.d.d).
- 18 Kode HS merujuk pada Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas Terharmonisasi yang dikembangkan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization) dan umum digunakan di seluruh dunia (WCO, t.t.).
- 19 Pada tahun 1971, PBB mengakui Taiwan sebagai salah satu provinsi di Tiongkok.
- 20 Para penulis mendefinisikan kemandirian sebagai 'kemampuan suatu negara untuk merancang dan memproduksi barang-barang militer dalam negeri pada seluruh spektrum kebutuhan angkatan bersenjata, tanpa masukan teknologi asing' (Béraud-Sudreau et al., 2022, h. 1).

- 21 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, November 2023 dan Januari 2024.
- 22 Lihat Jenzen-Jones (2014); Matthews dan Koh (2019, bab 25); Ammoterra (n.d.); Picard, Holtom, dan Mangan (2019); dan Chopra (2020).
- 23 Data untuk tahun 2023 disertakan sebagaimana tersedia pada saat artikel ini ditulis.
- 24 UNROCA mencakup kategori senjata konvensional berikut: tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur dan kendaraan udara tempur tak berawak (UCAV), helikopter serang, kapal perang, rudal, dan peluncur rudal (UNROCA, n.d.a). Karena pelaporan kepada UNROCA tentang senjata kecil dan senjata ringan bersifat opsional, data terkait kategori ini disajikan secara terpisah.
- 25 Negara-negara tersebut adalah Australia, Brunei, China, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand (meskipun Brunei, Indonesia, Jepang, dan Filipina tidak melaporkan ekspor apa pun). Tidak ada data yang tersedia untuk negara-negara lainnya.
- 26 Untuk tinjauan umum diskusi dalam UNROCA tentang pelaporan senjata ringan, lihat Holtom (2021). UNROCA mencakup jenis senjata ringan berikut: revolver dan pistol yang dapat diisi sendiri, senapan dan karabin, senapan mesin ringan, senapan serbu, dan senapan mesin ringan. UNROCA mendefinisikan senjata ringan sebagai: senapan mesin berat, peluncur granat genggam dan peluncur granat terpasang, senapan antitank portabel, senapan tanpa hentakan, peluncur rudal antitank portabel dan sistem roket, serta mortir kaliber kurang dari 75 mm (UNROCA, n.d.a).
- 27 Negara-negara tersebut adalah Australia, China, India, india, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Korea Utara, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Tidak ada data yang tersedia untuk negara-negara lainnya.
- 28 Lihat catatan akhir 17 untuk kategori senjata utama SIPRI.
- 29 Untuk penjelasan rinci tentang metodologinya, lihat SIPRI (n.d.d).
- 30 SIPRI menyediakan informasi tentang tren beserta datanya. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang data SIPRI, Laporan ini menyertakan informasi tambahan ini.
- 31 Pangkalan data ini menggunakan kode HS berikut: 930190 (senjata militer, selain revolver, pistol, dan senjata api yang termasuk dalam pos 93.07); 930200 (revolver dan pistol, selain yang termasuk dalam pos 93.03 atau 93.04); 930310 (senjata api laras panjang); 930320 (senjata api olah raga, berburu, atau menembak sasaran lainnya, termasuk senapan kombinasi); 930330 (senjata api olah raga, berburu, atau menembak sasaran lainnya); dan 930120 (peluncur roket, pelontar api, peluncur granat, tabung torpedo, dan proyektor serupa). Lihat juga Jenzen-Jones dan Schroeder (2018) dan catatan akhir 19.
- 32 Lihat juga Jenzen-Jones and Schroeder (2018).
- 33 Data amunisi diambil pada bulan Desember 2023.
- 34 Data untuk tahun 2023 disertakan sesuai dengan data yang tersedia pada saat artikel ini ditulis.
- 35 Asia dan Oseania juga merupakan kawasan geografis terbesar dalam cakupan kawasan SIPRI, sehingga sebagian dapat menjelaskan tingginya nilai impor.
- 36 Maladewa dan Nepal melaporkan jumlah senjata kecil yang sangat tinggi berdasarkan beberapa kode tertentu (Maladewa melaporkan 1.208.154 senjata ringan berdasarkan kode ST 930190 pada tahun 2019, dan Nepal melaporkan 639.069 senjata kecil berdasarkan kode ST 930190 pada tahun 2020). Kemungkinan besar ini adalah contoh kesalahan pelaporan, sehingga temuan asing tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan total.
- 37 Lihat subbagian 'Sumber senjata ilegal' untuk informasi lebih lanjut mengenai perantara.
- 38 Bagian ini utamanya bergantung pada tinjauan pustaka sumber-sumber sekunder.
- 39 Terdapat tumpang tindih tertentu antara definisi senjata api dan senjata kecil (Florquin, Lipott, dan Wairagu, 2019, h. 23). Subbagian ini menggunakan istilah 'senjata api'

- apabila sumber aslinya juga menggunakan istilah tersebut. Lihat juga catatan akhir 13.
- 40 Menurut Indeks Kejahatan Terorganisir Global, 'perdagangan senjata melibatkan impor, ekspor, perolehan, penjualan, pengiriman, pergerakan atau transfer senjata, bagian dan komponennya, dan amunisi lintas batas negara, serta pengalihan senjata api yang disengaja dari perdagangan legal ke perdagangan ilegal tanpa melibatkan pergerakan barang lintas batas fisik' (Global Organized Crime Index, n.d.b).
 - 41 Hal ini juga didukung oleh percakapan penulis dengan sumber rahasia pada bulan Juni 2024.
 - 42 Salah satu penulis studi ini juga melakukan penelitian lapangan tentang senjata ilegal di sepanjang perbatasan Nepal-India pada tahun 2014.
 - 43 Penting untuk dicatat bahwa data mengenai moda transportasi sering kali dipengaruhi oleh praktik bea cukai.
 - 44 PBB mendefinisikan 'perantara' sebagai 'seseorang atau badan yang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pihak-pihak terkait dan mengatur atau memfasilitasi potensi transaksi senjata kecil dan senjata ringan dengan imbalan beberapa bentuk keuntungan, baik finansial maupun lainnya'. 'Perantara' didefinisikan sebagai 'kegiatan yang dilakukan oleh perantara dalam konteks mengatur atau memfasilitasi transfer internasional senjata kecil dan senjata ringan' (PBB, 2018). Mengenai perantara ilegal, lihat UNGA (2007).
 - 45 Percakapan penulis dengan sumber rahasia, Juni 2024.
 - 46 Contoh kelompok ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: kelompok yang berafiliasi dengan kelompok bersenjata non-negara ISIS, Mujahidin Kashmir, Organisasi Solidaritas Rohingya, Dewan Sosialis Nasional Nagaland, Gerakan Aceh Merdeka, Abu Sayyaf, Front Pembebasan Islam Moro di Filipina, dan Organisasi Pembebasan Bersatu Patani (Rana and Nesa, 2018; Dahari, Idris, dan Othman, 2019; Cheema, 2014; Siyech, 2019; Tri Wulandari and Antari, 2021; ICG, 2018; and Koorey, 2016).
 - 47 Sebagai contoh lebih lanjut, Pasal II(6) ITI mendefinisikan senjata kecil dan senjata ringan sebagai senjata terlarang jika '[senjata] tersebut ditransfer dengan melanggar embargo senjata yang diputuskan oleh Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa' (UNGA, 2005, h. 3).
 - 48 Royal United Services Institute telah membuat 'DPRK Reports Database' yang menyediakan data ringkasan tentang sifat kegiatan dan entitas yang didokumentasikan oleh laporan panel. Lihat RUSI (n.d.).
 - 49 'Rezim sanksi' Korea Utara mencakup berbagai barang dan jasa yang semakin komprehensif di sepuluh resolusi DK PBB. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: embargo senjata (termasuk senjata konvensional) dan materiel; embargo barang, materiel, peralatan, barang, dan teknologi yang relevan dengan program nuklir, rudal balistik, dan senjata pemusnah massal lainnya; dan ketentuan umum yang terkait dengan senjata dan materiel serta barang-barang dengan fungsi ganda. Untuk informasi lebih lanjut tentang semua tindakan yang termasuk dalam rezim sanksi Korea Utara, lihat DK PBB (2018).
 - 50 Pada tahun 2013, otoritas Panama menghentikan dan memeriksa kapal ini serta menemukan, di bawah lebih dari 200.000 karung gula, total 240 ton senjata dan perlengkapan terkait, kapal tersebut disembunyikan. Pengiriman tersebut, yang berasal dari Kuba, ditujukan ke Korea Utara (DK PBB, 2014, paras. 69–74, annexe VIII).
 - 51 Laporan menunjukkan bahwa Rusia, negara anggota P5 DK PBB, tengah mendapatkan senjata dan amunisi dari Korea Utara guna melanjutkan upaya perangnya di Ukraina (DK PBB, 2023, para. 122), serta veto terbarunya terhadap adopsi resolusi untuk memperpanjang mandat panel Korea Utara hingga 30 April 2025 (PBB, 2024), melemahkan tujuan umum embargo senjata tersebut.
 - 52 Jenis senjata ini juga disebut sebagai senjata rakitan, artisanal, hasil improvisasi, atau

- rumahan, atau senjata api buatan pribadi (Haug dan Kramer, 2002; Batchelor, 2003).
- 53 Definisi ITI untuk 'senjata kecil dan senjata ringan ilegal' juga mencakup senjata kecil yang 'dianggap ilegal menurut hukum negara yang dalam yurisdiksi teritorialnya senjata kecil atau senjata ringan tersebut ditemukan', 'tidak ditandai sesuai dengan ketentuan Instrumen ini', 'diproduksi atau dirakit tanpa lisensi atau otorisasi dari otoritas yang berwenang di negara tempat pembuatan atau perakitan berlangsung', atau 'ditransfer tanpa lisensi atau otorisasi oleh otoritas nasional yang berwenang' (UNGA, 2005, pasal 6). Seiring dengan meningkatnya produksi, penggunaan, dan transfer senjata kecil dan senjata ringan buatan pribadi dan nonindustri lainnya, meningkat pula dampaknya terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas, bersamaan dengan tantangan bagi peraturan pengendalian produksi dan ekspor yang ada.
 - 54 Untuk perspektif historis produksi senjata lokal di Pakistan, lihat Shah Khan (2005); Batchelor (2003); dan Malik, S. (2000).
 - 55 Sekitar setengah dari senjata ilegal yang didokumentasikan oleh Conflict Armament Research di Afghanistan antara tahun 2019 dan 2021 merupakan tiruan yang diproduksi di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan. Lihat CAR (2021).
 - 56 Lihat Chheng (2016); Chanveasna (2016; 2017); dan Khouth (2015). Untuk artikel terkait Vietnam, lihat Tieu dan Minh (2023).
 - 57 Lihat juga Al Jazeera (2024). Hal ini juga dapat memicu transfer pengetahuan yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata tersebut ke kelompok lain di wilayah itu.
 - 58 Sebuah analisis pada tahun 2024 terhadap video-video yang menunjukkan senjata yang digunakan oleh para kombatan di provinsi dataran tinggi Enga, Papua Nugini, juga menyimpulkan bahwa sebagian besar senjata yang dibawa oleh para kombatan tampaknya adalah senapan single-shot hasil rakitan dengan kaliber yang kira-kira setara dengan 12 gauge, sementara sebagian kecil tampaknya menggunakan senapan single-shot hasil produksi pabrik secara massal (pertukaran informasi dengan Philip Alpers, Juni 2024; ABC News, 2024; Swanston dan Clark, 2024).
 - 59 CAVR berkontribusi pada temuan dari subbagian ini dengan makalah latar belakang (CAVR, 2024).
 - 60 Pada tanggal 28 April 1996, 35 orang tewas dalam penembakan massal di kawasan wisata Port Arthur di Tasmania tenggara, dan memicu perdebatan nasional tentang kepemilikan senjata pribadi, khususnya senjata semi-otomatis dan otomatis (National Museum Australia, 2023).
 - 61 Bushmaster adalah kendaraan mobilitas yang dilindungi.
 - 62 Perang pemisahan diri selama sembilan tahun di Bougainville berakhir pada tahun 1997 dan mengakibatkan tewasnya ratusan tentara dan pemberontak serta 10.000 hingga 15.000 warga sipil, baik akibat pertempuran atau karena penyakit dan kekurangan (CAVR, 2024; Australia, 1999).
 - 63 Komite Pengendalian Senjata, yang dibentuk pada tahun 2005, melakukan penilaian komprehensif terhadap kerangka hukum dan sistem administrasi dan menyampaikan laporan mendalam yang berisi 244 rekomendasi.
 - 64 NISEA berkontribusi pada temuan dari subbagian ini dengan makalah latar belakang (NISEA, 2024).
 - 65 Proyek 'Transparansi dalam Persenjataan: Mempromosikan UN Register of Conventional Arms di Kawasan ASEAN', yang dilaksanakan oleh SIPRI, dan 'Kekerasan Senjata dan Perdagangan Senjata Ringan Ilegal dari Perspektif Gender', yang dilaksanakan oleh UNRCPPD, misalnya, didanai oleh UNSCAR masing-masing pada tahun 2021 dan 2018.
 - 66 Pada bulan Mei 2017, kelompok bersenjata yang terinspirasi oleh ISIS merebut Marawi, sebuah 'pusat ekonomi di provinsi Lanao del Sur di Mindanao, pulau terbesar kedua di Filipina'. Militer Filipina kembali menguasai kota tersebut setelah lima bulan (ICG, 2018).

- 67 Upaya bantuan ini mencakup lokakarya dan pelatihan mengenai pemantauan RAN, pelaporan UNROCA, perizinan, investigasi dan kebijakan serta prosedur penegakan hukum, dan penguatan sistem pengendalian senjata, serta acara penjangkauan industri dan kunjungan studi ke Pelabuhan Rotterdam. Selain itu, Program Pengendalian Ekspor dan Keamanan Perbatasan Terkait (EXBS) Amerika Serikat memberikan bantuan melalui program USAID di wilayah Mindanao yang terdampak konflik dengan tujuan memperkuat landasan bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
- 68 Sebagai contoh, Malaysia menyediakan keahlian teknis untuk pelatihan VTF ATT Filipina bagi lembaga garis depannya pada tahun 2018, dan negara tersebut terlibat dalam lokakarya nasional tentang embargo senjata yang diselenggarakan oleh Small Arms Survey dan NISEA. Malaysia, Filipina, dan NISEA juga merupakan bagian dari kerangka kerja sama pada inisiatif regional terkait ATT.
- 69 Infografis OHCHR menyebutkan transfer dari negara-negara di kawasan, seperti China, India, Singapura, dan Thailand.
- 70 Thailand tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif terhadap partisipasi kawasan dalam ATT, tetapi juga dapat menjadi model bagi legislasi inklusif lainnya terkait Pasal 7.4. Misalnya, Thailand dan Filipina telah memberlakukan legislasi yang dapat menjadi model bagi legislasi tentang inklusi gender dan pengakuan gender atau jenis kelamin non-biner yang saat ini digunakan secara global (Sawitta Lefevre, 2015; Cervantes, 2024).
- 71 Negara ini memiliki kebijakan nol-toleransi terhadap senjata api ilegal dan hukumannya mencakup penjara seumur hidup (NISEA, 2024).
- 72 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 73 Di satu sisi, peningkatan kemampuan pertahanan Mongolia untuk menjaga diri dari potensi agresi dari negara-negara tetangga (strategi yang dikenal sebagai penyeimbangan internal) menimbulkan biaya ekonomi yang signifikan dan tidak proporsional untuk jangka panjang. Di sisi lain, prospek Mongolia mencari keamanan melalui penyeimbangan eksternal dengan bersekutu secara militer dengan negara-negara lain juga tidak tepat karena hubungan 'persahabatan' saat ini dengan negara-negara tetangganya. Dengan demikian, strategi keamanan dan kebijakan luar negeri utama Mongolia bertujuan untuk mempertahankan netralitas militer sambil mengejar penyeimbangan lunak (Mendee and Soyolgerel, 2022).
- 74 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 75 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, November 2023.
- 76 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, November 2023 dan Januari 2024.
- 77 Proyek-proyek yang telah dilakukan antara lain, misalnya, 'Lokakarya Peningkatan Kapasitas untuk Program Aksi dan Traktat Perdagangan Senjata' pada tahun 2015 di Bangladesh, 'Proyek Bantuan Teknis dan Hukum untuk Mendukung Sri Lanka dalam Implementasi UN PoA dan ATT' pada tahun 2018 di Sri Lanka, dan 'Lokakarya Nasional untuk Mempromosikan Traktat Perdagangan Senjata (ATT) dan Mendukung Akses Nepal terhadap Traktat tersebut' pada tahun 2021 di Nepal.
- 78 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, April 2024.
- 79 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, November dan Desember 2023.
- 80 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 81 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024, dan UNROCA
- 82 Pada saat penulisan ini, Maladewa belum menyerahkan laporan tahunan untuk tahun 2023.
- 83 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 84 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 85 Proyek 'Pelatihan Pengendalian Senjata Kecil yang Mengarusutamakan Gender dan Kontribusinya terhadap Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di Nepal',

- misalnya, diselenggarakan oleh UNRCPD pada tahun 2022.
- 86 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 87 Korespondensi tertulis dengan sumber rahasia, Juni 2024.
- 88 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Februari 2024.
- 89 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Februari 2024.
- 90 Lihat juga sanksi Kanada terkait Sri Lanka (Canada, 2023).
- 91 Lihat ATT BAP (2017); ATT Monitor (2018); Persi Paoli dan Kytomaki (2016); dan ATT Sekretariat (2018a, annexe A).
- 92 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 93 India, misalnya, bertujuan memperluas ekspor peralatan pertahanannya hingga senilai USD 2 miliar ke sejumlah negara termasuk Bangladesh dan Vietnam (Sharma and Finaud, 2019).
- 94 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 95 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Februari 2024; lihat juga NISEA (2024) dan Varella (2024).
- 96 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024.
- 97 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, November 2023 dan Januari 2024.
- 98 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, November 2023 dan Januari 2024.
- 99 Proyek tersebut dapat dilaksanakan oleh, atau bekerja sama dengan, badan PBB, organisasi internasional atau regional, OMS, atau badan lain yang disebutkan dalam aplikasi.
- 100 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari 2024. Beberapa ahli mengusulkan bahwa ‘donor VTF dapat mengirim surat ke negara non-pihak terkait akses bantuan’ (Varisco, Maletta, dan Robin, 2021).
- 101 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, November 2023 dan Januari 2024.
- 102 Wawancara penulis dengan sumber rahasia, Januari dan Februari 2024; lihat juga Jolly (2023, h. 42); NISEA (2024).
- 103 Beberapa langkah dan kegiatan berikut ini diambil dari atau diusulkan dalam wawancara dan pertukaran informal yang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan selama proyek berlangsung, atau diajukan selama sesi informal hanya dengan undangan yang diselenggarakan dengan negara-negara di kawasan tersebut selama pertemuan Kelompok Kerja ATT pada bulan Februari 2024.
- 104 Kriteria seleksi Program Sponsorship ATT mencakup ‘Status ATT (yaitu apakah pemohon merupakan Negara Pihak, Negara Penanda tangan, atau negara yang belum bergabung dengan Traktat), dengan memperhatikan prioritas implementasi dan universalisasi ATT sebagaimana ditentukan oleh KNP’ (ATT Sekretariat, 2019b).
- 105 Lihat, misalnya, kursus yang disediakan oleh Stimson Center tentang ‘Penguatan Kontrol Transit, Transshipment, dan Brokering untuk Mencegah Pengalihan Senjata Terlarang’ (Kaya, t.t.).
- 106 Misalnya, di Filipina, ‘semua otoritas pemerintah terkait mengajukan makalah posisi yang mendukung ratifikasi Traktat’ (NISEA, 2024), dan Thailand menyelenggarakan kegiatan penjangkauan ATT pada tahun 2024 yang mencakup pejabat dari semua lembaga, kementerian, dan otoritas penegak hukum terkait di Thailand, termasuk Otoritas Pelabuhan (BAFA, 2024).
- 107 Presentasi tersebut saat ini sering disertakan di antara materi yang dapat diakses dari kalender ‘acara’.
- 108 Beberapa bidang kerja sama dalam Program Penjangkauan Traktat Perdagangan Senjata P2P Uni Eropa juga mencakup ratifikasi, legislasi, bantuan dalam menetapkan daftar pengendalian nasional, dukungan perizinan, pelaporan, pencegahan pengalihan, pelatihan bea cukai, kewenangan kendali, dan kerja sama antarlembaga.

Referensi

- ABC News. 2024. 'Weapons Used in PNG Highlands Massacre Were Australian Rifles.' 1 March.
- Abhayagunawardena, Vidya. 2018. 'Post-war Sri Lanka & the Arms Trade Treaty.' *Colombo Telegraph*. 6 June.
- ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project). 2024. 'Q&A: The Worsening Trend of Violence in Papua New Guinea.' 28 February.
- Al Jazeera. 2024. 'How Myanmar's Rebel Fighters Are Using 3D-printed Guns to Challenge Military Rulers.' YouTube. Posted on 2 April.
- Alpers, Philip. 2005. *Gun-running in Papua New Guinea: From Arrows to Assault Weapons in the Southern Highlands*. Special Report No 5. Geneva: Small Arms Survey. June.
- . 2008. 'Papua New Guinea: Small Numbers, Big Fuss, Real Results.' In Aaron Karp, ed. *The Politics of Destroying Surplus Small Arms and Ammunition: Inconspicuous Disarmament*. London: Taylor & Francis, pp. 151–74.
- and Conor Twyford. 2003. *Small Arms in the Pacific*. Occasional Paper No. 8. Geneva: Small Arms Survey. March.
- , Robert Muggah, and Conor Twyford. 2004. 'Trouble in Paradise: Small Arms in the Pacific.' In Small Arms Survey. *Small Arms Survey 2004: Rights at Risk*. Oxford: Oxford University Press, pp. 277–307.
- Ammoterra. n.d. 'Companies.'
- AOAV (Action on Armed Violence). 2023. 'Case Studies: Myanmar Military – Assessing the Effectiveness of the Arms Trade Treaty, Part 7.' 15 February.
- Arnold, Aaron. 2023. 'How Countries Continue to Underestimate Their Risk Exposure to North Korea.' London: RUSI (Royal United Services Institute). 5 October.
- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). 2021. Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Comprehensive Partnership between ASEAN and the United Nations (2021-2025).
- . 2023. Declaration on Combating Arms Smuggling. Labuan Bajo, Indonesia. 21 August.
- ATT (Arms Trade Treaty) BAP (Baseline Assessment Project). 2017. *Reporting Challenges and Assistance Needs in the Asia-Pacific Region*. Washington, DC: Stimson Center.
- ATT Monitor. 2018. *ATT Monitor Report 2018*. New York: Control Arms.
- ATT Secretariat. 2018a. 'Co-chairs' Draft Report to KNP4.' TT/KNP4.WGTU/2018/CHAIR/356/Conf.Rep of 20 July.
- . 2018b. 'Working Group on Treaty Universalization: Work Plan for the KNP4 Preparatory Meetings.' ATT/KNP4.WGTU/2018/CHAIR/249/M1.WorkPlan of 9 February.

- . 2019a. ‘(DRAFT) “Welcome Pack” for New States Parties to the Arms Trade Treaty.’ ATT/KNP5.WGTU/2019/CHAIR/532/Conf.Rep of 26 July. Translated versions available at: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>
 - . 2019b. ‘ATT Sponsorship Programme: Draft Administrative Guidelines.’ ATT/KNP5/2019/SEC/530/SponProgRep of 26 July.
 - . 2023a. ‘ATT Working Group on Treaty Universalization: Co-Chairs’ Draft Report to KNP9.’ ATT/KNP9.WGTU/2023/CHAIR/769/Conf.Rep of 21 July.
 - . 2023b. *Final Report of the Ninth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty.* ATT/KNP9/2023/SEC/773/Conf.Fin.Report of 25 August.
 - . 2023c. ‘Draft Working Paper Presented by the President of the Ninth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (ATT): The Role of Industry in Responsible International Transfers of Conventional Arms.’ ATT/KNP9/2023/PRES/766/Conf.WP.Ind of 21 July.
 - . 2024a. ‘Draft Working Paper Presented by the President of the Tenth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (ATT): The Role of Interagency Cooperation in the Effective Implementation of Arms Trade Treaty Provisions’. ATT/KNP10/2024/PRES/798/Conf.WP.IAC of 19 July.
 - . 2024b. ‘Report on the ATT Sponsorship Programme for the Period 2023/2024.’ ATT/KNP10/2024/SEC/795/Conf.SponProgRep of 19 July.
 - . 2024c. ‘Treaty Status.’ Accessed 30 June 2024.
 - . 2024d. ‘Voluntary Trust Fund (VTF).’
 - . 2024e. ‘Voluntary Trust Fund Selection Committee.’
 - . 2024f. ‘ATT Working Group on Effective Treaty Implementation: Chair’s Report to KNP10.’ ATT/KNP10.WGETI/2024/CHAIR/799/Conf.Rep of 19 July.
 - . 2024g. ‘Working Group on Treaty Universalization: Co-Chairs’ Report to KNP10.’ ATT/KNP10.WGTU/2024/CHAIR/801/ConfRep of 19 July.
 - . 2024h. ‘Report on the ATT Sponsorship Programme for the Period 2023/2024.’ ATT/KNP10/2024/SEC/795/Conf.SponProgRep of 19 July.
 - . n.d. ‘Annual Reports.’ Accessed 31 July 2024.
- Atwood, David, Gian Giezendanner, and Sophie Timmermans, 2023. *The Value of Reporting: National Reporting Practices under the UN Sanctions Regime on North Korea.* Report. Geneva: Small Arms Survey. April.
- Austero, Mitzi and Callum Watson. 2024. ‘The Dawning of a New Approach? Gender Dynamics of the Arms Trade in the Indo-Pacific Region.’ Small Arms Survey Blog. 31 July.
- and Pauleen Gorospe. 2019. ‘Challenges in Developing a Risk Assessment Criteria for Arms Transfers in Southeast Asia.’ *The Journal of Research Institute for the History of Global Arms Transfer.* No. 8, July. Tokyo: Meiji University Research Institute for the History of Global Arms Transfer, pp. 39–53.
- Australia. 1999. ‘History of the Bougainville Conflict.’ In Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade Inquiry, Parliament of Australia. *Bougainville: The Peace Process and Beyond.* Canberra: Parliament of Australia.
- BAFA (German Federal Foreign Office for Economic Affairs and Export Control). 2024. Presentation of Thailand to the EU Arms Trade Treaty Outreach Project III 2nd National Assistance Workshop 13–14 March 2024, Bangkok, Thailand.
- Bangkok Post.* 2021. ‘UN Calls for Member States to “Prevent the Flow of Arms” into Myanmar.’ 19 June.
- Batchelor, Peter. 2003. ‘Workshops and Factories: Products and Producers.’ In Small Arms Survey. *Small Arms Survey 2003: Development Denied.* Oxford: Oxford University Press, pp. 8–55.

- BBC News. 2020. 'Sri Lanka Attacks: Easter Sunday Bombings Marked One Year On.' 21 April.
- BD News 24. 2005. 'RSO Owns Arms-ammunition Recovered from Naikhyanchhari?' 2 September.
- Béraud-Sudreau, Lucie, et al. 2022. *Arms-production Capabilities in the Indo-Pacific Region: Measuring Self-reliance*. Stockholm: SIPRI. October.
- Bhutan. 2016. Document provided to the ATT Secretariat by Ministry of Foreign Affairs of Bhutan.
- Bogati, Subindra. 2014. 'A Farewell To Arms.' *Kathmandu Post*. 11 November.
- Bright, David and Monique Mann. 2022. '3D-printed Guns Are on the Rise in Australia. How Can We Prevent Them Being Made?' *The Conversation*. 8 November.
- , et al. 2022. "'I Know a Guy and He's Got Guns Galore": Accessing Crime Guns in the Australian Illicit Firearms Market.' *Deviant Behavior*, Vol. 44, No. 5, pp. 671–89.
- Brunei. 2021. *Defending the Nation's Sovereignty: A Secure and Resilient Future*. Defence White Paper 2021. Ministry of Defence.
- Buscemi, Francesco. 2019. 'Armed Political Orders through the Prism of Arms: Relations between Weapons and Insurgencies in Myanmar And Ukraine.' *Interdisciplinary Political Studies*, Vol. 5, No. 1. 24 June, pp. 189–231.
- Canada. 2023. 'Canadian Sanctions Related to Sri Lanka.' Global Affairs Canada.
- CAR (Conflict Armament Research). 2021. *Taliban Seizures of US Equipment Are only a Fraction of the Story*. Illicit Weapons in Afghanistan, Issue 1. London: CAR. September.
- CAVR (Centre for Armed Violence Reduction). 2024. *Pacific ATT Background Paper for the Small Arms Survey*. Unpublished background paper.
- CERL (Conception Etude Realisation Logistique). 2023. 'World Ports Ranking: The Leaders in Container Traffic.' 11 April.
- Cervantes, Filane Mikee. 2024. 'Congress Marks Milestone in Legislating Gender Equality Bills in 2023.' Philippine News Agency. 18 January.
- Chanveasna, Ros. 2016. 'Homemade Guns Handed In.' *Khmer Times*. 31 October.
- . 2017. 'Hundreds of Homemade Rifles off the Streets.' *Khmer Times*. 14 June.
- Cheema, Raheela Asfa. 2014. 'Small Arms Trafficking and Crime-Terror Nexus.' *Defence Journal*, Vol. 17, No. 7, pp. 46–53.
- Chen, Heather. 2023a. 'Malaysia Bans Israeli Owned and Linked Shipping Citing "Cruelty against the Palestinian People".' CNN. 20 December.
- . 2023b. 'UN Expert Says Myanmar Imported \$1 Billion in Arms since Coup, Much of It from Russia and China.' CNN. 19 May.
- Chheng, Niem. 2016. 'Pursat Police Burn More Than 200 Homemade Guns.' *Phnom Penh Post*. 8 April.
- China. 2020. 'Statement of the People's Republic of China to the Sixth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty.' 17 August.
- . 2021. 'General Statement of the People's Republic of China to the Seventh Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty.' Geneva. August.
- . 2022. 'Statement of the Chinese Delegation at the Thematic Discussion on Conventional Weapons at the First Committee of the 77th Session of the UNGA.' 21 October.
- . 2023. 'The Global Security Initiative Concept Paper.' Ministry of Foreign Affairs. 21 February.
- . 2024. 'China Experience in Controlled Delivery to Combat Firearm Trafficking via Postal and Courier Channels.' Presentation, Regional Preparatory Meeting for the Fourth Review Conference on the PoA on Small Arms and Light Weapons – Asia-Pacific. Nepal, Kathmandu. January.
- Chopra, Anil. 2020. 'China's Rise as an Arms Exporter: Implications for India.' *CLAWS Journal*, Vol. 13, No. 2, pp. 81–96.
- Chowdhury, Md. Nazmul Hasan. 2006. 'The Resistance Movement in the Chittagong Hill Tracts: Global and Regional Connections.' *Asian Affairs*, Vol. 28, No. 4, pp. 36–51.

- Church, Logan. 2022. '3D-printed Firearms Seizures on the Rise.' 1news. 8 October.
- CIP (Center for International Policy) Security Assistance Monitor. n.d. 'China and the Arms Trade Treaty.'
- Clarke, Colin P. 2020. *Small Arms and Light Weapons (SALW) Trafficking, Smuggling, and Use for Criminality by Terrorists and Insurgents: A Brief Historical Overview*. ICCT (International Centre for Counter-Terrorism) Situation Report. Den Haag: ICCT. 15 July.
- Control Arms. 2018. 'Important Progress Made towards ATT Universalization in South Asia.' 15 June.
- . 2022. *Arms Trade Treaty: Regional Actor Handbook*. New York: Control Arms. 14 December.
- . 2023. 'Establishing an ATT National Control System.' Arms Trade Treaty KNP9. 23 August.
- and Stimson Center. 2023. 'Everything You Need to Know about ATT Reporting.' ATT KNP9 Side Event. 22 August.
- and the EU Delegation to the UN. 2023. 'Examining Support to Myanmar's Military: Implications for the Arms Trade Treaty.' ATT KNP9 Side Event. 25 August.
- Cruz-Ferrer, Ecevar B. and Alfredo Lubang. 2022. 'Implementing Challenges of the Arms Trade Treaty in the Philippines.' *Ateneo Law Journal*, Vol. 66, No. 3, pp. 801–25. February.
- Cullwick, Jonas. 2016. 'When Will Vanuatu Ratify the Arms Trade Treaty?' Daily Post. 14 May.
- Dahari, Rafidah, Nor Azizan Idris, and Zarina Othman. 2019. 'Influencing External Factors for Small Arms Light Weapon Smuggling at Malaysia-Thailand Border.' *Asian Social Sciences*, Vol. 15, No. 3. February, pp. 352–61.
- Dellerba, Isabelle, et al. 2024. 'Indo-pacifique : face à la menace chinoise, les pays de la région se réarment.' *Le Monde*. 17 March.
- Devaraj, Samuel. 2023. 'Two S'poreans Admit Role in Illegal \$2m Sale of Sonar That Ended Up with Myanmar Navy.' *Straits Times*. 28 August.
- Dhaka Tribune*. 2016. 'Use of Illegal Firearms on Rise.' 13 November.
- Eydoux, Thomas. 2022. 'How Rebel Fighters are Using 3D-printed Arms to Fight the Myanmar Junta.' France 24. 7 January.
- Fiji. 2023. 'Fiji Statement: Ninth Conference of the Arms Trade Treaty (KNP9), 21–25 August 2023, Agenda Item 5 – General Debate.' August.
- Fleischner, Justine. 2023. *Arms Smuggling Dynamics under Taliban Rule*. Situation Update. Geneva: Small Arms Survey and Afghan Peace Watch. July.
- Florquin, Nicolas, Sigrid Lipott, and Francis Wairagu. 2019. *Weapons Compass: Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa*. Report. Geneva: Small Arms Survey and African Union. January.
- Forum Regional Security Committee. 2000. 'Legal Framework for a Common Approach to Weapons Control Measures (Nadi Framework).' Nadi, Fiji. March.
- Foster, Scott. 2023. 'Japan's Remilitarization Aiming for More Arms Exports.' *Asia Times*. 16 February.
- Foster, Yolanda and Hashitha Abeywardana. 2006. *Small Arms and Light Weapons: Challenges in Sri Lanka and Options for the Future*. Report. London: South Asia Small Arms Network Sri Lanka and Saferworld. May.
- Fruchart, Damien, et al. 2007. *United Nations Arms Embargoes: Their Impact on Arms Flows and Target Behaviour*. Stockholm and Uppsala: SIPRI and Uppsala University.
- Global Organized Crime Index. n.d.a. 'Global Organized Crime Index.' Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- . n.d.b. 'Global Organized Crime Index: Arms Trafficking.' Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Global Sanctions. 2024. *Global Sanctions: Law, Practice and Guidance*.
- GMA News Online. 2018. 'Danao's "Pantik" Gun-making Industry Continues to Thrive.' 8 September.
- Gorea, Rakesh K. 2006. 'Impact of Proliferation of Small Arms and Light Weapons in South Asia.'

- Medicine, Conflict and Survival*, Vol. 22, No. 3. September, pp. 199–206.
- Goro, Jeremy and Osborne O. Sanida. 2023. *The 2022 PNG National General Elections Observation Study Report: The Case of Seven Electorates in the Highlands Region*. Boroko: The National Research Institute of Papua New Guinea. May.
- Gou, Son Lian. 2013. 'Drugs, Small Arms Proliferation and its Casualties: The Tragedy of Commons in Manipur.' *Journal of North East India Studies*, Vol. 3, No. 1. January–June, pp. 86–92.
- Green, Duncan and Anna Macdonald. 2015. *Power and Change: The Arms Trade Treaty*. Oxfam Policy & Practice. Oxford: Oxfam. 16 January.
- Griffiths, Hugh and Matt Schroeder. 2020. *Covert Carriers: Evolving Methods and Techniques of North Korean Sanctions Evasion*. Briefing Paper. Geneva: Small Arms Survey. September.
- Guarascio, Francesco and Khanh Vu. 2022. 'U.S., Russia Vie to Sell Arms to Vietnam at First Hanoi Fair.' Reuters. 8 December.
- Gutierrez, Jason. 2019. 'A Family Craft with a Deadly Toll: Illegal Gun Making.' *New York Times*. 7 April.
- Haider, Sarder Ali. 2021. 'Road to Enduring Peace in CHT: A Post Insurgency Analysis.' *International Journal of Social Sciences*, Vol. 10, No. 3. September, pp. 203–14.
- Haley, Nicole and Robert Muggah. 2006. 'The Scourge of the Gun: Armed Violence in Papua New Guinea.' In Small Arms Survey. *Small Arms Survey 2006: Unfinished Business*. Oxford: Oxford University Press, pp. 164–87.
- Hameiri, Shahar. 2007. 'The Trouble with RAMSI: Reexamining the Roots of Conflict in Solomon Islands.' *The Contemporary Pacific*, Vol. 19, No. 2, pp. 409–41.
- Hashim, Asad. 2019. 'Darra Adam Khel: Pakistan's Dying Gun Bazaar.' Al Jazeera. 4 February.
- Haug, Marie and Katherine Kramer. 2002. 'The Legal–Illicit Link: Global Small Arms Transfers.' In Small Arms Survey. *Small Arms Survey 2002: Counting the Human Cost*. Oxford: Oxford University Press, pp. 108–53.
- Hazarika, Pulokjyoti. 2024. 'Nexus Between Insurgency and Narco-trafficking: A Case Study of Manipur.' Vivekananda International Foundation. 26 April.
- Hiswi, Putti Ananda. 2018. 'Resolving the Illicit Trade of Small Arms and Light Weapon through ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).' *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No.2. October, pp. 110–23.
- HKMH (Hong Kong Maritime Hub). n.d. 'The World's Leading Cargo Transshipment Hub.'
- Holtom, Paul. 2021. *Taking Stock of the Arms Trade Treaty: Scope*. Stockholm: SIPRI. August.
- . 2024. *The Role of Interagency Cooperation in the Effective Implementation of Arms Trade Treaty Provisions: Brainstorming Workshop Summary*. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research.
- and Mark Bromley. 2011. *Implementing an Arms Trade Treaty: Lessons on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms*. SIPRI Policy Paper No. 28. Stockholm: SIPRI. July.
- , —, and Verena Simmel. 2012. *Measuring International Arms Transfers*. SIPRI Fact Sheet. Stockholm: SIPRI. December.
- and Sarah Parker. 2016. *The ASEAN States in Relation to the Arms Trade Treaty*. Unpublished background paper. Geneva: Small Arms Survey.
- , Anna Mensah, and Ruben Nicolin. 2022. 'The Case for Strengthening Transparency in Conventional Arms Transfers.' Washington, DC: Arms Control Association. November.
- Homayun, Jamilla. 2010. *Brokers without Borders: How Illicit Arms Brokers Can Slip Through Gaps in the Pacific and International Arms Control System*. Oxfam Case Study. Oxford: Oxfam. 18 October.
- Hunnicut, Trevor and Nandita Bose. 2023. 'Exclusive: Biden Aides in Talks with Vietnam for Arms Deal That Could Irk China.' Reuters. 23 September.

- ICG (International Crisis Group). 2010. 'Illicit Arms in Indonesia.' Asia Policy Briefing No. 109. Jakarta/Brussels: ICG. 6 September.
- . 2018. 'Philippines: Addressing Islamist Militancy after the Battle for Marawi.' 17 July.
- ICJ (International Court of Justice). 2024. 'Summary of the Order of 26 January 2024.' Document Number 192-20240126-SUM-01-00-EN.
- ICRC (International Committee of the Red Cross). n.d. International Humanitarian Law Database: Weapons Control Act 1971 (revised in 2004).
- ImproGuns. 2014. 'Locally Made "Katta" Pistols Seized Across India.' The Firearm Blog, 3 November.
- India. 2013. 'Explanation of Vote Statement by Ambassador Sujata Mehta, Permanent Representative of India to the Conference of Disarmament in Geneva during the UNGA Session on the Arms Trade Treaty.' 2 April.
- . 2024. Presentation of India to the Regional Preparatory Meeting for the Fourth Review Conference on the PoA on Small Arms and Light Weapons – Asia-Pacific. Nepal, Kathmandu. January.
- Indonesia. 2023. 'Statement by Delegation of the Republic of Indonesia on behalf of the Non-Aligned Movement at the First Committee of the 78th Session of the United Nations General Assembly Thematic Debate "Conventional Weapons".' New York. October.
- Islam, Nazar Ul and Benazir Shah. 2019. 'Pakistan's "Gun Valley": A Town of 80,000 People & 2,000 Weapon Shops.' The Print. 22 January.
- ITA (International Trade Administration). 2024. 'Laos - Market Overview.' 27 February.
- IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs). 2012. *Militarization in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: The Slow Demise of the Region's Indigenous People*. IWGIA Report 14. Copenhagen: IWGIA.
- Jalil, Ghazala Yasmin. 2016. 'Arms Trade Treaty – A Critical Analysis.' *Strategic Studies*, Vol. 36, No. 3, pp. 78–94.
- Japan. 2014. 'Implementation Guidelines for the Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology.' Last amended 8 March 2022.
- . 2021. 'Statement by H.E. Mr. Ichiro Ogasawara, Ambassador of Japan to the Conference on Disarmament, at the Seventh Conference of the State Parties to the Arms Trade Treaty. Thematic Discussion "Strengthen Efforts to Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons and Ensure Efficient Stockpile Management".' Delegation of Japan to the Conference on Disarmament, Geneva. 30 August.
- Japan Times*. 2024. 'Japan Greenlights its Defense Industry.' 29 March.
- Jelvin, Jose and Kannan Reghunathan Nair. 2021. 'To Honor its Commitment to UN Arms Trade Treaty, China Must Sacrifice.' *Journal of Indo-Pacific Affairs*. Air University (AU). 25 August.
- Jenzen-Jones, N.R. 2014. *Producers of Small Arms, Light Weapons, and Their Ammunition*. Research Note No. 43. Geneva: Small Arms Survey. July.
- and Matt Schroeder, eds. 2018. *An Introductory Guide to the Identification of Small Arms, Light Weapons, and Associated Ammunition*. Handbook. Geneva: Small Arms Survey. November.
- and Patrick Senft. 2022. 'Craft-produced Firearm Used to Assassinate Shinzo Abe.' The Hoplite. 8 July.
- Jolly, Édouard (dir.). 2023. *Prévention et lutte contre les trafics d'armes classiques: les enjeux et enseignements de la zone Indopacifique*. Étude No. 103. Paris: Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM). March.
- Justice For Myanmar. 2022. 'Exposed: Companies Brokering Arms & Equipment to Myanmar Military.' 11 August.
- Kanwal, Gurmeet. 2013. 'India Abstains and Exposes the Arms Trade Treaty.' IDSA Comment. Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. 8 April.
- Kaul, Nitasha. 2022. 'Bhutan's Foreign Policy Balancing Act.' East Asia Forum. 26 November.

- Kaya. n.d. 'Strengthening Transit, Transshipment, and Brokering Controls to Prevent Illicit Arms Diversion.'
- Khouth, Sophak Chakrya. 2015. 'Homemade Guns Burned.' *Phnom Penh Post*. 7 January.
- Kim, Hyuk. 2022. *North Korea's Trading of Small Arms and Light Weapons: Open Source Information Analysis of Sanctions Implementation*. Washington, DC: Stimson Center. 1 September.
- Kiribati. 1977. Arms and Ammunition Ordinance. Laws of the Gilbert Islands. Revised edition 1977.
- . 2022. 'Statement by the Republic of Kiribati at the Eighth Conference of State Parties (KNP8) Arms Trade Treaty 22–26 August 2022.' Geneva. August.
- Koorey, Stephanie. 2016. *Illicit Small Arms in the Pacific*. Civil-Military Occasional Papers 1/2016. Canberra: Australian Civil-Military Centre. February.
- LeBrun, Emile. ed. 2019. *Gender-responsive Small Arms Control: A Practical Guide*. Handbook. Geneva: Small Arms Survey. October.
- Lee, Jaewon. 2013. *South Korea's Export Control System*. SIPRI Background Paper. Stockholm: SIPRI. November.
- . 2023. *Understanding the Recent Southeast Asian Arms Build-up: A Commitment to a Minimum Military Response Capability*. Issue Brief. Seoul: Asan Institute for Policy Studies. 20 December.
- Lee, Jong Min. 2023. 'Analysis: North Korea is Aiding the Russia-Ukraine War via Arms Trade.' Fletcher Russia and Eurasia Program. 30 September.
- Lee, Joyce and Josh Smith. 2023. 'Insight: Inside South Korea's Race to Become One of the World's Biggest Arms Dealers.' Reuters. 29 May.
- Liang, Xiao, et al. 2023. *The SIPRI Top 10 Arms-producing and Military Services Companies, 2022*. SIPRI Fact Sheet. Stockholm: SIPRI. December.
- Ligaiula, Pita. 2021. 'Guns in High Demand, Arms Smuggling Linked to PNG Elections.' Pacific Islands News Association. 20 October.
- Liu, Peng, He Miao, and Wang Huan. 2022. 'Major Powers Make the Call? Review of 70 Years Engagement of Major Powers with Myanmar.' *Global Policy*, Vol. 14, No. 1, pp. 173–82.
- Lodgaard, Sverre. 2023. 'Major Powers in a Shifting Global Order.' Policy Brief No. 162. Tokyo: Toda Peace Institute. July.
- MACAAP (Mapping ATT-relevant Cooperation and Assistance Activities Project). 2016. 'Philippines – ATT Outreach Project Roadmap Activity, Industry Outreach Event.'
- . 2019. 'EU P2P ATT OP II Fourth Roadmap Activity in the Philippines - Outreach to Industry.'
- Malaysia. 2023. 'Statement by Malaysia at the General Debate of the Ninth Conference of States Parties (KNP9) to the Arms Trade Treaty (ATT), 21–25 August 2023.' Geneva. August.
- Maldives Independent. 2015. 'Maldives Urged to Sign Arms Trade Treaty.' 29 October.
- Maletta, Giovanna and Sybille Bauer. 2021. *Taking Stock of the Arms Trade Treaty: International Assistance to Support Implementation*. Stockholm: SIPRI. August.
- Malik, Aqab. 2016. 'Darra Adam Khel "Home Grown" Weapons.' *ASPJ Africa & Francophonie*, pp. 73–96.
- Malik, Salma. 2000. 'Domestic Production, Illegal Manufacture and Leakage of Small Arms—A Case Study of Pakistan.' In Dipankar Banerjee, ed., *South Asia at Gun Point: Small Arms and Light Weapons Proliferation*. Colombo: Regional Centre for Strategic Studies, pp. 131–78.
- Mariani, Bernardo. 2021. 'China's Arms Exports to Sub-Saharan Africa.' Note No. 29. Paris: IFRI.
- Marshall Islands. 1983. Firearms Control Act 1983.
- Matangi Tonga Online. 2016. 'Tonga Urged to Sign Arms Trade Treaty.' 28 April.
- Matthews, Ron and Collin Koh. 2019. 'Singapore's Defence-Industrial Ecosystem.' In Keith Hartley and Jean Belin, eds. *The Economics of the Global Defence Industry*. London: Routledge, pp. 527–46.

- Mendee, Jargalsaikhan and Nyamjav Soyolgerel. 2022. *Mongolia's New Foreign Policy Strategy: A Balancing Act with Central and Northeast Asia*. Mongolian Geopolitics No. 19. Ulaanbaatar: Friedrich-Ebert-Stiftung Mongolia and Mongolian Institute for Innovative Policies.
- Mongolia. 2022. 'Statement by H.E. Ambassador Gerelmaa Davaasuren, Permanent Representative of Mongolia to the United Nations Office in Geneva on behalf of the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia, to the Eighth Conference of the States Parties to the Arms Trade Treaty, in which "Mongolia Reiterates Its Commitment To Global Efforts In Regulating International Trade In Conventional Weapons".' Geneva. 24 August.
- Mustafa, Malik Qasim. 2005. 'Proliferation of Small Arms and Light Weapons: Case Study - South Asia.' *Strategic Studies*, Vol. 25, No. 2, pp. 27–54.
- National Museum Australia. 2023. 'Port Arthur Massacre.'
- Nauru. 1967. Arms and Opium Prohibition Ordinance of 1936–1967. Assented to 29 May.
- New Zealand. 2020. 'Statement to the Sixth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty. August 2020.' Geneva. August.
- . 2021. Strategic Goods List. Implemented by the Ministry of Foreign Affairs and Trade under the Customs Export Prohibition Order 2021. November.
 - and Small Arms Survey. 2014. *Arms Trade Treaty: Model Law*. Geneva: Small Arms Survey. October.
- NISEA (Nonviolence International South East Asia). 2024. *Understanding Challenges to Arms Trade Treaty Universalization in Southeast Asia*. Unpublished background paper.
- OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights). 2023. 'The Billion Dollar Death Trade: The International Arms Networks That Enable Human Rights Violations in Myanmar.' May.
- Oxfam. 2006. 'India and the Arms Trade Treaty.' Oxfam Briefing Note. September.
- Pakistan. n.d. 'Defence Products of Pakistan.' Embassy of Pakistan to Athens, Greece, PowerPoint presentation.
- Palau. 2018. 'Arms Trade Treaty Voluntary Trust Fund: Final Report, Palau Ministry of Justice.' 5 October.
- Paudel, Lekh Nath. 2014. *The Highway Routes: Small Arms Smuggling in Eastern Nepal*. NAVA Issue Brief 4. Geneva: Small Arms Survey. November.
- Persi Paoli, Giacomo and Elli Kytomaki. 2016. *Towards a Universal Arms Trade Treaty: Understanding Barriers and Challenges in South-East Asia*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- PGA (Parliamentarians for Global Action). 2020. 'Niue Accedes to the Arms Trade Treaty.' 10 August.
- Philippines. 2020. 'National Statement to the Sixth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty, 17–21 August 2020.' Geneva. August.
- . 2023. 'Statement by Atty. Janice S. Dimayacyac, Director, Strategic Trade Management Office, Department of Trade and Industry, at the 9th Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (21–25 August 2023) to the session of the Working Group on Treaty Universalization.' August.
 - . 2024. 'Regional Roadmap Towards a Regional Mechanism on Weapons Regulations.' Presentation at the Regional Preparatory Meeting for the Fourth Review Conference on the PoA on Small Arms and Light Weapons – Asia-Pacific. Nepal, Kathmandu. January.
- Picard, Michael, Paul Holtom, and Fiona Mangan. 2019. *Trade Update 2019: Transfers, Transparency, and South-east Asia Spotlight*. Report. Geneva: Small Arms Survey. December.
- PIF (Pacific Islands Forum). 1992. Declaration by the South Pacific Forum on Law Enforcement Cooperation: Honiara Declaration.
- . 1997. Aitutaki Declaration on Regional Security Cooperation. 18 September.
 - . 2022. '2050 Strategy for the Blue Pacific Continent.'

- Pike, Travis. 2022. 'Guns Are Being 3D Printed in Myanmar.' *The National Interest*. 14 January.
- PNG (Papua New Guinea). 2014. 'Statement by Mr Peter Bonny, First Secretary of the Permanent Mission of the Independent State of Papua New Guinea to the United Nations at the First Committee General Debate.' 13 October.
- Prizeman, Katherine. 2013. *Looking to the Future of the Arms Trade Treaty*. New York: Friedrich-Ebert-Stiftung. April.
- PSA Singapore. n.d. 'Our Story: The World's Port Of Call.'
- Rahman, M. Ashique. 2012. 'Towards a Global Arms Trade Treaty and Bangladesh: Opportunities and Challenges Ahead.' *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Journal*, Vol. 33, No. 4. October.
- Rana, Sohel, and Meherun Nesa. 2018. 'Illegal Fire Arms in Bangladesh: Key Actors.' *Sarjana*, Vol. 33, No. 2. 3 December, pp. 30–42.
- RAND. n.d. 'China's Security Exports.'
- Raustiala, Kal and Anne-Marie Slaughter. 2002. 'International Law, International Relations and Compliance.' In Walter Carlnaes, Tomas Risse, and Beth Simmons, eds. *The Handbook of International Relations*. Princeton Law & Public Affairs Paper No. 02-2. London: Sage, pp. 538–58.
- Reuters. 2008. 'Russian Arms Dealer to Face Trial in Thailand-police.' 7 March.
- RUSI (Royal United Services Institute). n.d. 'DPRK Reports Database.'
- Saferworld. 2020. 'China's Accession to the ATT: Opportunities and Challenges.' News and Events. 15 July.
- Salisbury, Daniel. 2019. 'Exploring the Use of "Third Countries" in Proliferation Networks: The Case of Malaysia.' *European Journal of International Security*, Vol. 4, No. 1, pp. 10–22.
- Samoa. 2013. 'Statement by His Excellency Tuilaepa Sailele Malielegaoi Prime Minister, to the 68th Session of the United Nations General Assembly, General Debate.' New York. 27 September.
- . 2019. 'Statement by Anna Main, Principal Foreign Service Officer at the Ministry of Foreign Affairs, at the Fifth Conference of the States Parties to the Arms Trade Treaty, 26–30 August 2019.' Geneva. August.
- . 2024. Presentation to the Regional Preparatory Meeting for the Fourth Review Conference on the PoA on Small Arms and Light Weapons – Asia-Pacific. Nepal, Kathmandu. January.
- Santi, Natalia and Abdul Manan. 2018. 'Indonesia Refuses to Sign Arms Trade Treaty.' Tempo.Co. 19 October.
- Santos, Jr, Soliman M. and Paz Verdades M. Santos. 2010. *Primed and Purposeful: Armed Groups and Human Security Efforts in the Philippines*. Geneva: Small Arms Survey and South-South Network for Non-State Armed Group Engagement. April.
- Sasaki, Rena. 2023. 'Japan's Path from Arms Export Ban to Promotion.' E-International Relations. 15 November.
- Sawitta Lefevre, Amy. 2015. 'Thailand to Recognize "Third Gender" in New Constitution: Panel.' Reuters. 15 January.
- Schroeder, Matt. 2012. 'Surveying the Battlefield: Illicit Arms in Afghanistan, Iraq, and Somalia.' In *Small Arms Survey 2012: Moving Targets*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 312–55.
- Shah Khan, Muhammad Raza. 2005. *The Prevalence and Impacts of Small Arms and Light Weapons in NWFP and Federally Administered Tribal Areas (FATA) of Pakistan*. Peshawar: Sustainable Peace and Development Organization.
- Sharma, Gaurav and Mark Finaud. 2019. *The Arms Trade Treaty (ATT) and Asia's Major Power Defiance—India, China, Pakistan, and Indonesia*. Strategic Security Analysis, Issue 6. Geneva: Geneva Centre for Security Policy. May.

- Singapore. 1995. Regulation of Imports and Exports Act 1995. 1 December.
- 2002. Strategic Goods (Control) Act. 1 January.
 - 2021. Guns, Explosives and Weapons Control Act 2021. No. 3 of 2021, Government Gazette, Act Supplement. 26 February.
 - 2023. 'National Statement by the Republic of Singapore to the 9th Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty, 21–25 Aug 2023.' Geneva. August.
- SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). n.d.a. 'Arms Embargoes.' SIPRI Databases. Accessed 15 February 2024.
- n.d.b. 'Frequently Asked Questions.' SIPRI Military Expenditure Database.
 - n.d.c. 'SIPRI Arms Transfers Database.' Accessed 15–16 April 2024.
 - n.d.d. 'Sources and Methods.' SIPRI Arms Transfers Database.
- Siyech, Mohammed Sinan. 2019. 'Arms Smuggling in India: Exploring Links between Crime and Terrorism.' *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 45, Nos. 5 and 6, pp. 445–62.
- Small Arms Survey. 2023. 'Arms Embargo Self-Assessment Tool.' May.
- 2024. 'Privately Made Firearms and Other Non-industrial Small Arms and Light Weapons.' May. Geneva: Small Arms Survey.
 - Instituto Sou da Paz, and UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research). 2024. 'The Growing and Multifaceted Global Threat of Privately Made and Other Non-industrial Small Arms and Light Weapons.' Working Paper prepared for the Fourth United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects and the International Tracing Instrument, New York, 17–28 June 2024. 10 June.
- Smith, Claire Q. 2020. 'Liberal and Illiberal Peace-building in East Timor and Papua: Establishing Order in a Democratising State.' *Conflict, Security & Development*, Vol. 20, No. 1, pp. 39–70.
- Solomon Islands. 2016. 'Solomon Islands Participates in Arms Trade Treaty (ATT) Workshop.' Ministry of Foreign Affairs and External Trade. 21 October.
- South Korea. 2016. 'Statement by H.E. Ambassador KIM, In-chul, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of the Republic of Korea to the United Nations, The Second Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty.' 22 August.
- 2019. 'Statement of the Republic of Korea to the Fifth Conference of State Parties to the Arms Trade Treaty.' 26 August.
- Spano, Laura and Philip Alpers. 2017a. *Reinvigorating the Narrative: The Broader Benefits of the Arms Trade Treaty*. Sydney: CAVR. September.
- 2017b. *Implementing the Arms Trade Treaty and the UN PoA: A Guide to Coordinating an Effective Arms Control System*. Sydney: CAVR. October.
- Stanley-Lockman, Zoe. 2019. 'SALW Procurement and Industry Expansion Trends in South-east Asia.' Unpublished background paper. Geneva: Small Arms Survey. March.
- Stavrianakis, Anna and He Yun. 2014. *China and the Arms Trade Treaty: Prospects and Challenges*. Report. London: Saferworld. May.
- Subedi, D.B. and Prakash Bhattharai. 2017. 'The April Uprising: How a Nonviolent Struggle Explains the Transformation of Armed Conflict in Nepal.' *Journal of Peacebuilding & Development*, Vol. 12, No. 3, pp. 85–97.
- Sugito and Muhammad Zahrul Anam. 2022. 'The United Nations Mission in Disarmament, Demobilization and Reintegration in the Democratic Republic of Timor-Leste: A Failed Case or Problematic Case.' *UNISCI Journal*, Vol. 20, No. 58. February, pp. 125–40.
- Swanston, Tim and Emily Clark. 2024. 'Heavily Armed Highlands.' ABC News. 29 February.
- Thailand. 2023. 'Statement of Thailand by Mr. Ruchakorn Napapornpipat Deputy Secretary-General of National Security Council Office of the National Security Council, at the Ninth

- Conference of States Parties (KNP9) to the Arms Trade Treaty (ATT).' Geneva. 22 August.
- The National. 2011. 'Govt Queried on Guns' Report.' 22 February.
- . 2024. 'Guns Report Yet to Be Tabled: Singirok.' 20 February.
- Tian, Nan, et al. 2024. *Trends in World Military Expenditure, 2023*. SIPRI Fact Sheet. Stockholm: SIPRI. April.
- Tieu, Bac and Phuong Minh. 2023. 'Vietnam's Dak Lak Collects over 300 Homemade Guns in Exchange Program.' *Tuoi Tre News*. 8 July.
- Tonga. 2015. 'Tonga and the World Are Vulnerable to Threats of Illegal Arms Trade.' 18 May.
- Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas and Putu Eva Ditayani Antari. 2021. 'Preventing the Illegal Trade of Smuggling Small Arms and Light Weapons (SALW) through UNPoA in Indonesia.' *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3, pp. 336–53.
- UN (United Nations). 2018. 'Modular Small-arms-control Implementation Compendium MOSAIC: Glossary of Terms, Definitions and Abbreviations (01.20).' Version 1.6.
- . 2024. 'Security Council Fails to Extend Mandate for Expert Panel Assisting Sanctions Committee on Democratic People's Republic of Korea.' Meeting coverage. SC/15648 of 28 March.
- UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database). n.d. 'United Nations Commodity Trade Statistics Database.' Accessed 13 April 2024.
- UNGA (United Nations General Assembly). 2005. International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons ('International Tracing Instrument'). Adopted 8 December. A/60/88 of 27 June (annexe).
- . 2006. 'Towards an Arms Trade Treaty: Establishing Common International Standards for the Import, Export and Transfer of Conventional Arms.' A/RES/61/89 of 6 December.
- . 2007. *Report of the Group of Governmental Experts Established Pursuant to General Assembly Resolution 60/81 to Consider Further Steps to Enhance International Cooperation in Preventing, Combating and Eradicating Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons*. A/62/163 of 30 August.
- . 2013. Arms Trade Treaty. 'Certified True Copy (XXVI-8).' Adopted 2 April. In force 24 December 2014.
- UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) and UNRCPD (United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament). 2024. 'Fostering Gender-responsive Small Arms Control: Perspectives from the Asia-Pacific Region on the UN PoA and the ATT.' YouTube. 20 February.
- United Kingdom. 2024. 'The ATT Voluntary Trust Fund (VTF): Supporting National ATT Implementation Plans (Strategies).' UK Delegation to the Conference on Disarmament and ATT Secretariat. Arms Trade Treaty KNP10 Preparatory Meeting Side Event. 16 May.
- UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs). 2018. 'United Nations Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation Factsheet.' July.
- . 2024a. United Nations Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation.
- . 2024b. 'Sri Lankan Police Revitalizes Stockpile Management Practices.' 2 April.
- UNRCPD (United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament). 2020a. 'Compendium: UNRCPD Project on Gun Violence and Illicit Small-Arms Trafficking from a Gender Perspective: Activities, Outcomes, Recommendations.'
- . 2020b. 'UN Regional Centre Wraps Up Project to Support Timor-Leste's Implementation of Arms Control Frameworks.' 20 February.
- . n.d. 'Timor-Leste.'
- UNROCA (United Nations Register of Conventional Arms). n.d.a. 'About.'
- . n.d.b. 'United Nations Register of Conventional Arms Database.' Accessed 17 June 2024.

- UNSC (United Nations Security Council). 2006. 'Letter Dated 4 July 2006 from the Permanent Representative of Japan to the United Nations Addressed to the President of the Security Council.' S/RES/1695 of 15 July.
- . 2014. *Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874 (2009)*. S/2014/147 of 6 March.
 - . 2015. *Final Report of the Panel of Experts Pursuant to Security Council Resolution 2141 (2014)*. S/SO15/131 of 23 February.
 - . 2017. *Final Report of the Panel of Experts Pursuant to Security Council Resolution 1874 (2009)*. S/2017/150 of 27 February.
 - . 2018. 'Fact Sheet Compiling Certain Measures Imposed by Security Council Resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2027), 2375 (2017), and 2397 (2017).' 17 April.
 - . 2023. *Final Report of the Panel of Experts Pursuant to Security Council Resolution 2627 (2022)*. S/2023/171 of 7 March.
- Vanuatu. 1988. Firearms Act.
- Varella, Laura. 2024. 'Report on the Virtual Informal Consultations on "Upholding Legal Obligations Under the ATT: The Case of the Palestinian People".' *ATT Monitor*, Vol. 16, No. 1. 20 February.
- Varisco, Andrea Edoardo, Giovanna Maletta, and Lucile Robin. 2021. *Taking Stock of the Arms Trade Treaty: Achievements, Challenges and Ways Forward*. Stockholm: SIPRI. December.
- Vecchioni, Matilde and Sanem Topal. 2024. *Unregulated: Examining the Global Proliferation of Craft-Produced Weapons*. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research. February.
- Vestner, Tobias. 2020. 'The New Geopolitics of the Arms Trade Treaty.' Arms Control Association. December.
- Watson, Callum. 2024. *Meaningful Partners: Opportunities for Collaboration between Women, Peace and Security, and Small Arms Control at the National Level*. Briefing Paper. Geneva: Small Arms Survey. February.
- Watson, Danielle, et al. 2023. *Policing in the Pacific Islands*. London: Palgrave Macmillan.
- WCO (World Customs Organization). n.d. 'What is the Harmonized System (HS)?'
- Weiss, Michael. 2017. 'The Arms Trade Treaty in the Asia-Pacific.' *The Diplomat*. 22 December.
- Wezeman, Pieter D., Justine Gadon, and Siemon T. Wezeman. 2023. *Trends in International Arms Transfers, 2022*. SIPRI Fact Sheet. Stockholm: SIPRI. March.
- et al. 2024. *Trends in International Arms Transfers, 2023*. SIPRI Fact Sheet. Stockholm: SIPRI. March.
- Wezeman, Siemon T. and Pieter D. Wezeman. 2014. *Trends in International Arms Transfers, 2013*. SIPRI Fact Sheet. Stockholm: SIPRI. March.
- , Mathew George, and Pieter D. Wezeman. 2024. *Transparency in Armaments in South East Asia: Learning from Three Decades of the United Nations Register of Conventional Arms*. SIPRI Research Policy Paper. Stockholm: SIPRI. February.
- Woolcott, Peter. 2014. 'The Arms Trade Treaty.' United Nations Audiovisual Library of International Law. New York: United Nations.
- Yasutomo, Dennis T. and Tomoaki Ishigaki. 2017. *Japan's Proactive Multilateralism*. Smith Scholar Works. Smith College, Northampton, MA: Smith College.

Small Arms Survey

Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Geneva
Switzerland

t +41 22 908 5777

e info@smallarmssurvey.org

Tentang Small Arms Survey

Small Arms Survey merupakan pusat pengetahuan terapan yang didedikasikan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran senjata ringan ilegal dan kekerasan bersenjata. Survei ini menginformasikan kebijakan dan praktik melalui kombinasi data, pengetahuan berbasis bukti, sumber daya dan perangkat otoritatif, serta saran dan pelatihan ahli yang disesuaikan, di samping juga mempertemukan praktisi dan pembuat kebijakan.

Survei ini merupakan program afiliasi dari Geneva Graduate Institute yang berlokasi di Swiss, dan memiliki staf internasional dengan keahlian dalam studi keamanan, ilmu politik, hukum, ekonomi, studi pembangunan, sosiologi, kriminologi, serta manajemen basis data dan program. Survei ini bekerja sama dengan jaringan peneliti, praktisi, lembaga mitra, organisasi nonpemerintah, dan pemerintah di lebih dari 50 negara.

Aktivitas dan hasil Survei mungkin diselenggarakan berkat dukungan inti serta pendanaan proyek. Daftar lengkap donor dan proyek terkini dapat diakses melalui situs web Small Arms Survey.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.smallarmssurvey.org.



Sebuah publikasi Small Arms Survey,
didukung oleh Pemerintah Kanada